

**PANDANGAN DAN SIKAP PERS INDONESIA
TERHADAP
KONFRONTASI INDONESIA — MALAYSIA
1962 — 1965**

Skripsi
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra

Oleh

YOSEF TOR TULIS

NPM 0787040312

Jurusan Sejarah Indonesia



Fakultas Sastra Universitas Indonesia
1993

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Tor Tulis
Angkatan : 1987
Jurusan : Sejarah
Tahun Lulus : 1993

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak dapat memperoleh tanda tangan para penguji skripsi saya dan ketua jurusan karena mereka sudah meninggal dunia. Namun skripsi sudah diujikan pada 28 Juli 1993 dan dinyatakan lulus. Judul skripsi saya adalah "Pandangan dan Sikap Pers Indonesia Terhadap Konfrontasi Indonesia – Malaysia 1962-1965."

Surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan pengambilan ijazah yang hingga kini masih tersimpan dalam arsip Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Di Jakarta

Tanggal 9 September 2024

Tertanda

Mengetahui

Mengetahui

a.n Wakil Dekan I
Manajer Pendidikan



Yosef Tor Tulis
NPM 0787040312

Dr. Abdurakhman
NUP: 0706050111

Rouli Esther, S.S., M.Si.M.A., Ph.D.
NUP:

Seluruh isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Depok, Juli 1993

Penulis

YOSEF TOR TULIS
NPM 0787040312





**Buat Ayah-Bunda dan Istri tercinta
yang senantiasa mendukung dan
mengasihi**

PRAKATA

Skripsi ini merupakan tugas akhir sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sebelum mencapai bentuknya seperti ini, Penulis telah melakukan beberapa langkah kegiatan prosedural berdasarkan metode historiografi. Mulai dari kegiatan heuristik, kritik, interpretasi, sampai dengan tahap terakhir berupa penyajian atau historiografi itu sendiri.

Dalam setiap tahap kegiatan, Penulis banyak menemui kesulitan yang cukup menghambat kelancaran maupun kedalaman penelitian. Salah satu kesulitan yang terasa sangat berat dan menghambat adalah masalah kelangkaan sumber kepustakaan, baik untuk menyusun landasan teoritis maupun untuk menambah kedalaman penelitian. Kesulitan itu menjadi semakin sulit teratasi ketika beberapa tokoh dan pelaku sejarah tidak bisa diwawancarai dengan alasan masing-masing. Ada yang memberi alasan karena sibuk atau sedang bepergian ke luar negeri. Sebagian menolak untuk diwawancarai karena masalahnya dianggap masih peka, dan sebagian lagi telah tiada.

Kendala utama yang mengikat Penulis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan di atas sebenarnya terletak pada faktor dana penelitian dan waktu. Sungguh bukan merupakan perkara ringan bagi seorang mahasiswa yang harus membiayai sendiri semua kebutuhan hidup termasuk biaya perkuliahan di kota besar seperti Jakarta, untuk secara mendalam dan dalam waktu relatif singkat mampu menyelesaikan karya ilmiah seperti ini.

Namun dalam pelbagai keterbatasan itu, berkat bantuan dan dorongan beberapa pihak, skripsi ini akhirnya selesai juga pada waktunya. Hal ini tentu memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi Penulis; dan dalam

keadaannya yang masih belum sempurna seluruh isi skripsi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penulis.

Bagaimanapun, skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa uluran tangan berbagai pihak. Dalam kaitan itu saya merasa sangat berutang budi kepada mereka semua dan karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini saya paparkan rangkaian ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Pertama-tama, saya tidak mungkin mengingkari kewajiban saya untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almamater Universitas Indonesia. Terutama Fakultas Sastra dan teristimewa Jurusan Sejarah Universitas Indonesia tempat saya memulai dan mengembangkan diri dalam dunia akademik. Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga secara khusus tertuju kepada Ibu Magdalia SS., MA selaku Pembimbing dan Ibu Nana Nurliana SS., MA selaku Pembaca, yang dengan sabar dan tekun telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada Penulis.

Selanjutnya Penulis juga merasa berhutang budi kepada semua penulis buku maupun penerbit atas karya-karya mereka yang merupakan sumber inspirasi dan informasi yang sangat berharga, terutama pihak Pusat Sejarah ABRI yang banyak membantu Penulis dalam memperoleh sumber-sumber primer berupa surat kabar. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya tujukan kepada Bapak Soebagyo-Pr, Drs. Hoeta Soehoet, Yohanes Barus, dan Dr. B.P. Paulus, SH atas segala perhatian, data, dan informasi berharga yang disampaikan secara lisan dalam wawancara maupun diskusi. Secara khusus ucapan terima kasih yang sangat mendalam saya tujukan kepada Bapak (alm.) Dr. B.P. Paulus, SH atas restu dan dukungan finansial yang memungkinkan Penulis menyelesaikan tugas ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya juga

saya sampaikan kepada Istri saya Dian Sience Rumopa yang dengan penuh kasih mendampingi dan memberi dorongan moril kepada Penulis untuk menyelesaikan perbaikan skripsi ini. Juga kepada Saudara Christina Murniaty, Yosefina, dan Frederikus Lusti atas semua perhatian dan pengertian mereka yang mendalam terhadap kesibukan saya.

Akhirnya rasa bangga dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan kepada ayah dan ibu tercinta, Bapak Paulus Tulis dan Ibu Katharina Jelumur, serta kakak Narsisius Mbok yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan doa restunya sehingga skripsi ini dapat dimulai dan diselesaikan dengan baik dan pada waktunya.

Penulis menyadari karya ini mengandung banyak kelemahan yang menuntut penelitian lebih lanjut untuk penyempurnaannya.

Jakarta, Juli 1993

YOSEF TOR TULIS

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
KRONOLOGI KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Masalah	2
1.3. Kerangka Analisa Teoritik	4
1.3.1 Landasan Teori	4
1.3.2 Hipotesa dan Dalil	9
1.3.3 Operasionalisasi Konsep	10
1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	12
1.5 Metodologi	14
1.5.1 Metode dan Sifat Penelitian	14
1.5.2 Populasi, Sampel, dan Unit Analisis	15
1.6 Sumber Data	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II INDONESIA DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN	19
2.1 Percaturan Politik Segitiga	20
2.1.1 Periode 1959—1963	22
2.1.2 Periode 1963—1965	24
2.2 Politik Luar Negeri dan Kepentingan Politik Domestik	26
2.3 Sistem dan Dinamika Kehidupan Pers	29
2.3.1 Pers Terpimpin 1959—1963	30
2.3.2 Pers Terpimpin 1963—1965	33
BAB III KONFRONTASI INDONESIA — MALAYSIA	37
3.1 Gagasan Pembentukan Federasi Malaysia	40
3.2 Konfrontasi Politik	45
3.3 Konfrontasi Ekonomi dan Militer	49

BAB IV	KONFRONTASI DALAM PANDANGAN PERS	57
4.1	Gagasan dan Pembentukan Federasi Malaysia	58
4.2	Politik Konfrontasi	68
4.3	Upaya Damai yang Gagal	75
4.4	Konfrontasi Ekonomi dan Militer	84
4.4.1	Konfrontasi Ekonomi	88
4.4.2	Konfrontasi Militer	92
BAB V	KESIMPULAN	109
5.1	Interpretasi	109
5.2	Generalisasi dan Karakterisasi	112
5.3	Konklusi	120
	BIBLIOGRAFI	123
	INDEKS	127
	LAMPIRAN	129
	GAMBAR DAN KARIKATUR	145
	TENTANG PENULIS	155

DAFTAR ISTILAH

akronim	: ungkapan berupa singkatan
aksi massa	: gerakan, mobilisasi massa
ballance of power	: perimbangan kekuatan
bipolarisasi	: sistem dua kutub
Blok Barat	: negara-negara yang berpaham kapitalisme
Blok Timur	: negara-negara yang berpaham komunisme
collapse	: runtuh, gagal, roboh
containment	: pembendungan
content analysis	: analisis isi
editorial	: tajuk, induk karangan
ekspansi	: perluasan
favorably	: bereaksi secara positif
fellow-traveler	: simpatisan partai komunis
ideologi	: pandangan hidup
imperialisme	: kekuatasaan atas daerah atau negara lain
independen	: mandiri, tidak bergantung pada yang lain
indirect strategy	: strategi tidak langsung
klaim Nasional	: tuntutan, pernyataan seluruh Bangsa
kolonialisme	: penjajahan
kontra-revolusi	: musuh revolusi yang menentang revolusi
Malaysian Day	: Hari Proklamasi Federasi Malaysia
Nasakomisasi	: usaha mengindoktrinasi politik Nasakom
nasionalis	: pencinta nusa dan bangsa
neokolonialisme	: penjajahan bentuk atau model baru
oratoris	: ahli pidato
penjaga republik	: penanggungjawab keamanan negara
Persbreidel Ordinantie	: Peraturan, UU Pembreidelan Pers
politik surat kabar	: Strategi untuk tetap survival
radikalisasi	: perubahan sampai ke akar-akarnya
revolusioner	: menghendaki perubahan cepat dan sekaligus
self-government	: pemerintahan sendiri
terompet, corong partai	: alat, media yang digunakan parpol tertentu
visi surat kabar	: pandangan, nilai yang dianut surat kabar
tajuk rencana	: induk karangan dalam majalah, surat kabar

DAFTAR SINGKATAN

AB	: Harian Angkatan Bersenjata
AMPAI	: Perwakilan Distribusi Film Amerika di Indonesia
ANZUS	: Persekutuan Pertahanan Australia, New Zealand, AS
BPS	: Badan Pendukung Soekarnoisme
CIA	: Badan Intelijen Amerika Serikat
CONEFO	: Konferensi negara-negara Nefos
Dekolim	: Dekolonialisme dan deimperialisme
Dwikora	: Dwi Komando Rakyat
DM	: Duta Masyarakat
FN	: Front Nasional
HR	: Harian Rakyat
IOC	: International Olympic Committee
KAA	: Konferensi negara-negara Asia dan Afrika
KOGA	: Komando Siaga
KOLAGA	: Komando Mandala Siaga
Kolim	: Kolonialisme dan imperialisme
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
Manipol	: Manifesto (pernyataan) Politik
MAPHILINDO	: Malaysia, Philipina, Indonesia
Nasakom	: Nasionalisme, Agama, Komunisme
Nefos	: new Emerging Forces
Nekolim	: Neokolonialisme dan Imperialisme
Oldefos	: Old Emerging Forces
Pemred	: Pemimpin Redaksi
Pepelrada	: Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah
Peperda	: Penguasa Perang Daerah
Peperti	: Penguasa Perang Tertinggi
SH	: Harian Umum Sinar Harapan
SULINDO	: Harian Umum Suluh Indonesia
SIT	: Surat Ijin Terbit
SOB	: Staat
USIS	: United State Information Services

KRONOLOGI KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA

PEMBENTUKAN FEDERASI MALAYSIA DAN KONFRONTASI POLITIK

1. 27 MEI 1961 : PM Tengku Abdulrachman melontarkan pertama kali gagasan Federasi Malaysia.
2. Oktober 1961 : PM Abdulrachman berkonsultasi dengan PM McMillan di London mengenai pelaksanaan rencana pembentukan Federasi Malaysia.
3. Juli 1962 : PM Abdulrachman dan PM McMillan sepakat untuk membentuk Federasi Malaysia tanggal 31 Agustus 1963 berdasarkan rekomendasi komisi Cobbold.
4. 8 Desember 1962 : Proklamasi Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Konfrontasi Politik dimulai.
5. 31 Mei-1 Juni 1963 : Presiden Soekarno dan PM Abdulrachman mengadakan perundingan pertama kali di Tokyo, Jepang.
6. 7 Juni - 11 Juli 1963 : Pertemuan Menlu Tun Abdul Razak dari Malaya, Menlu Subandrio dari Indonesia, dan Wakil Presiden/Menlu Palaez dari Filipina, di Manila.
7. 30 Juli - 5 Agustus 1963 : KTT di Manila antara PM Abdulrachman, Presiden Soekarno, dan Presiden Macapagal yang menghasilkan Deklarasi Manila.
8. 29 Agustus 1963 : PM Abdulrachman mengumumkan penundaan pembentukan Federasi dari tanggal 31 Agustus menjadi tanggal 16 September 1963, onfrontasi" Ganyang Malaysia" secara formal dimulai berupa konfrontasi ekonomi dan militer.

KONFRONTASI EKONOMI

1. 16 September 1963 : Demonstrasi rakyat terhadap Kedutaan Besar Malaya dan Inggris di Jakarta sebagai reaksi terhadap pembentukan Federasi Malaysia.
2. 17 September 1963 : Kontrademonstrasi terjadi di Kuala Lumpur yang merusakkan gedung dan lambang Bhineka Tunggal Ika. Pada hari yang sama Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
3. 18 September 1963 : Demonstrasi besar-besaran di Kedubes Inggris di Jakarta serta merusakkan harta milik warga Inggris, termasuk mengambilalih perusahaan Inggris.
4. 21 September 1963 : Indonesia memutuskan hubungan dagang dengan Malaysia, melakukan dedolarisasi di Kepulauan Riau melalui Surat Perintah No. 1/ KOTOE/1963.

KONFRONTASI MILITER

1. 4 dan 22 Januari 1963 : 2 kali pelanggaran wilayah Indonesia oleh pesawat terbang Inggris.
2. 28 Januari 1963 : pelanggaran pertama terhadap perbatasan RI melalui daratan oleh pasukan Inggris.
3. 19 Maret 1963 : 2 kali pelanggaran wilayah udara oleh pesawat Inggris.
4. 27 Maret 1963 : pelanggaran perbatasan darat oleh pasukan Inggris dan Gurkha ke wilayah RI.

5. 12 April 1963 : pasukan gerilyawan Indonesia menyerang sebuah pos militer Inggris.
6. 23 April 1963 : pasukan gerilyawan Indonesia menyerang lebih hebat ke pos militer pihak lawan.
7. 19 Juli 1963 : pembentukan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) melalui Keppres No. 148 Tahun 1963.
8. 22 September 1963 : Front Nasional melancarkan Program Aksi untuk mengganyang Malaysia.
9. 27 September 1963 : pasukan PGT diterbangkan ke perbatasan Serawak. Pertempuran di kampung Long Javi.
10. 1 Oktober 1963 : Sabah mulai diserang.
11. 11 Desember 1963 : Pemerintah RI melakukan "regrouping" Kabinet Kerja, berikut Program Aksinya.
12. 3 Mei 1964 : Pemerintah mencetuskan Dwi Komando Rakyat.
13. 16 Mei 1964 : pembentukan Komando Siaga melalui SK Presiden/Pangti ABRI/KOTI No. 23/KOTI/1964.
14. 10 Juli 1964 : Pertempuran di kampung Sakikilo dan Batugar di wilayah Sabah.
15. 14 September 1964 : Pembentukan Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah melalui SK Presiden/Pangti ABRI/KOTI/ KOTOE Nomor 52/KOTI/1964.
16. 1 Oktober 1964 : Pertempuran antara Satuan Gerilyawan Divisi 4 dengan Pasukan Keamanan Malaysia.
17. 28 Pebruari 1965 : Terjadi bentrokan antara pasukan gerilyawan RI dengan Pasukan Keamanan Malaysia.

- : Penyemurnaan Komando SIAGA menjadi Komando Mandala Siaga (KULAGA)
- 18. 21 Oktober 1965 : KOTI diganti dengan Komando Ganyang Malaysia (KOGAM).
- 19. 11 Agustus 1966 : Tercapainya "Djakarta Accord".
- 20. 22 Agustus 1966 : Kogam dibubarkan.



IKTISAR

YOSEF TOR TULIS. Pandangan dan Sikap Pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia - Malaysia (1962-1965).

Berakhirnya Perang Dunia II membawa dunia kepada bipolarisasi antara kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) dengan kekuatan Komunisme Timur pimpinan Uni Soviet. Pertentangan ini meningkat menjadi Perang Dingin sejak 1947 dengan corak utamanya konfrontasi antara Blok Barat yang kapitalis melawan Blok Timur yang komunis.

Dalam sistem bipolar itu, persekutuan-persekutuan terjadi di sekitar kedua kutub negara adikuasa. Hampir semua negara di dunia membuat orientasi internasional atas dasar konfigurasi-konfigurasi umum kekuatan tersebut. Dalam rangka proses perimbangan kekuatan, kedua blok senantiasa mengeksploitasi benih-benih pertentangan dengan sasaran akhir merebut dan atau memperluas pengaruh terutama di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang.

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu arena pertarungan antar kedua blok karena kawasan ini memiliki potensi ekonomis tinggi serta letaknya yang strategis. Garis politik dan strategi militer AS di Asia Tenggara sejak awal era Perang Dingin bertolak dari asumsi pokok bahwa komunisme adalah suatu gerakan ekspansionis yang didalangi Uni Soviet.

Karena itu, komunisme dilihat sebagai ancaman serius bagi keamanan dan kepentingan-kepentingan Barat berikut negara-negara yang berada di dalam wilayah pengaruhnya. Untuk menangkal gerakan ekspansi komunis itu, AS dan dunia Barat memasukkan Asia Tenggara sebagai bagian penting dalam suatu strategi global dari politik pembendungan komunisme internasional.

Blok Barat mempunyai persepsi ancaman serius terhadap posisi politik pembendungan di kawasan ini. Ancaman dari Utara datang dari komunisme Vietnam Selatan sedangkan dari Selatan datang dari Indonesia yang sejak awal 1960-an mulai dikuasai kaum komunis. Karenanya, pihak Barat mulai mengubah sistem keterlibatannya di kawasan ini dari bentuk fisik dan langsung menjadi tak langsung. Salah satu bentuknya pihak Barat mendorong negara-negara di kawasan ini untuk lebih mandiri dalam menangani masalah-masalah bersama.

Di tengah situasi politik internasional dan ketegangan regional di kawasan Asia Tenggara itulah, muncul gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Ide ini secara resmi dicetuskan Perdana Menteri (PM) Malaya Tengku Abdulrachman pada 26 Mei 1961 di Singapura. Gagasan itu ternyata tak cuma mendapat reaksi keras dari kelima wilayah yang hendak dirangkul, tapi juga dari dunia internasional, termasuk Indonesia dan Filipina.

Indonesia di bawah Presiden Soekarno menentang keras gagasan tersebut karena beberapa alasan. Pertama, Federasi Malaysia dilihat sebagai ancaman secara langsung terhadap wilayah dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia justru karena posisi Indonesia berbatasan langsung dengan bakal Federasi tersebut.

Kedua, Federasi itu dinilai sebagai proyek Neokolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) Inggris dan sekutu-sekutunya dalam Blok Barat yang bakal mengepung dan mengancam Indonesia dari Utara. Apalagi, isu Nekolim itu sangat bertentangan dengan gagasan Bung Karno tentang pembaruan tatanan kawasan internasional. Ketiga, Federasi Malaysia sebagai negara boneka buatan Inggris merupakan suatu dominasi dan eksploitasi terus-menerus atas rakyat daerah bekas jajahan Inggris di Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara.

Secara internal, sikap oposisi Indonesia dilatarbelakangi beberapa faktor. Pertama, pengalaman nyata bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Kedua, sebagai manifestasi dari sikap keras anti Nekolim, suatu kepercayaan terhadap kemampuan kekuatan sendiri, serta ambisi regional Indonesia sebagai pembaharu tatanan dunia baru. Ketiga, unsur oportunisme pemerintahan Soekarno dalam membangkitkan kembali politik luar negeri yang dapat memenuhi kebutuhan politik dalam negeri.

Di atas semua itu, gelora konfrontasi terhadap Malaysia juga sangat dipengaruhi oleh semakin menguatnya dominasi kaum komunis dalam pemerintahan Soekarno sejak 1962. Munculnya anggapan bahwa Malaysia adalah proyek Nekolim yang mengancam keselamatan Indonesia sangat dipengaruhi konsep-konsep pemikiran strategis PKI.

Meski politik konfrontasi Mengganyang Malaysia merupakan politik nasional, kebijaksanaan pemerintahan Soekarno itu tak sepenuhnya mendapat dukungan dari segenap kekuatan dalam negeri. Selain merupakan bagian dari strategi PKI, tak sedikit yang menilai politik konfrontasi itu kurang realistis. Namun karena itu merupakan klaim nasional dalam rangka jargon Revolusi Belum Selesai, maka semua harus mendukung. Pihak yang menentang dianggap kontra-revolusioner dan akan disingkirkan arus revolusi.

Pers sebagai salah satu alat revolusi pun harus mendukung politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintahan Soekarno. Di bawah sistem politik otoriter Demokrasi Terpimpin, tak ada pilihan lain bagi pers kecuali ikut menggelorakan konfrontasi mengganyang Malaysia. Dengan semboyan Politik adalah Panglima, pers Indonesia benar-benar berada dalam posisi lemah sehingga mudah dikendalikan pemerintah. Bahkan citra pers sebagai corong partai politik dan ideologi -- pers nasional ketika itu harus berinduksemangkan partai politik tertentu, setidanya berafiliasi -- praktis hilang sebab pers hanya boleh menyuarakan pernyataan dan kepentingan pemerintah.

Presiden Soekarno yang berada di puncak dan menguasai percaturan politik nasional yang dikenal sebagai Politik Segitiga -- PKI, Soekarno, dan Angkatan Darat -- melakukan pengawasan ketat terhadap pers. Ia bahkan berhasil menguasai pers sedemikian untuk mengeksploitasi falsafah politiknya seperti Nasakom, Dekon, Ganefo, Nefos, dan Oldefos. Pers dijadikan alat efektif untuk mengindoktrinasi masyarakat mengenai Demokrasi Terpimpin dan Manipol, termasuk politik konfrontasi. Surat kabar yang berhaluan lain dan menolak tunduk kepada garis politik Soekarno dianggap musuh revolusi dan karenanya harus disingkirkan demi revolusi yang belum selesai.

Dengan demikian, pers partai sebagai alat perjuangan partai politik atau ideologi

tertentu maupun pers afiliasi dan independen, tinggal stempelnya saja. Pandangan dan sikap pers harus berjalan seiring dengan pandangan dan sikap pemerintah kalau tak ingin diberangus karena dicap kontra-revolusioner.

Dalam konteks politik konfrontasi, pers harus memberikan perhatian mendalam dengan intensitas tinggi untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Pandangan dan sikap pers terhadap isu-isu di balik konfrontasi harus mencerminkan pandangan dan sikap pemerintah, terlepas dari setuju atau tidak, sejalan atau bertentangan dengan visi dan misi politik atau pun ideologi yang dianut setiap surat kabar.

Barangkali yang menjadi pengecualian, sesuai 'tempat dan kekuasaan' yang dimiliki, adalah koran-koran PKI dan sebagian PNI beserta simpatisannya. Mereka praktis lebih berani bersuara, terutama terhadap lawan-lawan mereka di luar pemerintah. Harian Rakyat yang menjadi corong PKI tampak paling berani justru karena dominasi pengaruh PKI dalam pemerintahan Soekarno era 1960-an. Harian Suluh Indonesia (Sulindo) juga garang, selain karena kian menguatnya pengaruh PNI dalam percaturan politik nasional juga cerminan persetujuan antara PKI dan Harian Rakyat-nya dengan PNI dan Sulindo-nya.

Tapi, pers nasional umumnya memberikan pandangan dan sikap terhadap isu tertentu dengan mengacu persis atau sedekat mungkin kepada pandangan dan sikap pemerintah, terutama Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio, serta pemimpin partai politik yang menjadi induk semang.

Harian Rakyat paling banyak mengutip dan menganalisis secara mendalam dan kritis terhadap pernyataan Ketua PKI D.N. Aidit dan Presiden Soekarno. Sulindo tak jarang mengutip pernyataan Ketua PNI Ali Sastroamidjojo. Harian Merdeka mengacu kepada BM Diah dan Harian Angkatan Bersenjata terhadap KASAB Jenderal Nasution.

Berbeda dengan ketiga surat kabar tersebut di atas, Harian Duta Masyarakat, Sinar Harapan, dan Kompas tidak pernah memberikan pandangan dan sikap terhadap isu tertentu berdasarkan pandangan dan sikap, bahkan mengutip sekalipun, pimpinan NU, Parkindo, dan Partai Katolik. Selain mencerminkan posisi mereka yang hanya berafiliasi, ketiga surat kabar yang bernafaskan agama tersebut umumnya mengutip dan memberikan komentar secara terbatas terhadap pernyataan dan sikap pemerintah dan sangat berhati-hati dalam memberikan pandangan dan sikap. Bahkan Harian Kompas, di samping 'sangat kabur' keterikatannya dengan Partai Katolik, visi dan sikapnya terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia sangat sulit dibaca. Bisa jadi, posisi itu ditempuh agar dapat survive di bawah ancaman kekuasaan, apalagi ia baru terbit pada Juni 1965.

Selain kesamaan, terdapat pula perbedaan karakteristik masing-masing surat kabar. Harian Rakyat secara ideologis berhaluan komunis (PKI) sehingga tak mengherankan bila musuh utama yang dikejanya adalah Amerika Serikat, Inggris, dan kawan-kawan. AS yang merupakan pimpinan Blok Barat yang berhaluan liberal kapitalis bahkan dianggap sebagai musuh nomor satu RI.

Harian Rakyat juga memandang Proyek Malaysia sebagai benteng terakhir Nekolim di Asia Tenggara. Teori domino Komunisme kian terbukti setelah Cina,

Korea Utara, dan Vietnam secara beruntun jatuh ke dalam cengkaman komunisme. Maka, satu-satunya yang tersisa dan ingin dipertahankan sekuat tenaga adalah Inggris di Asia Tenggara. Karenanya, *Harian Rakyat* menyerang Inggris -- selain AS dan lembaga-lembaga kerjasama regional dan internasional yang berbau Barat seperti ANZUZ, NATO, IOC, dan PBB -- habis-habisan apalagi ketika AS secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Malaysia.

Harian Suluh Indonesia (Sulindo) yang menjadi milik dan trompet PNI juga tak kalah revolusioner progresif berdasarkan optik nasionalisme, meski kalah radikal dibandingkan *Harian Rakyat*. Pandangan dan sikap berani Sulindo tak lepas dari sosok peran PNI yang makin kuat dalam percaturan politik nasional. Meski PNI dengan terompet Sulindo-nya menjadi wadah kaum nasionalis radikal yang memiliki kekuatan, tapi masih kalah dari PKI dan *Harian Rakyat*-nya yang telah mendapatkan pengaruh kuat dalam pemerintahan.

Dalam perspektif itu, dapat dipahami mengapa Sulindo tak terang-terangan menuding Inggris dan AS sebagai musuh nomor satu, tapi Kolim dan Nekolim. Sulindo menyoroti secara seimbang peran yang dimainkan PM Malaysia Abdulrachman dan Inggris di balik Proyek Federasi Malaysia.

Posisi *Harian Merdeka* dalam dunia pers Indonesia masa itu cukup unik. Di satu sisi, ia merupakan surat kabar kaum nasionalis. Di sisi lain, sebagai surat kabar pimpinan B.M.Diah, *Harian Merdeka* selalu mendapat 'restu' dari Presiden Soekarno. Menurut tokoh partai Katolik Dr.B.P.Paulus, SH dan Wakil Pemimpin Redaksi Sinar Harapan Soebagyo-Pr, BM Diah memang pengagum Bung Karno dan menjadi Duta Besar RI untuk Inggris pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Posisi khas seperti itu melandasi pandangan dan sikap kritis dan berani *Merdeka* terhadap berbagai isu nasional, bahkan sampai harus terlibat dalam polemik panjang. Sesuai jati dirinya sebagai surat kabar perjuangan yang lahir pada 1945, *Merdeka* lebih banyak membangun pandangannya berdasarkan logika sejarah dengan nasionalisme sebagai optik utama.

Dominasi *Harian Rakyat* dan Sulindo pada Masa Demokrasi Terpimpin samasekali tak mengurangi semangat nasionalisme dan keberaniannya untuk menyerang secara kritis-rasional setiap pandangan atau sikap yang dianggapnya salah atau merugikan kepentingan bangsa dan negara. *Harian* ini tak gentar terlibat polemik panjang dengan *Harian Rakyat* dan selalu lolos dari krisis yang mengancam.

Harian Angkatan Bersenjata (AB) yang didirikan pada Maret 1965 termasuk surat kabar yang berani menyatakan pandangan dan sikap terhadap berbagai isu nasional. Meski usianya relatif muda ketika konfrontasi dengan Malaysia semakin hebat, AB langsung tampil meyakinkan dengan pandangan-pandangannya yang tajam dan gayanya yang lugas. Selain mencerminkan karakter militer, sosok penampilan *Angkatan Bersenjata* (AB) menunjukkan eksistensi ABRI dalam percaturan Politik Segitiga.

Sebagai pembawa suara ABRI di tengah meningkatnya konfrontasi militer, AB selalu memusatkan perhatiannya kepada kegiatan-kegiatan militer. Sementara pandangan dan sikapnya selalu mencerminkan visi maupun misi ABRI, di samping tentu visi dan misi politik pemerintah.

Tiga surat kabar lain semuanya bernafaskan agama, yakni Duta Masyarakat (NU-

Islam Konservatif), Sinar Harapan, dan Kompas yang masing-masing berafiliasi kepada Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Dalam beberapa hal, ketiga surat kabar ini memiliki persamaan dalam menyoroiti masalah konfrontasi.

Pertama, secara kuantitatif perhatian mereka jauh di bawah Harian Rakyat, Sulindo, dan Merdeka. Namun secara kualitatif, pandangan dan sikap mereka cukup luas dan dalam. Kedua, gaya penyajian ketiga harian ini tidak sekeras dan seekstrim harian lain. Namun dibandingkan Sinar Hrapan dan Kompas, Duta Masyarakat masih lebih berani dan intens. Hal ini sejalan dengan sosok NU yang memiliki basis yang luas dan pengaruh yang kuat.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pergolakan yang terjadi dalam percaturan politik internasional Pasca Perang Dunia II atau yang lebih dikenal sebagai era Perang Dingin didominasi oleh pertentangan-pertentangan kepentingan antara blok kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dengan blok komunis yang dikomandoi Uni Soviet. Kedua blok senantiasa mengeksploitasi benih-benih pertentangan dalam kerangka kepentingan ideologis-politis maupun kepentingan ekonomis.

Era perang dingin juga ditandai dengan runtuhnya fasisme dan kolonialisme, serta bangkitnya nasionalisme bangsa-bangsa Asia-Afrika di sisi lain. Bersamaan dengan itu muncul pertentangan Utara-Selatan, antara minoritas negara-negara industri maju yang kaya dan mapan di Utara melawan mayoritas negara-negara agraris yang miskin, lemah, dan terbelakang di Selatan. ⁽¹⁾

Di tengah situasi internasional yang demikian, muncul perasaan saling curiga antara negara penjajah dan yang dijajah, antara negara-negara kecil yang ingin merebut atau mempertahankan kemerdekaannya dengan negara-negara besar yang ingin menguasai negara-negara kecil. Sementara di berbagai kawasan dunia terjadi berbagai konflik regional yang sengaja ditimbulkan, secara langsung ataupun tidak, oleh kedua negara raksasa yang berseteru. Di samping bertujuan merebut atau memperluas pengaruh, terutama di negara-negara berkembang, berbagai konflik regional itu dimanfaatkan kedua negara adikuasa untuk kepentingan strategis dan taktis sambil memperkuat kedudukan sendiri dan memperlemah posisi pihak lawan.

Dengan kerangka pemikiran global di atas, menjadi jelaslah latar belakang

(1) Roeslan Abdulgani. "Pertarungan Politik Ideologi Negara-Negara Adikuasa". *Ilmu dan Budaya*. No. 5 (Jakarta: 1985). hlm. 322.

timbulnya konflik regional di Asia Tenggara, menyusul dicetuskannya gagasan pembentukan Federasi Malaysia pada 27 Mei 1961 oleh PM Tengku Abdulrachman. Federasi tersebut direncanakan terdiri atas Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah, sedangkan Brunei ditawarkan tahun 1962.

Pada mulanya, gagasan yang diprakarsai oleh Malaya dan Inggris itu belum mendapat reaksi dari Indonesia. Tetapi setelah mengetahui bahwa Inggris, AS, dan kawan-kawan berdiri di belakang Federasi, ditambah lagi dengan meletusnya pemberontakan di Kalimantan Utara, pihak Indonesia segera memberikan reaksi keras. Bahkan setelah proyek Malaysia itu tetap dipaksakan, Indonesia melancarkan politik konfrontasi terhadap apa yang dilihatnya sebagai proyek Nekolim (Neo-Kolonialisme).

Berawal dengan konfrontasi politik, pertentangan terus meningkat dan Indonesia kemudian melancarkan konfrontasi di bidang ekonomi dan militer. Dalam rangka itu, semua potensi dan kekuatan revolusioner dalam negeri dimobilisasi dari yang sebelumnya ditujukan pada sengketa Irian Barat segera dialihfungsikan dan dikonsentrasikan untuk mengganyang Malaysia.

Salah satu alat dan kekuatan revolusioner yang penting adalah pers. Dalam masa revolusi di bawah sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dunia pers tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi dan alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Dalam konteks politik konfrontasi, pers Indonesia juga diarahkan untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat dalam rangka perjuangan **Ganyang Malaysia**.

1.2 Pokok Masalah

Masalah utama yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia - Malaysia (1962-1965). Jika dirinci lagi, ada tiga masalah yang dikemukakan.

Pertama, bagaimana peta kekuatan dan dinamika kehidupan politik dalam negeri di bawah sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965). **Kedua**, bagaimana pertentangan dan tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan politik itu tercermin dalam dinamika kehidupan "Pers Terpimpin." **Ketiga**, bagaimana pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap berbagai isu di balik Konfrontasi Indonesia - Malaysia serta bagaimana sikap atau pandangan tersebut dimanifestasikan dan dinyatakan. Lebih jauh akan ditelusuri motif atau ideologi yang melatarbelakangi sikap dan pandangan masing-masing surat kabar yang diteliti. Dari sana ditarik kesimpulan berupa karakterisasi dan generalisasi-generalisasi.

Kurun waktu yang diliput mulai 1962 sampai 1965 yang dibagi dalam dua periode, yaitu periode konfrontasi politik (1962-1963) dan konfrontasi ekonomi dan militer (1963-1965). Konfrontasi politik dimulai sejak pertengahan 1962 ketika muncul dugaan kuat pihak Indonesia bahwa Federasi Malaysia sebenarnya proyek Nekolim yang dirancang oleh Inggris dengan memeralat PM Abdulrachman. Konfrontasi politik mengendur pada pertengahan 1963, tetapi bersamaan dengan itu dimulailah konfrontasi ekonomi dan militer.

Konfrontasi fisik berupa konfrontasi ekonomi dan militer berawal ketika pembentukan Federasi Malaysia tetap dipaksakan justru pada saat upaya penyelesaian damai secara diplomatik sedang dilakukan. Federasi tetap dibentuk pada tanggal 16 September 1963 dan pihak Indonesia menanggapi dengan melancarkan konfrontasi ekonomi dan militer. Perlu ditekankan di sini bahwa walaupun kurun waktu 1963-1965 merupakan konfrontasi ekonomi dan militer, konfrontasi politik tetap berlangsung. Periodisasi penelitian dibatasi hanya sampai 1965, tepatnya ketika PKI melancarkan kudeta yang gagal pada 30 September 1965.

Pembatasan itu didasarkan pada pemikiran bahwa sejak 1 Oktober 1965 telah terjadi beberapa perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan politik di Indonesia. Situasi internal tersebut membawa implikasi tertentu terhadap politik konfrontasi.

Di sisi lain, Federasi Malaysia mulai goyah dan pecah dari dalam.

1.3 Kerangka Analisis Teoritik

Kerangka analisis teoritik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi landasan teori, operasionalisasi dan hubungan antar-konsep, serta hipotesa dan dalil. Ini mutlak dilakukan mengingat skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian mendalam, obyektif-rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi substansi permasalahan maupun analisis teoritis.

1.3.1 Landasan Teori

Secara teoritik terdapat kaitan antara pers dan politik. Pembahasan mengenai keterkaitan itu umumnya dilakukan melalui dua pendekatan. **Pertama**, pers dipandang sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan politik. **Kedua**, pers memiliki ketergantungan terhadap politik.

Menurut Merrill⁽²⁾, eksistensi dan kehidupan pers di suatu negara merupakan pencerminan dari sistem politik negara tersebut. Disebutkan bahwa fungsi dan sifat pers setiap negara berbeda, tergantung pada sistem politik dan struktur sosial tempat pers itu hidup. Lebih jauh, Denis McQuail⁽³⁾ melihat ketergantungan pers terhadap politik terutama karena dunia pers seringkali berada pada posisi lemah sehingga dengan mudah ditundukkan oleh penguasa.

Dalam membangun kerangka analisis teoritik untuk penelitian ini, penulis berlandaskan pada teori Denis McQuail mengenai pers partai dan teori Otoritarian yang diberikan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm⁽⁴⁾ tentang tipologi sistem pers. Menurut McQuail, pengaruh politik terhadap kehidupan pers bisa terlihat pada citra pers berdasarkan kepentingan yang dilayani. Pers yang melayani kepentingan politik

(2) Dikutip dari karya Prof. Dr. Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila* (Jakarta: 1992), hlm. 19.

(3) Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, terj. Agus Dharma, SH dan Drs. Aminuddin (Jakarta: 1989), hlm. 10.

(4) *Komunikator, Pesan, dan Media* terj. Tjun Surjaman (Bandung: 1989), hlm. 290.

disebut pers politik yang dipergunakan sebagai media politik atau alat perjuangan politik kelompok tertentu. Surat kabar politik juga dapat diwarnai ideologi atau aliran politik tertentu.⁽⁵⁾ Dalam hal ini, ideologi merupakan dasar dalam penyusunan kebijaksanaan redaksi yang lebih dikenal sehari-hari sebagai "politik surat kabar".⁽⁶⁾

Selain itu, menurut McQuail, pengaruh politik terhadap kehidupan pers juga tampak pada dimensi hubungan antara pers dengan partai politik. Dalam sejarah politik pers, hubungan ini telah melahirkan pers partai, pers mandiri atau independen, dan pers afiliasi. Pers partai adalah surat kabar yang didirikan dan dimiliki oleh partai politik untuk kepentingan partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, pers partai memiliki politik dan ideologi yang sama dengan partai politik.

Surat kabar digunakan oleh partai politik sebagai alat yang efektif untuk mendapatkan dukungan massa yang seluas-luasnya. Sebab, tujuan partai politik adalah merebut kedudukan dan kekuasaan politik untuk melaksanakan berbagai kebijaksanaannya. Surat kabar partai semacam ini tentu saja memperoleh modal dan subsidi dana dari partai atau orang-orang tertentu yang aktif dalam partai yang menguasai koran itu. Sejarah mencatat, di Indonesia, surat kabar partai yang menonjol antara lain *Harian Rakyat* (PKI), *Suluh Indonesia* (PNI), *Bintang Timur* (Partindo), dan *Duta Masyarakat* (NU). Dalam kajian Edward Smith mengenai pembredelan pers di Indonesia (1950-1965) tampak bahwa banyak suratkabar yang mati karena faktor ideologi dan politik seperti *Harian Abadi* dan *Pedoman*.

Berbeda dengan pers partai, pers afiliasi merupakan pers simpatisan partai atau ideologi tertentu atau *party-directed press* yang mendukung secara bebas suatu cita-cita politik atau ideologi tertentu. Surat kabar semacam ini di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, misalnya, *Harian Sinar Harapan* dan *Kompas* yang masing-masing berafiliasi pada Parkindo dan Partai Katolik.

(5). McQuail, *op.cit.*, hlm. 11.

(6). Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia* (Jakarta: 1987), hlm. 6.

Sementara pers mandiri atau independen adalah surat kabar yang berdiri sendiri sebagai lembaga dan secara organisatoris tidak terkait, baik dengan partai politik maupun dengan pemerintah. Surat kabar semacam ini dapat menentukan sendiri politik dan ideologinya tanpa ada keterkaitan formal dengan partai politik tertentu. Harian *Merdeka* pimpinan BM Diah merupakan contoh nyata surat kabar semacam ini di Indonesia.

Pengaruh politik terhadap kehidupan pers dapat terlihat jelas pada dimensi hubungan pers dengan pemerintah. Pemerintah senantiasa mengatur hubungannya dengan pers melalui peraturan atau Undang-undang. Tipologi atau model hubungan antara pers dengan pemerintah digambarkan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam empat teori pokok pers, yaitu teori Otoritarian, Libertarian, Tanggungjawab Sosial, dan teori Soviet Komunis. McQuail kemudian menambahkan dua teori lagi, yaitu teori Media Pembangunan dan teori Media Demokratik Partisipan.⁽⁷⁾

Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam periode 1959-1965, Indonesia berada di bawah sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem politik ini melahirkan sistem Pers Terpimpin yang bertumpu pada falsafah politik otoriter. Berdasarkan hal itu, kerangka analisis penulis mengacu pada teori Otoritarian.

Dalam teori Otoritarian, pers diletakkan sebagai pelayan negara yang bertanggungjawab kepada negara. Dalam hal ini, pers digunakan oleh penguasa selain untuk menyampaikan informasi kepada rakyat tentang berbagai kebijaksanaannya, pers juga harus mendukung kebijaksanaan itu. Implikasinya, pers hanya dapat diterbitkan oleh lembaga swasta jika memperoleh izin dari penguasa dan sesewaktu dapat dicabut kembali bila dipandang perlu.

Menurut teori Otoritarian, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap pers melalui surat izin terbit (SIT), sensor, dan pemberangusan. Kajian empirik yang dilakukan Smith tentang pembreidelan pers di Indonesia membuktikan bahwa

(7). Fred. Siebert, dkk. *Empat Tori Pers*, terj. Drs. Putu Laxman (Jakarta: 1986).

eksistensi dan kehidupan pers di negeri ini sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuasaan pemerintah.

Untuk memberi wawasan dan interpretasi mengenai perbedaan latar belakang sikap dan pandangan pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia, penulis akan menelusuri pertentangan ideologi atau sistem gagasan antar-partai politik di bawah sistem politik Demokrasi Terpimpin. Pembahasan mengenai perbedaan basis ideologi atau orientasi dasar partai sangat penting dilakukan karena tujuan dan program partai ditentukan oleh basis ideologi. Perbedaan-perbedaan yang ada akan menentukan karakteristik dan jarak politik masing-masing partai yang pada gilirannya tercermin pula pada visi dan misi pers partai.

Pembahasan mengenai perbedaan basis ideologi partai dalam penelitian ini mengikuti kajian pemikiran politik yang dilakukan oleh Herbert Feith dan Lance Castles⁽⁸⁾ (1945-1966). Menurut Feith, pertentangan yang terjadi di Indonesia tidak lain merupakan pertentangan ideologi atau sistem gagasan yang disebutnya sebagai aliran pemikiran politik. Nasionalisme dan anticolonialisme kembali menggemakan pada masa revolusi yang meletus tanggal 17 Agustus 1945. Bersamaan dengan itu, kekuatan primordial ikut bangkit dan bergolak atas nama nasionalisme. Kebangkitan kekuatan primordial itu menimbulkan persaingan antara berbagai aliran politik, bahkan menjadi salah satu faktor yang mendinamisasikan gelora revolusi.⁽⁹⁾

Feith melihat ada lima aliran pemikiran politik Indonesia selama kurun waktu 1945-1965, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Radikal, Islam, Sosialisme Demokrat, dan Komunisme. Inti pandangan Feith dan Castles adalah pemikiran politik di Indonesia bersumber pada "tradisi" dan "aliran pemikiran Barat". Kedua sumber utama itulah yang membuahkan lima aliran politik dalam dinamika percaturan politik nasional.

(8) Herbert Feith, "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 Suatu Pengantar," *Partisipasi dan Partai Politik*, ed. Miriam Budiardjo (Jakarta: 1981), hlm. 201-228.

(9) Onghokham, "Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas", *Prisma No. 8 (1985)*, hlm. 3-11.

Pertama, Sosialisme Demokrat yang mengambil bentuk dalam partai-partai sosialis seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI). Aliran ini memiliki gagasan modern yang diambil dari Barat, namun kurang berhasil menghimpun kekuatan massa sebagai basis politik. Meski demikian aliran ini sangat berpengaruh terhadap beberapa partai, termasuk partai besar seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Masyumi.

Kedua, Komunisme dengan PKI sebagai wadah utamanya. Konsep-konsepnya secara langsung atau tidak diambil dari Barat, walaupun dalam kenyataan menjalin kerja sama dengan kaum abangan tradisional, simpatisan, atau aliran yang sejalan.

Ketiga, Islam dikelompokkan atas Masyumi dan Nahdatul Ulama (NU). Masyumi adalah partai politik yang dipimpin oleh kaum reformis, sedangkan NU sebagai wadah bagi Islam konservatif.

Keempat, Nasionalisme radikal yang berpusat pada PNI. Aliran ini menjangkau sekaligus Tradisionalisme Jawa, Komunisme, dan Sosialisme Demokrat.

Kelima, Tradisionalisme Jawa yang terdiri dari para penganut tradisi Jawa. Ironisnya, aliran ini tidak pernah menyatakan diri dalam bentuk partai politik yang konkret, padahal pengaruhnya luas menjangkau Komunisme, Nasionalisme, Sosialisme Demokrat, dan Islam. (Pola kelima aliran pemikiran politik itu lihat bagan pada **lampiran 1**).

Di sisi lain, Feith sendiri tampaknya menemui kesulitan dalam mengklasifikasikan dan menempatkan kekuatan-kekuatan politik lain ke dalam bagan yang dibuatnya. Walaupun demikian, Feith mencoba mengelompokkan Presiden Soekarno ke dalam lingkaran Nasionalisme Radikal, PSI berupa segiempat kecil dalam lingkaran Sosialisme Demokrat, sedangkan beberapa kelompok etnis dan daerah ditematkannya di beberapa tempat yang berbeda.

Feith juga sulit menemukan tempat yang jelas bagi Partai Murba, Parkindo, Partai Katolik, ataupun beberapa tokoh penting seperti Hatta dan Nasution. ABRI, terutama TNI-AD, bahkan lebih pelik lagi karena seluruh orientasi ideologi terwakili

di dalamnya, sementara tindakannya lebih sebagai suatu kesatuan politik tunggal yang justru dapat meredakan konflik ideologi internal. Walaupun TNI-AD cenderung mengembangkan watak ideologinya sendiri, Feith tidak melihat adanya sistem pemikiran khas Angkatan Darat sehingga tidak mengklasifikasikannya sebagai aliran politik keenam.

Kedudukan ABRI dan Presiden Soekarno memang sangat khas dalam percaturan politik periode Demokrasi Terpimpin. ABRI merupakan salah satu titik utama politik segitiga bersama Presiden Soekarno dan PKI. Pada sisi lain, ABRI antikomunis dan kurang senang terhadap Nasionalisme Radikal dan Sosialisme Demokrat maupun Islam Fundamentalisme.⁽¹⁰⁾ Kalau ABRI adalah penganut kuat ideologi Pancasila, Soekarno dikenal sebagai perumus ideologi Pancasila. Namun pemikiran politik Soekarno tetap menghendaki kehadiran komunis yang terintegrasi dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).⁽¹¹⁾

Kerangka analisis teoritik di atas merupakan alat bantu dalam menganalisis data-data maupun faktor-faktor yang diasumsikan ikut melatarbelakangi pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Faktor-faktor yang dimaksud mencakup situasi dan kondisi politik dalam negeri, perkembangan situasi politik internasional, sistem pers, serta karakteristik masing-masing surat kabar yang diteliti.

1.3.2 Hipotesa dan Dalil

Setiap penelitian ilmiah pada prinsipnya mensyaratkan adanya hipotesa yang diperlukan untuk melihat pola hubungan antar-variabel yang digunakan dalam riset. Dalam penelitian ini, hipotesa penulis adalah bahwa *pers Indonesia mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia.*

(10) Rosihan Anwar, *Menulis Dalam Air* (Jakarta: 1981).

(11) Dr. Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: 1978), hlm. 123.

Hipotesa ini didasarkan pada dalil bahwa pers Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pers partai yang lebih dikenal sebagai corong atau terompet partai politik dan organisasi masyarakat (ormas).

Berdasarkan asumsi bahwa parpol dan ormas memiliki landasan dan orientasi ideologis-politis berbeda bahkan saling bertentangan di satu pihak, sementara Konfrontasi Indonesia-Malaysia lebih merupakan konflik ideologis daripada konflik kepentingan⁽¹²⁾, maka penulis berasumsi bahwa sikap pers Indonesia terhadap konfrontasi lebih mencerminkan realita politik domestik Indonesia dalam periode itu. Dengan kata lain, pers Indonesia yang membawa kepentingan dan atau mencerminkan ideologi serta aliran politik tertentu memiliki pandangan dan sikap berbeda terhadap konfrontasi.

Dari perspektif itu, walaupun konfrontasi merupakan politik nasional namun penulis berasumsi bahwa bagaimanapun warna dan visi masing-masing surat kabar tetap ada secara implisit atau tersirat kendatipun kecil dan tersamar. Di sisi lain, dominasi PKI dalam perancangan politik nasional, termasuk politik konfrontasi, tentu saja mendapat tantangan dari lawan-lawannya, walaupun tidak pernah secara terbuka. Konflik ideologis itu bagaimanapun tergambar pula di media massa sebagai corong dinamis yang efektif.

1.3.3 Operasionalisasi Konsep

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan agar tidak menimbulkan Keambiguan. **Pertama**, istilah **pandangan** dan **sikap**. Istilah pandangan atau persepsi (*perception*, Inggris) di sini diartikan sebagai daya memahami atau menanggapi terhadap sesuatu. Sedangkan pengertian sikap dalam penelitian ini mengacu pada batasan yang diberikan dua ilmuwan psikologi sosial yaitu Theodore Newcomb dan Wirawan S. Sarwono. Newcomb menyatakan

(12) Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri. Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia* (Jakarta: 1991).

sikap adalah pernyataan kesediaan untuk dimotivasi.⁽¹³⁾ Batasan yang lebih rinci dan konkret dikemukakan Wirawan Sarwono. Menurut Sarwono, sikap adalah kesediaan untuk bereaksi secara positif (*favorably*, Inggris) atau secara negatif (*unfavorably*, Inggris) terhadap obyek tertentu.⁽¹⁴⁾ Jadi, secara kategorial, sikap dapat dibedakan atas pro dan kontra serta netral.

Dalam penelitian ini, suatu sikap dikatakan pro atau setuju jika visi atau pandangan sebuah surat kabar menunjukkan konotasi positif yaitu baik dan mendukung. Sebaliknya, sikap kontra ditunjukkan dengan visi atau pandangan yang berkonotasi negatif yaitu menolak, tidak atau kurang setuju, serta memojokkan. Sedangkan sikap dianggap netral jika visi atau pandangan surat kabar berkonotasi tidak memihak atau tidak menunjukkan kesan positif maupun negatif.

Kedua, istilah pers. Pers menurut batasan Guru Besar Ilmu Pers Universitas Indiana Prof. Dr. Floyd, adalah media komunikasi yang melayani kebutuhan akan pemberitaan dan pendapat yang terbaik serta dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu lingkungan masyarakat dan bangsa yang dilayaninya.⁽¹⁵⁾ Dengan demikian istilah pers mencakup semua jenis media massa, baik cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

Untuk kebutuhan penelitian ini, pengertian pers dibatasi pada jenis surat kabar. Di sini pengertian surat kabar sejajar atau identik dengan istilah. Demikian juga dengan istilah pers disejajarkan dengan pengertian media massa. Penjelasan ini dirasa perlu untuk menghindari kerancuan tafsir terhadap makna istilah-istilah itu yang akan digunakan penulis.

Akhirnya, menyangkut terminologi politik Konfrontasi. Menurut Hidayat Mukmin, konfrontasi adalah suatu bentuk sengketa atau konflik antara dua negara atau lebih yang menggunakan segala cara kecuali perang terbuka.⁽¹⁶⁾ Poerwadarminta,

(13) Theodore Newcomb. *Social Psychology* (New York: 1980), hlm. 117.

(14) Wirawan S. Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: 1987), hlm. 176.

(15) Prof. Dr. Floyd G. Arpan. *Wartawan Pembina Masyarakat*, ed. Drs. S. Rochady (Bandung: 1970), hlm. 18.

(16) Hidayat Mukmin, *op.cit.* hlm. 102.

dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, mengartikan konfrontasi (Inggris: *confrontation*) sebagai saling berhadapan antara dua negara atau dua kekuatan politik dunia yang saling bertentangan.⁽¹⁷⁾ Dalam pengertian sebagai situasi, Mitchell menjelaskan konfrontasi sebagai *any situation in which two or more social entities or parties perceived that they possess mutually incompatible goals.*⁽¹⁸⁾

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pengertian Konfrontasi Indonesia-Malaysia mencakup dua dimensi, yaitu dimensi situasional dan dimensi fisik. Dimensi situasional menunjuk pada ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia akibat "perang kata-kata" atau yang dikenal sebagai **konfrontasi politik**. Sedangkan dimensi fisik menunjuk pada "bentrok fisik", tahapan baru yang lebih keras dan nyata sebagai tindak lanjut dari konfrontasi politik. Dimensi fisik ini mengambil bentuk berupa **konfrontasi di bidang ekonomi** dan **militer** dengan diplomasi (politik) sebagai faktor pendukung.

1.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan serta kerangka analisis teoritik yang diuraikan di atas, maka ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. **Pertama**, menunjukkan perbedaan kecenderungan pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia. **Kedua**, mengungkapkan dan mengidentifikasi perbedaan latar belakang dan motivasi pandangan serta sikap pers Indonesia dalam menyoroti konfrontasi. **Ketiga**, menunjukkan sifat dan bentuk korelasi serta mekanisme interaksi antara dunia politik dan dunia pers di bawah sistem politik Demokrasi Terpimpin (1962-1965).

Berkaitan dengan tujuan ketiga, penulis ingin memaparkan secara lebih

(17). Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: 1976).

(18) CR. Mitchell, *The Structure of International Conflict* (London: 1981), hlm. 17.

terperinci bagaimana pers Indonesia mengimplementasikan idealismenya sesuai dengan fungsi dan peranan idealnya. Pada satu sisi, ia harus berjuang agar tetap survival di bawah tekanan rezim yang berkuasa, di sisi lain ia harus menyuarakan kepentingan atau misi partai atau ormas yang diembannya.

Studi atau penelitian mendalam mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia sudah cukup banyak dilakukan terutama oleh ilmuwan mancanegara. Perspektif yang digunakan pun beranekaragam. Di antaranya yang terpenting ialah yang ditulis oleh Arnold Brackman (1966), Franklin Weinstein (1969), Peter Polomka (1969), J.A.C. Mackie (1974), dan yang terakhir karya ilmuwan Indonesia, Hidayat Mukmin (1991). Namun sejauh pengetahuan penulis belum ada yang secara khusus dan mendalam menyoroti Konfrontasi Indonesia-Malaysia melalui telaah pers Indonesia.

Dengan demikian, dari sudut pandang keilmuan, hasil penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dan sumber kajian untuk studi lanjutan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan telaah isi media massa serta sejarah pers Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Walaupun baru merupakan karya awal, hasil penelitian ini juga kiranya dapat memberi dan memperkaya interpretasi yang berwawasan untuk memperjelas dan memperdalam pemikiran tentang Konfrontasi Indonesia-Malaysia melalui penelaahan isi surat kabar Indonesia.

Dari segi manfaat praktis, penelitian ini berguna terutama bagi kaum praktisi, pemilik, dan wartawan persuratkabaran atau media massa pada umumnya. Bahwasannya konsep pers bebas dan bertanggung jawab sebagai terminologi politik pada hakekatnya mengisyaratkan bahwa pers—di tengah perjuangan mewujudkan fungsi dan peran idealnya—harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan: pemerintah, pemilik modal, dan partai atau ormas, jika ingin tetap survival. Banyak penulis Tajuk Rencana dan pemimpin redaksi media massa tahun 1960-an mengikuti filsafat "Bertindaklah lunak dan bekerjalah tetap. Kalau perlu kompromi. Tetapi bekerja tanpa rencana yang sudah digariskan masih *mendingan* daripada menyerahkan

leher kepada pemenggal untuk dipenggal."⁽¹⁹⁾ Sebuah falsafah yang masih dan selalu relevan untuk dijadikan pegangan bagi setiap penulis Tajuk Rencana dewasa ini.

1.5 Metodologi

1.5.1 Metode dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Analisis Isi** atau *Content Analysis* karena obyek yang diteliti menyangkut telaah isi surat kabar sebagai gejala simbolik. Menurut Klaus Krippendorff,⁽²⁰⁾ analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*, Inggris) dan sah data dengan memperhatikan konteks yang mengitarinya. Itu berarti analisis isi melihat data bukan sebagai kumpulan peristiwa belaka, tetapi lebih sebagai gejala simbolik. Dengan kata lain, analisis isi adalah suatu metode pendalaman data simbolik atau isi komunikasi yang tampak (*manifest*, Inggris).⁽²¹⁾

Sebelum melakukan analisis, beberapa komponen atau langkah yang harus ditempuh adalah pembentukan data (unitisasi, sampling, pencatatan), reduksi data, dan kemudian penarikan inferensi-inferensi (prosedur dan desain analisis isi lihat bagan pada **lampiran 2a** dan **2b**). Dalam penggarapannya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus perhatian tertuju pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang mengemuka di Tajuk Surat kabar. Pendekatan ini digunakan karena analisis isi berorientasi pada makna, referensi, konsekuensi, dan keinginan-keinginan yang tidak mungkin digapai melalui pendekatan kuantitatif.

Dalam pengkajian maupun penulisannya, data-data yang sudah direduksi akan disusun dan diinterpretasi secara deskriptif-analitis dengan mengkaitkan berbagai faktor internal dan eksternal untuk kemudian menarik inferensi-inferensi berupa

(19). Wawancara dengan Soebagyo Pr bulan Mei 1992 di Jakarta.

(20). K. Krippendorff, *Analisis Isi*, terj. Frid Wajidi (Jakarta: 1991).

(21). B. Barelson, *Content Analysis in Communication Research*, (New York: 1952) hlm. 18.

generalisasi dan kategorisasi berdasarkan faktor-faktor tetap yang ada dalam sistem yang menjadi obyek analisis. Dengan demikian, pada akhirnya dapat diperoleh wawasan terhadap pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

1.5.2 Populasi, Sampel, dan Unit Analisis

Suatu kenyataan bahwa semua media massa Indonesia, baik cetak maupun elektronik, memberitakan dan mengulas konfrontasi. Karena jumlah media massa terlalu banyak dan cakupan masalahnya terlalu luas dan rumit, maka tanpa mengurangi karakteristik populasi yang diwakilinya, penulis mengambil sampel dengan sengaja terhadap populasi surat kabar berupa tujuh harian umum ibukota, yaitu harian *Suluh Indonesia* (PNI), *Harian Rakyat* (PKI), *Duta Masyarakat* (NU), *Sinar Harapan* (Parkindo), *Kompas* (Partai Katolik), *Angkatan Bersenjata* (ABRI), dan *Merdeka* (independen). (Lihat **lampiran 3**).

Alasan diambilnya ketujuh surat kabar itu didasarkan pada tiga hal. **Pertama**, karena ketujuh surat kabar itu berskala nasional dan berkedudukan di pusat pemerintahan. Kedudukan dan sifatnya yang demikian diharapkan bisa mewakili semua surat kabar yang tersebar di seluruh Indonesia. **Kedua**, lebih dari gambaran kerangka Nasakom maupun politik segitiga, ketujuh surat kabar itu dinilai cukup representatif terhadap kekuatan-kekuatan ideologis-politis dalam realita politik domestik masa Demokrasi Terpimpin. (lihat **lampiran 4**). **Ketiga**, kecuali *Kompas* dan *Angkatan Bersenjata* (baru terbit tahun 1965), kelima surat kabar lainnya hidup dan tetap survival selama periode yang dibicarakan, sejak konfrontasi dimulai hingga G 30 S/PKI.

Dari semua bentuk dan sifat tulisan mengenai konfrontasi di surat kabar-surat kabar tersebut tidak seluruhnya diamati dan dianalisis. Dalam penelitian ini, fokus perhatian yang menjadi obyek analisis adalah rubrik Tajuk ketujuh surat kabar yang

dikenal dengan nama Tajuk Rencana, Editorial, atau Induk Karangan. Langkah ini ditempuh mengingat penelitian ini berkaitan dengan bahasa untuk menggali makna simbolik. Pada sisi lain, Tajuk mengungkapkan pendapat-pendapat atau pandangan tentang hakikat dari situasi yang tidak harus dimengerti sepenuhnya dan pendapat mengenai peristiwa maupun respons yang diharapkan dalam kaitannya dengan kecenderungan-kecenderungan historis, teori, dan dogma.⁽²²⁾

Menurut Garis Besar Bentuk Pers yang dikeluarkan PBB,⁽²³⁾ Tajuk Rencana adalah esei yang memberi gambaran yang jelas dan tegas tentang segala persoalan yang berlangsung dalam suatu negara dan pemerintahan, baik mengenai soal-soal nasional maupun internasional, dengan memakai bahasa yang bisa dipahami. Dengan demikian, Tajuk pada hakikatnya merupakan visi atau pandangan surat kabar tentang sesuatu hal atau peristiwa.

Di luar Tajuk, unsur-unsur lain seperti berita, opini para pakar atau pengamat, dan surat pembaca sama sekali tidak digubris. Namun untuk memberi wawasan dan memperdalam interpretasi analisis, penulis juga memanfaatkan karikatur dan rubrik Tinjauan Luar Negeri, di samping melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh pers maupun politik yang masih ada.

1.6 Sumber Data

Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. **Pertama**, penelitian kepustakaan yang meliputi tujuh surat kabar sebagai sumber utama, di samping buku-buku mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sasaran telaah kepustakaan ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan langsung dengan latar belakang dan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta membantu upaya penyusunan landasan dan bangun teoretis.

Kedua, buku-buku dan dokumen penting lainnya mengenai hal-hal yang

(22). Klaus Krippendorf, *op. cit.* hlm. 65-69.

(23) Prof. Dr. Floyd Arpan, *op. cit.*, hlm. 190.

berkaitan dengan pers serta politik dalam dan luar negeri, baik yang bersifat teoretis maupun monografi ilmiah. Sumber kepustakaan jenis ini digunakan terutama untuk menunjang upaya penyusunan landasan dan bangun teoretis.

Ketiga, diskusi dan wawancara. Diskusi dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk mempertajam dan sekaligus menguji kerangka penelitian serta memberikan bahan masukan akademik yang diperlukan. Sedangkan wawancara ditujukan untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian kepustakaan.

Semua data, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasi menurut derajat relevansi, keandalan, serta keaslian. Data-data itu akan disusun secara deskriptif-analitis sehingga menampakkan keterkaitan antar-variabel.

1.7 **Sistematika Penulisan**

Organisasi penulisan skripsi ini mengikuti sistematika berikut. Bab Pendahuluan terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, kerangka analisis teoritik, tujuan dan signifikansi penelitian, metodologi, sumber data, dan sistematika penulisan. Dalam bab II digambarkan tentang sistem dan dinamika kehidupan politik Indonesia di bawah sistem Demokrasi Terpimpin. Pembahasan mengenai realita politik dalam dan luar negeri bermuara pada suatu uraian singkat tentang sistem dan dinamika kehidupan Pers Terpimpin (1959-1965).

Selanjutnya dalam bab III akan dibicarakan secara panjang lebar tentang Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1962-1965) mulai dari munculnya gagasan Federasi Malaysia, konfrontasi politik dan upaya-upaya diplomasi, sampai dengan konfrontasi ekonomi dan militer Pemerintahan Soekarno terhadap Malaysia. Sedangkan dalam bab IV digambarkan secara deskriptif-naratif mengenai pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap berbagai isu di balik Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Isu-isu yang dimaksud secara berturut-turut adalah gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang diikuti konfrontasi politik, upaya-upaya penyelesaian damai yang gagal,

serta politik konfrontasi ekonomi dan militer yang mencapai antiklimaks setelah G 30 S/PKI.

Bab terakhir merupakan bagian analisis yang ditujukan untuk menguji hipotesa penulis dengan membandingkan hasil telaah isi Tajuk surat kabar dengan pengetahuan akan data atau variabel-variabel tetap maupun tidak tetap. Lalu dibuat kategorisasi dan generalisasi maupun inferensi-inferensi.



BAB II

INDONESIA DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN

Sistem politik Demokrasi Terpimpin resmi berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Secara formal, Dekrit tersebut telah menggeser sistem politik Demokrasi Liberal (1950-1959). Di sisi lain, Dekrit merupakan antiklimaks dari kompleksitas berbagai kemelut yang berkejolak tidak menentu, baik di tingkat politik nasional maupun daerah, selama masa Demokrasi Liberal di bawah UUDS 1950. Klimaks dari krisis kehidupan politik dan ekonomi serta militer sejak pertengahan 1950-an itu memuncak pada November 1956. Tentang ini, Dr. R.Z. Leirissa lebih jauh menggambarkan:⁽¹⁾

Dalam situasi yang makin memburuk itulah, muncul gerakan-gerakan daerah yang bertujuan mencegah kehancuran yang lebih parah. Sementara pimpinan TNI-AD makin bersifat legalistik, dan karena proses politik makin tidak kondusif untuk pembangunan, muncul suara-suara di Sumatra dan Sulawesi untuk menghidupkan kembali elan perjuangan dari masa Perang Kemerdekaan.

Di tengah gejolak yang menimbulkan keresahan yang semakin luas dan dalam itu, Presiden Soekarno dan ABRI, terutama TNI-AD, tampil ke depan sebagai "pemandu demokrasi" Indonesia yang dianggap telah tersesat. Di pengujung 1958, Presiden Soekarno semakin memperkuat dan mempertajam dominasi pengaruhnya terutama melalui kemampuan oratoris dan simbol-simbol karismatiknyanya. Hal itu akhirnya mendapat legitimasi dengan diberlakukannya keadaan perang dan darurat perang (SOB) sejak 14 Maret 1957.

Demikian pula TNI dengan jurusnya sendiri. Di samping menguasai alat pemaksa atau persenjataan yang sah, di bawah pimpinan KASAD Mayor Jenderal Nasution, TNI mengambil langkah-langkahnya sendiri atas dasar SOB, termasuk

(1). R.Z. Leirissa. *PRRI PERMESTA Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: 1991). hlm. 30.

menyerang PKI yang tetap gigih dan berani. Bahkan kedudukan dan peranannya semakin berpengaruh di lingkungan birokrasi sipil maupun ekonomi berkat keberhasilannya meredam dan menumpas berbagai gejolak dan pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta.

Setelah usulan Presiden Soekarno yang didukung kuat oleh TNI dan Kabinet agar segera mempertegas pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ditolak oleh Dewan Konstituante, bagai bom waktu Presiden Soekarno segera mengumumkan konsepsi Demokrasi Terpimpinnya yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁽²⁾ (Bunyi lengkap Dekrit Presiden 5 Juli 1959 lihat **lampiran 5**). Dekrit tersebut berisi tiga ketetapan sekaligus yaitu pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya kembali UUD Sementara 1950. Dengan Dekrit itu, Presiden Soekarno mulai menata sistem Demokrasi Terpimpin, khususnya penataan kembali lembaga-lembaga negara.

2.1. Percaturan Politik Segitiga

Dalam sejarah politik Indonesia, masa Demokrasi Terpimpin pada umumnya dilukiskan sebagai sebuah susunan kekuasaan berbentuk segitiga.⁽³⁾ **Presiden Soekarno** berada di pusat sistem itu terutama karena kemampuan khasnya dalam menjaga keseimbangan berbagai kekuatan yang saling bersaing dalam pengelompokan-pengelompokan kekuasaan. Kedudukan Soekarno sangat khas karena ia bukan berasal dari sumber kekuatan politik independen yang terorganisasi.

Dua sumber kekuasaan lainnya adalah **Angkatan Bersenjata**, TNI AD khususnya, dan **PKI**. Di samping menguasai alat pemaksa yang sah, TNI-AD semakin berpengaruh di lingkungan birokrasi sipil maupun ekonomi sehingga memiliki sumber daya yang sangat besar. Sementara kekuasaan PKI terutama berasal dari

(2). Hassan Shadily (Pemimpin Redaksi Umum), *Ensiklopedi Indonesia*, Jld. 1 (Jakarta: 1980). Lihat juga, RI, *The Indonesia Revolution: Basic Documents and the Idea of Guided Democracy* (Deppen: 1960), hlm. 121-122.

(3). Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: 1962), hlm. 341.

popularitasnya di kalangan masyarakat kelas bawah di desa maupun di kota, ketrampilan berorganisasi dan kemampuannya melahirkan gagasan ataupun isu-isu baru dalam rangka politik strategisnya.

Jalinan hubungan dan interaksi antara ketiga sudut kekuasaan itu tampak rumit dan sudah berlangsung cukup lama. Sistem Demokrasi Terpimpin berhasil menggeser sistem Demokrasi Liberal justru karena koalisi Soekarno-ABRI. Dalam koalisi ini, Soekarno mewakili legitimasi revolusioner, sedangkan ABRI berperan sebagai penjaga keutuhan negara secara fisik dan merupakan kekuatan konservatif seperti yang ditunjukkan dalam permusuhannya yang mendalam dengan PKI.⁽⁴⁾

Sementara hubungan antara Presiden Soekarno dengan PKI sudah terjalin sebelum Demokrasi Terpimpin muncul secara formal yang terwujud dalam strategi Front Nasional. Di mata Soekarno, PKI dilihat sebagai kekuatan pengimbang yang cukup andal dan strategis dalam rangka koalisinya dengan ABRI yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada yang dimilikinya. Dalam hal ini terutama kemampuan PKI dalam mengerahkan dukungan massa yang diperlukan Soekarno dengan menggunakan retorika nasionalis-revolusioner.

PKI membangun koalisi dengan Soekarno karena menyadari posisi ideologinya dalam percaturan politik nasional dan permusuhannya dengan ABRI. Karena itu, PKI menyambut dengan antusias rangkulan dan perlindungan politik yang ditawarkan Soekarno dalam wujud terminologi politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme).⁽⁵⁾

Dalam percaturan politik segitiga itu, Presiden Soekarno berhasil mempertahankan posisinya di puncak dengan "mengangkangi" kedua perangkat koalisi yang bersaing. Dalam persaingan itu, baik PKI maupun ABRI sama-sama mengikutsertakan Soekarno. Faktor seorang Soekarno demikian penting sehingga

(4). Hidayat Mukmin, *op. cit.* hlm. 65-76.

(5). Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy", dalam Ruth T. McVey (ed), *Indonesia*. (Yale University: 1963), bab VIII.

sasaran politik jangka pendek adalah memperoleh hubungan sedekat mungkin dengan Panglima Besar Revolusi dan tokoh karismatik yang ulung itu.⁽⁶⁾

Di luar segitiga di atas, terdapat pula kekuatan-kekuatan politik lainnya seperti PNI, NU, PSII, Partai Katolik, Partai Murba, Partindo, dan IPKI. Kedudukan dan peranan berbagai kelompok politik itu juga ikut menentukan warna dan arah persaingan politik global di tingkat nasional. Terutama dalam periode 1963-1965 yang ditandai meningkatnya lagi pengaruh partai di satu sisi dan merosotnya kekuasaan dan pengaruh Angkatan Darat di sisi lain. Berbeda dengan periode 1959-1963, dalam periode 1963-1965 persaingan antar-partai kembali meningkat bahkan terus menyempit ke arah persaingan antara PKI dengan PNI di samping Front Nasional, NU, dan partai-partai Kristen yang mengekor pada PNI dalam menentang PKI.⁽⁷⁾

2.1.1 Periode 1959-1963

Periode 1959-1963 dapat dikatakan sebagai masa persiapan sekaligus masa pencarian bentuk sebuah sistem Demokrasi Terpimpin. Kalau masa peralihan 1957-1959 kegiatan ideologis masih dalam pengenalan, maka dalam periode 1959-1963 kegiatan ideologis pemerintah sudah mengarah indoktrinasi. Feith menggambarkan:⁽⁸⁾

Tidak pernah terjadi dalam periode sebelumnya seperangkat gagasan dipaksakan seperti dalam bagian ketiga periode ini. Belum pernah sebelum itu pemimpin-pemimpin pemerintah menuntut pernyataan dukungan secara berulang terhadap gagasan-gagasan pemerintah sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik resmi.

Demikian periode 1959-1963 ditandai dengan melemahnya kekuasaan partai-partai politik dalam menghadapi dua pusat kekuasaan utama sistem Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden Soekarno dan TNI AD. Dari tiga partai besar —PNI, NU,

(6). Hidayat Mukmin, *op. cit.* hlm. 69.

(7). J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965* (Jakarta: 1991), hlm. 387.

(8). Herbert Feith, *op. cit.* hlm. 212.

dan PKI— yang masih hidup pada akhir 1960, PNI paling banyak mengambil keuntungan dari keadaan ini.⁽⁹⁾ NU tidak mempunyai orang yang cukup berpengalaman dan berpendidikan untuk memperoleh lebih dari sekadar pengaruh di lingkungan birokrasi, sedangkan PKI sulit menembus ke arah ini karena dihalangi TNI-AD. Di pihak lain, PNI sudah mempunyai kedudukan yang kuat di lingkungan birokrasi dan cukup mampu mempertahankan kedudukan itu dalam menghadapi semua penentangannya.

Menjelang akhir 1963, terjadi beberapa perkembangan baru. Sifat konservatif TNI-AD mendorong Presiden Soekarno beralih perhatian kepada partai-partai politik. Presiden Soekarno begitu terkesan oleh kemampuan parpol dan ormas dalam melahirkan isu-isu baru dan usulan-usulan ideologis maupun dalam meraih dukungan aksi massa. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sulit bagi Presiden Soekarno memperluas jaringan dan memperoleh dukungan ormas-ormas tanpa memperkuat dan merangkul partai karena antara partai dan ormas terjalin hubungan yang erat dan sulit dipisahkan. Untuk itu, Presiden Soekarno tetap mendorong kesatuan dalam kerangka Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme), tetapi di lain pihak ia juga mendorong partai untuk membuktikan revolusionernya.

Dalam pada itu, Soekarno juga sulit mengesampingkan begitu saja TNI-AD. Di samping memiliki kekuasaan fisik dan telah menancapkan kukunya di dalam perekonomian dan birokrasi, TNI-AD mutlak diperlukan oleh Presiden Soekarno dalam membangun kedudukan Indonesia yang kuat di arena percaturan internasional. Karena itu, ia tidak bisa memperlemahnya. Demikian pula terhadap partai, ia mengusahakan perubahan-perubahan dalam partai tetapi bukan melemahkannya.

Soekarno tampaknya berhasil mendesak perubahan dalam tubuh PNI, tetapi tidak demikian terhadap PKI yang memiliki ideologi yang lebih padu dan militan. Walaupun demikian, PKI terpaksa mengorbankan beberapa ciri ideologinya

(9). J. Eliseo Rocamora, *op. cit.* hlm. 342-344.

sesuai tuntutan ideologis Demokrasi Terpimpin yaitu harus bergerak dalam kerangka kesatuan nasional dan solidaritas Nasakom yang dipaksakan. Sebaliknya, ideologi PNI sudah sejalan dengan ideologi negara dengan menerima Presiden Soekarno sebagai perumus Marhaenisme. Sementara NU, sebagai salah satu partai besar lainnya, tetap sepenuhnya bersedia menyesuaikan diri dengan keadaan darurat politik di Jakarta selama basisnya di Jawa Timur tidak terganggu.⁽¹⁰⁾

NU tidak mempunyai jaringan ormas yang luas seperti halnya PKI dan PNI. Keadaan yang sama juga dialami ketujuh partai lainnya yang resmi diakui selama masa Demokrasi Terpimpin. Partai Murba dan Partindo tidak lebih dari sebuah kelompok elite yang tergantung pada para politikus yang dekat dengan Soekarno. IPKI tergantung pada unsur-unsur pimpinan Angkatan Darat. Partai Kristen dan Partai Katolik memiliki beberapa pengikut di daerah maupun dukungan dari kalangan cendekiawan dan pejabat kota. Partai Islam Perti dan PSII sebagian besar adalah organisasi daerah dengan pengikut yang terbatas pada beberapa wilayah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.⁽¹¹⁾

Seperti halnya tiga partai besar PNI, PKI, dan NU, partai-partai kecil juga sangat berhati-hati dalam berhubungan apalagi mengeritik Pemerintah dan Angkatan Bersenjata. Hal yang sama bahkan terjadi juga dalam interaksi antar-partai yang penuh dengan persaingan terselubung. Barangkali, kecuali PKI dan PNI, partai-partai lain berjuang tidak lebih dari sekadar untuk bisa bertahan hidup di bawah tekanan dan pengawasan ketat pemerintah.

2.1.2 Periode 1963-1965

Periode 1963-1965 memperlihatkan bahwa kedudukan dan pengaruh partai kembali meningkat sejalan dengan merosotnya kekuasaan TNI-AD. Hal ini berawal

(10). *Ibid.* hlm. 390-391. Penelitian mendalam tentang Ideologi Komunisme periode ini oleh Rex Mortimer. *The Ideologi of The Communist Party under Guided Democracy* (tesis tidak diterbitkan. 1970).

(11). J. Eliseo Rocamora. *op. cit.* hlm. 386.

dari hilangnya wewenang resmi TNI-AD terhadap masalah sipil setelah undang-undang darurat (SOB) berakhir.

Sumber kekuasaan partai yang paling penting ialah aksi massa dan imbauan ideologis. Angkatan Darat sendiri mendapat serangan dari partai-partai secara tidak langsung terutama terhadap manajemen bekas perusahaan-perusahaan Belanda yang dikuasai TNI-AD dan SOKSI yang didukung TNI-AD.

Serangan pedas terutama datang dari pimpinan PKI dan sayap kiri PNI. Selain terhadap TNI-AD, serangan itu juga ditujukan terhadap bekas pejabat PSI dan Masyumi, HMI, wartawan yang terlibat dalam kasus BPS, seniman, guru, dan cendekiawan yang bergabung dalam kelompok Manifes Kebudayaan. Mereka semua dicap sebagai "kapitalis-birokrat" dan atau "imperialis kebudayaan Barat", ungkapan-ungkapan berbahaya karena meningkatnya suasana tuduhan ideologis pada tahun 1964 dan 1965.⁽¹²⁾

Pada akhir 1964 dan awal 1965, persaingan antar-partai di tingkat nasional menyempit ke arah persaingan antara PNI dan PKI. Partai-partai kecil pada umumnya menentang PKI secara tidak langsung atau baru bertindak bila PNI sudah mengambil prakarsa terlebih dahulu. Ketegangan meningkat ketika PKI secara efektif dan efisien berhasil memanfaatkan rapat umum dan kampanye ideologis, baik untuk mempengaruhi Presiden Soekarno maupun untuk menyerang unsur-unsur konservatif di lingkungan TNI-AD, birokrasi, perusahaan negara, universitas, dan pers. Keampuhan taktik ini antara lain terlihat dalam demonstrasi dengan kekerasan terhadap kedutaan Inggris dan penyitaan harta benda Inggris pada bulan September 1963 sejalan dengan meningkatnya politik Konfrontasi terhadap Malaysia dari konfrontasi politik kepada konfrontasi fisik.⁽¹³⁾

Suasana bertambah kritis ketika konfrontasi mendorong Indonesia semakin

(12). *Ibid.*

(13). *Ibid.*

jauh ke kiri secara internasional, sementara perekonomian dalam negeri merosot tajam. Pada sisi lain, radikalisme politik PKI dengan kampanye aksi sepihak dalam tahun 1964 berakibat meningkatnya ketegangan antara PKI dengan golongan anti-PKI, bahkan telah menimbulkan pemberontakan di beberapa daerah. Polemik tajam terjadi antara kelompok pers PKI dengan kelompok pers anti-PKI. Polemik memang berhasil diredakan, tetapi pertentangan baru muncul menyangkut BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) yang berakhir dengan pembubaran Badan "penentang PKI" itu oleh Presiden tanggal 17 Agustus 1964.

Suasana bertambah runyam memasuki tahun 1965 ketika Presiden Soekarno melancarkan serangkaian tindakan baru yang lebih radikal. Antara lain menarik Indonesia keluar dari PBB setelah Malaysia menempatkan kursinya di Dewan Keamanan Badan Dunia itu. Untuk menandingi PBB, Indonesia kemudian menyelenggarakan Konferensi *New Emerging Forces* (Conefo) di Jakarta. Disusul lagi pengumuman mengenai kiblat baru politik luar negeri poros anti-imperialis: Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.⁽¹⁴⁾

Semua itu sangat menguntungkan PKI yang sudah masuk dan mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan nasional. TNI-AD terus memantau gerak-gerik politik PKI secara cermat dan tegas. Kampanye PKI tentang Nasakominasi ABRI dan pembentukan Angkatan ke-5 ditolak KASAD Jenderal A. Yani tanggal 27 September 1965 dan tiga hari kemudian disusul Gerakan 30/S/PKI.

2.2 Politik Luar Negeri dan Kepentingan Politik Domestik

Politik luar negeri Indonesia di bawah sistem Demokrasi Terpimpin memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan dua periode sebelumnya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Di bawah tatanan sistem politik Demokrasi Terpimpin, garis kebijaksanaan luar negeri praktis menjadi hak monopoli

(14). Diucapkan dalam pidato Bung Karno berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit," tanggal 17-8-1965 (Deppen RI).

Presiden Soekarno dengan kekuatan senjata sebagai faktor dominan, sedangkan diplomasi sebagai faktor pendukung.⁽¹⁵⁾ Konsentrasi monooli pembuatan politik luar negeri ini dilukiskan oleh Michael Leifer sebagai:⁽¹⁶⁾

Proses pembuatan keputusan di istana raja, yaitu Soekarno sebagai raja penentu kata akhir sedangkan elit di lingkungan istana bersaing untuk mempengaruhi raja dalam penyusunan kebijaksanaan luar negeri tersebut.

Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor **seorang Soekarno** dan **realitas percaturan politik** dalam negeri Indonesia yang penuh persaingan tajam, kompleks, dan pluralistik. Faktor Soekarno diidentifikasi sebagai karakteristik kepribadian Presiden Soekarno yang nasionalis-revolusioner, terampil berpidato dan bermanuver dalam politik, gemar akan simbol-simbol terutama akronim-akronim karismatik seperti Manipol-USDEK, Nasakom, Resopim, Dekon, Nekolim, Ganefo, Nefo, dan Oldefo.

Sementara itu, yang dimaksud dengan faktor realitas percaturan politik dalam negeri ialah kompensasi kemandegan kebijaksanaan maupun keputusan-keputusan penting dalam negeri akibat ketegangan hubungan ketiga sentral kekuasaan "politik segitiga" antara Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI.

Dalam hal terakhir, Presiden Soekarno menggunakan masalah-masalah luar negeri untuk dua tujuan sekaligus. **Pertama**, untuk mempertahankan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Masalah-masalah kebijaksanaan luar negeri yang mampu membangkitkan reaksi nasionalis mendorong Presiden Soekarno untuk bermanuver politik secara lebih bebas tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam negeri. **Kedua**, untuk menyokong pola kekuasaan segitiga yang di dalamnya Soekarno sendiri menjadi aktor sentral sekaligus puncak pola segitiga

(15). Penelitian mendalam tentang politik Luar Negeri Indonesia dilakukan oleh Dr. Michael Leifer. *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: 1989).

(16). *Ibid.* hlm xiv.

yang "mengganggu" kedua koalisi yang saling bersaing, yaitu TNI-AD dan PKI. Di sini prakarsa hubungan luar negeri dijadikan sebagai faktor penentu bersama terhadap perasaan politik sehingga pola kekuasaan yang ada dapat dipertahankan.

Angkatan Bersenjata telah kehilangan peranan sebagai "penjaga" dalam mempertahankan Republik, tidak hanya karena penyelesaian Irian Barat, tetapi juga karena hilangnya ancaman yang timbul dari pemberontak daerah dan pergerakan Darul Islam. PKI pun melihat suatu kesempatan untuk menempatkan dirinya dalam arus agitasi nasionalis. Sifat patriotik, tentu tidak diragukan lagi, bahkan semakin diperteguh dengan ingar-bingar pernyataan anti-Barat. Permusuhan politik yang mendalam —di mana Soekarno sebagai salah satu pihak di dalamnya— telah menciptakan suatu iklim yang mengeksploitasi perihal Malaysia untuk kepentingan masing-masing. Dalam konteks ini, konfrontasi dapat ditafsirkan sebagai ungkapan watak utama Demokrasi Terpimpin yang berperan sebagai faktor pemersatu bagi unsur-unsur politik yang bergabung dalam persekutuan bermusuhan dan penuh persaingan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, penggunaan kekuatan senjata tampak lebih dominan dengan diplomasi sebagai faktor pendukung. Gaya dan tujuan politik luar negeri zaman Demokrasi Terpimpin penuh semarak dan menunjukkan ambisi regional (kawasan Asia Tenggara) serta memperlihatkan tempat Indonesia dalam tatanan dunia internasional. Implikasinya terlihat jelas pada jargon kebijaksanaan luar negeri seperti gagasan alternatif progresif-revolusioner: *The New Emerging Forces (Nefos)* yang dipertentangkan dengan *The Old Emerging Forces (Oldefos)* dengan Indonesia dilukiskan sebagai pelopor "Kekuatan Baru Nefos". Kewenangan Presiden Soekarno dalam urusan politik luar negeri yang demikian dominan menjadikan seorang Soekarno sebagai suara politik Indonesia di tengah percaturan dunia internasional.

Sengketa Irian Barat dilihatnya sebagai proyek "Dekolim" (dekolonialisasi-

imperialisasi), sedangkan pembentukan Federasi Malaysia dianggapnya sebagai kedok "Nekolim" (Neokolonialisme-imperialisme). Pemerintahan Soekarno mendukung Proklamasi Negara Kesatuan Kalimantan Utara karena senafas dengan gagasan Nefos. Lebih jauh dari itu, Presiden Soekarno sempat mengejutkan dunia internasional dengan gagasannya mengenai tatanan kawasan internasional baru yang dilontarkannya di muka Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960. Pidatonya yang berjudul *To Build The World A new* itu kelak diperjuangkannya secara konsekuen, termasuk perjuangannya menentang pembentukan Federasi Malaysia.

Di samping itu, politik luar negeri di bawah sistem Demokrasi Terpimpin juga membawa perubahan dalam pola hubungan dekat dan keberpihakan dengan negara-negara lain. Konsep politik luar negeri bebas-aktif diabaikan dan sebagai gantinya dinobatkan konsep "kekuatan baru yang sedang bangkit" atau Nefos sebagai doktrin resmi. Implikasinya terlihat ketika dikumandangkan politik konfrontasi atas Irian Barat maupun Malaysia. Sebagai konsekuensi politik konfrontasi itu, hubungan dekat dikembangkan dengan negara-negara komunis (Uni Soviet kemudian RRC) dengan mengorbankan negara-negara Barat. Keberpihakan dengan RRC dipertegas lagi ketika Indonesia melepaskan keanggotaan dalam PBB, menyusul diterimanya Malaysia dalam Dewan Keamanan PBB.

Demikian gaya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin tampak bergaung keras, tegar, dan militan yang mencerminkan temperamen Soekarno dan sifat hingar-bingar politik dalam negeri. Ini terlihat jelas pada penggunaan politik konfrontasi dan diplomasi paksaan yang bersifat flamboyan. Praktek seperti itu digunakan secara efektif-efisien dalam kasus Irian Barat, namun gagal dalam kasus Konfrontasi dengan Malaysia.

2.3. **Sistem dan Dinamika Kehidupan Pers Nasional**

Sistem pers pada hakikatnya mengikuti atau tunduk pada sistem politik

yang berlaku. Dengan dicetuskannya sistem Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959, kehidupan pers Indonesia memasuki suasana baru di bawah sistem yang baru. Kedudukan dan fungsi pers diarahkan kepada tujuan dan garis politik sistem Demokrasi Terpimpin. Di bawah tatanan sistem Demokrasi Terpimpin, politik menjadi unsur penggerak dan menguasai berbagai masalah dan peristiwa penting di Indonesia sehingga muncul pemoe pada masa itu "politik adalah panglima".

Di bawah petunjuk arah Demokrasi Terpimpin terletak konsep "Pers Terpimpin". Kedudukan dan fungsi pers diarahkan mengikuti garis dan tujuan politik tersebut. Suara-suara yang berani melawan atau yang dicap kontra-revolusioner waktu itu langsung dibungkam. Begitulah, tidak sedikit koran maupun wartawan dibreidel, didenda, bahkan harus menyekap di penjara.⁽¹⁷⁾ (Tindakan antipers periode ini lihat **lampiran 8**).

2.3.1 **Pers Terpimpin 1959-1963**

Setelah Dekrit Presiden diumumkan tanggal 5 Juli 1959, penguasa segera mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk lebih memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap pers. Namun pengendalian ataupun tindakan antipers sebenarnya sudah banyak dilakukan sejak undang-undang keadaan bahaya (SOB) diberlakukan tahun 1957 untuk seluruh Indonesia.

Menyusul pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penguasa perang Jakarta Raya mencabut larangan kegiatan politik yang diberlakukan selama masa krisis sesudah Presiden membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Namun bersamaan dengan itu dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa pengontrolan terhadap kehidupan politik tetap diteruskan, termasuk penerbitan-penerbitan politik dan kegiatan masyarakat yang bersifat politis dan mengganggu jalannya Revolusi.

(17). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, hlm. 128.

Dengan peraturan baru tersebut, kebebasan menyatakan pendapat boleh dikatakan berakhir samasekali. Menteri Muda Penerangan Maladi dalam pidatonya menyambut HUT RI ke-14 mengatakan bahwa hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Peranan pers dikatakannya sangat penting pada tahap rehabilitasi, bahwa:⁽¹⁸⁾

Pers nasional yang dapat mengasuh pendapat umum dan dengan penuh kesadaran mencerminkan jiwa baru, menggerakkan perubahan mental menuju dunia demokrasi terpimpin serta cita-cita suatu masyarakat sosialis ala Indonesia, memberikan sumbangan besar bagi revolusi.

Krisis antara pers dan pemerintah memuncak pada tahun 1960. Walaupun jumlah tindakan antipers bertambah hanya 20 dari tahun sebelumnya, untuk tahun 1960 pemerintah memperlihatkan dominasi kekuasaannya yang semakin otoriter. Pada tahun itu, pemerintah mengadakan operasi pembersihan dengan melakukan pembreidelan secara luas dan semakin tersingkirnya pers Cina. Hal ini diawali dengan peringatan Maladi bahwa langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah, dan kantor berita jika melanggar peraturan mengenai ketertiban pers nasional dalam rangka pelaksanaan Manipol-USDEK (Manifesto Politik berdasarkan UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional Indonesia). Dalam rangka itu, Departemen Penerangan kemudian melakukan "re-tooling" (perombakan) organisasi, pemberian izin, dan sistem distribusi pers nasional.

Roeslan Abdulgani, Menteri/Wakil Ketua DPA, dalam ceramahnya pada Akademi Pers Indonesia di Medan bulan Oktober, menegaskan bahwa wartawan yang tidak mendukung Manipol lebih baik mundur jika tidak ingin ditenggelamkan arus revolusi. Ketika Presiden membubarkan Parlemen, Panglima militer Jakarta mengingatkan pers agar tidak melakukan penyajian redaksional yang keliru. Pada bulan November, Maladi menjelaskan bahwa kebebasan menyatakan pendapat akan

(18). Edward Smith, *op. cit.* hlm. 184.

diatur sedemikian rupa oleh undang-undang sehingga sejalan dengan kepentingan rakyat dan berarti pula pendapat itu harus sama atau sejalan dengan pendapat pemerintah.⁽¹⁹⁾

Usaha Presiden Soekarno memaksa pers agar secara giat mempopulerkan Manipol-USDEK mencapai titik klimaks pada akhir 1960. Setelah Presiden/Perdana Menteri/Penguasa Perang Tertinggi Soekarno melarang semua kegiatan politik, pemerintah mengumumkan ultimatum kepada para praktisi pers, "mereka harus menandatangani janji yang terdiri dari 19 butir untuk mendukung Manipol-USDEK dan jika tidak mereka tidak dapat lagi berkecimpung dalam usaha persuratkabaran". Peraturan itu menegaskan pula bahwa semua penerbit diwajibkan mengajukan lagi permohonan SIT. Dalam hal ini, SIT akan diberikan jika penerbit surat kabar menandatangani pernyataan yang berisi 19 pasal (lihat **lampiran 7**). Sebaliknya jika tidak, SIT tidak diberikan atau dengan kata lain harus berhenti terbit.⁽²⁰⁾

Beberapa penerbit memang menandatangani, tetapi tidak sedikit pula yang menolak sehingga terpaksa berhenti terbit bahkan ada yang masuk penjara. *Harian Pedoman (PSI)* pimpinan Rosihan Anwar, *Nusantara*, *Keng Po*, *Pos Indonesia*, *Star Weekly*, dan *Abadi*, tercatat sebagai korban Peraturan Pemperti No. 10./1960 itu. Perlu digarisbawahi bahwa koran-koran yang dibreidel itu selain berani melawan sistem Demokrasi Terpimpin juga dikenal gigih melawan komunisme.⁽²¹⁾

Pada tahun 1961, semua pers dinasionalisasikan. Pers yang suka melawan atau mengkritik pemerintah atau penguasa disingkirkan untuk menjamin kebebasan pers tidak hidup kembali. Untuk mengelola semua percetakan pers yang sudah dinasionalisasikan itu, Pemerintah membentuk Badan Pengawasan dan Pembinaan Pers. Dengan itu, dunia pers sepertinya sudah tidak menemukan jalan untuk mempertahankan diri. Demikian pula suara-suara lantang para Pemimpin Redaksi

(19). *Ibid.* hlm. 194-199.

(20). Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: 1988). hlm. 122-126.

(21). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, hlm. 129.

nyaris tidak terdengar lagi, baik karena kehilangan hak dan media untuk itu maupun karena didekap di penjara.

Untuk memandu "pers Terpimpin", pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6/1963 yang menyatakan bahwa bimbingan terhadap pers akan diberikan oleh Menteri Penerangan dan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), para Kepala Staf ke-4 Angkatan, serta Jaksa Agung. Disusul kemudian dengan pembentukan Badan Khusus pada Departemen Penerangan yang bertugas mengelola semua kegiatan pers.

2.3.2 **Pers Terpimpin 1963-1965**

Memasuki pertengahan tahun 1963, stabilitas politik mulai goyah dengan munculnya kembali pertentangan-pertentangan politik-ideologis. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari mulai menguatnya kembali kekuasaan partai-partai akibat SOB dihapuskan maupun karena perubahan orientasi politik Soekarno yang melihat peranan strategis partai dalam mengerahkan dukungan massa dan sekaligus menyeimbangkan ataupun menyingkirkan TNI-AD. Di samping itu, ketegangan politik juga disebabkan oleh semakin meningkatnya kekuatan dan operasi PKI di bawah perlindungan presiden serta memburuknya kehidupan perekonomian nasional.

Dalam situasi politik demikian, kehidupan dunia pers justru mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Tulang punggung pers Indonesia sudah berhasil dipatahkan dan yang tersisa hanyalah pers yang mendukung Manipol-USDEK dan jalannya arus revolusi. Sementara janji perlindungan terhadap kebebasan pers berupa Undang-Undang Pers tidak pernah terwujud.

Dalam periode 1963-1965, pers sudah menjadi milik pemerintah dan berada di bawah penguasaannya. Dalam pada itu, konflik antara pers PKI dan kelompok pers anti-PKI semakin tajam sejalan dengan meningkatnya pertentangan ideologis antara kaum komunis dan lawan-lawannya.

Di tengah kampanye "Ganyang Malaysia", harian *Merdeka* terlibat dalam polemik tajam dengan harian komunis, *Harian Rakyat*. Polemik kemudian meluas dan saling berhadapan pers anti-PKI melawan terompet PKI tersebut. Menurut *Merdeka*, seseorang tidak bisa menjadi komunis yang baik jika pada waktu yang bersamaan dapat memenuhi persyaratan Manipol-USDEK. *Merdeka* menuduh PKI ingin merebut kepemimpinan revolusi Nasional dari golongan nasional-revolusioner.⁽²²⁾ Kejaksaan Agung kemudian berhasil menghentikan polemik tersebut, namun peristiwa ini baru merupakan permulaan keretakan dalam negeri di tengah kampanye dan perjuangan mengganyang Malaysia.

Kemelut politik dalam negeri terus meningkat di tengah situasi meningkatnya konfrontasi ekonomi dan militer dengan Malaysia. Pada tanggal 14 September 1964, sekelompok demonstran di Jakarta mengancam akan menghancurkan US Information Service (USIS), sementara kampanye anti-Amerika semakin gencar dan meluas. Dalam situasi ingar-bingar dan penuh persaingan terselubung itu, kelompok anti-komunis termasuk sejumlah pendukung Soekarno, mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang mendapat dukungan Angkatan Bersenjata.

Kelompok BPS ini merasa tidak puas menyaksikan kerja sama yang semakin erat antara Presiden Soekarno dan PKI. Beberapa tokoh pendirinya yang penting ialah Adam Malik (Direktur KB Antara dan juga Menteri Penerangan), B.M. Diah (waktu itu Duta Besar Indonesia untuk Thailand), dan Sumantoro (Pemimpin Umum *Harian Berita Indonesia*). Mereka mendirikan BPS untuk menyebarluaskan ajaran Soekarno melalui media massa, akan tetapi kegiatan-kegiatannya diarahkan untuk melawan PKI.

Badan ini mendapat dukungan luas dari kalangan pers, orpol, dan ormas, sementara sejumlah pejabat sipil maupun militer, termasuk beberapa menteri,

(22). Dewan Redaksi *Merdeka*, ed. *Polemik HR dan Merdeka* (Jakarta: 1965).

memberi dukungan secara diam-diam. Tetapi PKI dan simpatisannya menuduh BPS ingin merongrong politik dan membunuh Soekarno dengan kedok menyebarkan ajarannya, karena memang keanggotaan BPS cenderung anti komunis.

Di luar dugaan kalangan BPS, Presiden Soekarno berhasil diyakinkan oleh PKI. Pada tanggal 17 Desember 1964, Presiden membubarkan dan melarang Badan tersebut dengan alasan, "CIA (Badan Inteligen AS) menggunakan BPS untuk membunuh Soekarnoisme dan Soekarno."⁽²³⁾ Sebagai buntut dari peristiwa kontroversial itu, pada tanggal 6 Januari 1965 Presiden membekukan partai Murba dan sebulan kemudian melarang semua penerbitan anggota BPS.

Implikasi lebih jauh dari peristiwa itu ialah dikeluarkannya SK Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65 tanggal 26 Maret 1965 mengenai "Norma-Norma Pokok Pengusaha Pers dalam rangka Pembinaan Pers Indonesia". Berdasarkan ketentuan tersebut, semua surat kabar diwajibkan mempunyai "gandulan" atau berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa yang diakui pemerintah. Dengan demikian, tertutup peluang bagi anggota masyarakat non-partai untuk menerbitkan surat kabar atau majalah umum. Setiap penerbitan pers harus mendapat pernyataan dukungan resmi, termasuk susunan dewan redaksi, dari partai politik, atau ormas, atau Pancatunggal (lima pejabat tertinggi daerah) untuk penerbitan pers daerah.

Berdasarkan ketentuan baru itu, gambaran pers Terpimpin tampak sebagai berikut: *Suluh Indonesia* (PNI) dengan delapan afiliasi, *Duta Masyarakat* (NU) dengan tujuh afiliasi, *Harian Rakyat* (PKI) dengan empat belas afiliasi, *Banteng Rakyat* (Partindo, tidak terbit) dengan lima afiliasi, *Api Pancasila* (IPKI) dengan tiga afiliasi, *Nusa Putra* (PSII) dengan empat afiliasi, dan *Fadjar Baru* (Perti) dengan satu afiliasi.

Partindo tidak mempunyai harian resmi, tetapi dua surat kabar berafiliasi padanya. Muhammadiyah menerbitkan harian *Mertju Suar* dan pada bulan Juli lahir

(23). Tribuana Said. *Indonesia Dalam, op. cit.* hlm. 134.

Kompas. Sebelumnya, telah terbit harian *Angkatan Bersenjata* sejak tanggal 25 Maret 1965 di bawah pimpinan Brigjen R.H. Sugandhi dan Letkol Jusuf Sirath. ABRI menerbitkan harian ini untuk menandingi pers PKI.⁽²⁴⁾ Sampai dengan datangnya peristiwa G 30 S/PKI, PKI sulit menguasai pers karena kalangan militer dan agama terus menerbitkan koran-koran baru. Kemunculan koran-koran baru yang anti-PKI tersebut ibarat "patah tumbuh hilang berganti".

24). Tribuana Said, *Sejarah Pers*. *op. cit.* hlm. 150-153.

BAB III

KONFRONTASI INDONESIA - MALAYSIA

Berakhirnya Perang Dunia II (PD II) ternyata berbuah pertikaian di antara negara-negara pemenang mengenai wujud situasi internasional pasca perang. Sejak tahun 1945, situasi dunia ditandai bipolarisasi kekuatan antara Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin dunia Barat di satu pihak dan Uni Soviet sebagai pemimpin dunia Timur di pihak lain. Pertentangan ini meningkat menjadi Perang Dingin pada 1947 dengan corak utamanya konfrontasi antara Blok Barat yang kapitalis di bawah pimpinan AS melawan Blok Timur yang komunis di bawah pimpinan Uni Soviet. Dalam sistem bipolar ini, persekutuan-persekutuan terjadi di sekitar kedua kutub negara adikuasa dan hampir semua negara di dunia membuat orientasi internasional atas dasar konfigurasi-konfigurasi umum kekuatan tersebut. Dalam proses perimbangan kekuatan (*balance of power process*) ini, kelompok-kelompok kekuatan berupaya menghadang kekuatan dan ambisi pihak lawan.⁽¹⁾

Dalam rangka itu, kedua blok senantiasa mengeksploitasi benih-benih pertentangan sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik-konflik regional di berbagai belahan dunia. Sasaran akhirnya ialah merebut dan atau memperluas pengaruh terutama di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki sumber kekayaan alam yang cukup melimpah di samping letaknya yang sangat strategis sehingga baik AS maupun Uni Soviet, dan kemudian RRC, berusaha menguasai atau merebut pengaruh atas negara-negara di kawasan ini.

Kebijaksanaan politik dan strategi-militer AS terhadap Asia Tenggara sejak awal era Perang Dingin bertolak dari asumsi pokok bahwa komunisme adalah suatu

(1). Dr. Lie Tek Tjeng. "Peranan dan Pengaruh Negara-Negara Besar dalam Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara". *Percaturan Politik*.

gerakan ekspansionis yang didalangi Uni Soviet. Karena itu, komunisme dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dan kepentingan negara-negara Barat berikut negara-negara yang berada dalam wilayah pengaruhnya. Untuk menangkai gerakan ekspansi komunis itu, AS memasukkan Asia Tenggara sebagai bagian penting dalam suatu strategi global dari politik pembendungan komunisme internasional.⁽²⁾ Postur kehadiran politik dan militer AS ditingkatkan dan diperbesar, sementara pangkalan-pangkalan militer didirikan di beberapa tempat dari pesisir Samudera Hindia sampai ke pedalaman Jepang. AS juga menjalin hubungan persekutuan dengan sejumlah negara, baik secara multilateral maupun bilateral.⁽³⁾

Di samping faktor eksternal berupa ancaman perkembangan komunisme internasional, pihak Barat juga dihadapkan dengan tuntutan kemerdekaan dan dekolonisasi dari bangsa-bangsa terjajah maupun daerah bekas jajahannya di Asia maupun Afrika. Berusaha mempertahankan daerah jajahan berarti secara politis tidak senafas dengan gerakan dekolonisasi. Betapapun kaya daerah jajahan, secara politis sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat daerah jajahan. Apalagi kalau dilihat dari kepentingan pertahanan dan keamanan, mempertahankan daerah jajahan yang luas dan jauh dari negara induk adalah sangat mahal dalam sistem perang modern. Semua itu pada akhirnya mendesak negara-negara kolonial Barat untuk memerdekakan atau dengan sangat terpaksa memenuhi tuntutan kemerdekaan bekas jajahannya, baik di kawasan Asia maupun Afrika. Inggris yang memiliki daerah jajahan paling luas satu per satu mulai melepaskan daerah-daerah kolonialnya, termasuk Malaya (1957) dan Singapura (1959).

Kesemuanya itu telah menempatkan negara-negara Barat dalam posisi politis defensif. Sebaliknya, perjuangan menuntut kemerdekaan menjadi daya pacu bagi Uni Soviet dan sekutu-sekutunya dalam persaingannya dengan musuhnya dari kubu

(2) W. Bradley dan Mochtar Lubis, *Dokumen-dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri AS dan Asia* (Jakarta: 1991), hlm. 95.

(3) Tribuana Said, *Indonesia Dalam Politik Global Amerika* (Medan: 1984), hlm. 27-33.

AS. Namun situasi ini kurang banyak membawa manfaat menyusul konflik dalam kubu komunis sendiri yang mulai tampak sejak Kongres Partai Komunis Uni Soviet XX di Moskow, 14-25 Pebruari 1956. Dalam kongres itu, Krushev menggariskan tiga kebijaksanaan Uni Soviet: koeksistensi secara damai, kemungkinan dapat dicegahnya perang, dan bentuk-bentuk transisi sosialisme berbagai negara.⁽⁴⁾

Pada 1962, konflik antara Moskow dengan Peking semakin tidak terkendali dan menimbulkan perpecahan gerakan komunis di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagian berorientasi ke Moskow, sebagian ke Peking, dan sebagian lagi mengikuti pola politik Yugoslavia. Gerakan komunis di negara-negara tersebut bahkan mulai sangsi terhadap validitas komunisme dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Semua itu menimbulkan kegoncangan internal komunisme.

Sementara itu, Blok Barat mempunyai persepsi ancaman baru terhadap posisi politik pembendungannya di kawasan Asia Tenggara. Ancaman dari Utara datang dari komunis Vietnam Selatan, sedangkan dari Selatan dari Indonesia. Seperti umum diketahui, sejak awal 1960-an, Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno mulai dikuasai golongan komunis di luar negeri. Dengan demikian, pihak Barat menilai Thailand, negara-negara Indocina yang belum jatuh ke tangan komunis, Malaya, Singapura, Kalimantan Inggris, dan Filipina berada dalam posisi terjepit.

Selain memperkuat pakta-pakta pertahanan seperti ANZUS dan SEATO, pihak Barat mulai mengubah sistem keterlibatannya di Asia Tenggara dari keterlibatan secara fisik dan langsung menjadi keterlibatan secara tidak langsung. Untuk itu, pihak Barat terus mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk lebih mandiri dalam menangani masalah-masalah bersama. Campur tangan berupa bantuan fisik dan militer baru dilakukan apabila terasa sangat dibutuhkan berdasarkan komitmen sebelumnya (*indirect strategy*).

Di tengah situasi politik internasional dan ketegangan regional di kawasan

(4). David Floyd, *Mao Against Krushev, A Short: History of the Sino Soviet Conflict* (New York: 1964), hlm. 32-33.

Asia Tenggara itulah, timbul gagasan pembentukan Federasi Malaysia, gagasan yang sejak awal mendapat reaksi keras, baik dari dalam maupun luar kelima daerah bersangkutan. Gagasan kontroversial ini tidak hanya menjadi pertentangan regional, tetapi meluas menjadi masalah internasional. Indonesia menentang keras gagasan itu sehingga mengantar kedua bangsa serumpun terlibat dalam konfrontasi.

3.1. Gagasan Pembentukan Federasi Malaysia

Siapa yang pertama kali menemukan gagasan pembentukan Federasi Malaysia, sampai sekarang belum ada kesepakatan di antara para ahli. Akan tetapi yang umum diterima ialah bahwa gagasan itu pertama kali muncul dari Lord Brussy, Direktur *British North Borneo Company*. Dialah yang pertama kali mengusulkan kepada pemerintah Inggris untuk mempersatukan tanah jajahan Inggris di Asia Tenggara yang meliputi Kalimantan Utara, Malaya, dan *Straits Settlements* yang meliputi Malaka, Singapura, serta Penang dalam suatu persekutuan yang luas dan besar.⁽⁵⁾

Gagasan itu kemudian dinyatakan secara resmi dan terbuka oleh Perdana Menteri Tengku Abdulrachman. Ketika berbicara di depan para wartawan yang tergabung dalam *Foreign Journalist's Association of South East Asia* di Singapura, 27 Mei 1961, PM Abdulrachman mengemukakan antara lain:⁽⁶⁾

Malaya sebagai bangsa dewasa ini tidak akan dapat berdiri sendiri. Cepat atau lambat harus ada saling pengertian dan kerjasama antara Inggris dan Malaya dan semua rakyat Singapura, Borneo Utara, Brunei, dan Serawak.

Gagasan PM Abdulrachman untuk membentuk Federasi Malaysia didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan strategis-politis berikut. **Pertama**, secara internal, untuk mewujudkan persatuan bangsa Melayu dengan menjalin dan

(5). Arnold C. Brackman, *Southeast Asia's Second Front. The Power Struggler in the Malay Archipelago* (New York: 1966), hlm. 42.

(6). Kementerian Dalam Negeri Malaysia, *Indonesia Intension Towards Malaysia* (Kuala Lumpur: 1964), hlm. 10.

memperkuat kerja sama di bidang politik dan ekonomi. Dengan terbentuknya Federasi, perimbangan penduduk diharapkan dapat diperbaiki dan ditata kembali terutama agar golongan etnis Cina tidak menjadi mayoritas dan terpusat di Singapura serta mendominasi perekonomian nasional Malaya. Perimbangan penduduk ini tidak hanya penting dari segi demografis, tetapi juga dari segi politis-strategis dan pertahanan-keamanan serta ekonomi.⁽⁷⁾

Kedua, dari segi kepentingan politik dikhawatirkan pemerintah pusat Federasi nanti akan banyak dipengaruhi dan didominasi golongan Cina Singapura yang berpotensi dipengaruhi komunisme dan relatif lebih maju dari orang-orang Malaya sendiri. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mayoritas suku Melayu tidak ada pilihan lain kecuali menyeret daerah-daerah Kalimantan Inggris masuk dalam Federasi.

Ketiga, dari segi kepentingan ekonomi, perekonomian Federasi akan lebih kuat dan kokoh. Sebab, Malaya yang kaya akan karet, timah, dan kelapa sawit akan mendapat dukungan dari Singapura yang strategis sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa. Ditambah lagi Kalimantan Inggris (Sabah, Serawak, Brunei) yang terkenal kaya akan minyak buminya.

Keempat, dari segi pertahanan dan keamanan, pembentukan Federasi akan dapat menyederhanakan sistem pertahanan-keamanan. Oleh karena dengan tetap berada dalam lingkungan Persemakmuran dan perlindungan militer Inggris, Federasi dapat dikelola sebagai suatu unit kekuatan yang strategis terutama dalam kerangka politik pembendungan terhadap ancaman komunisme dari Vietnam maupun dari Indonesia.

Inggris dan sekutu-sekutunya dari Blok Barat sangat berkepentingan dengan kawasan Asia Tenggara. Karenanya mereka tentu memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Federasi tersebut dengan beberapa pertimbangan

(7). J.A.C. Mackie, *KONFRONTASI. The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966* (Kuala Lumpur: 1974), hlm. 37.

berikut. **Pertama**, dengan terbentuknya Federasi, Inggris dan sekutu-sekutunya tidak perlu kehilangan daerah-daerah bekas koloninya di kawasan ini karena masih terjalin dalam lingkungan dan ikatan negara-negara Persemakmuran.

Kedua, pembentukan Federasi dapat menjamin kelangsungan berbagai kepentingan Inggris dan Blok Barat pada umumnya. Dari segi ekonomi, daerah Malaya merupakan ladang Inggris untuk tambang timah, minyak, karet, dan kelapa sawit. Di Singapura, Inggris memiliki banyak perusahaan impor yang penting dan strategis, sementara di Brunei hampir seluruh perusahaan minyak tanah adalah milik Inggris.

Dari sudut kepentingan strategi pertahanan dan keamanan, daerah Malaysia merupakan salah satu mata rantai garis pertahanan Inggris yang terbentang dari Inggris melalui Gibraltar dan Aden terus ke Singapura. Sementara dari segi kepentingan politik pembendungan komunisme, Federasi Malaysia dengan Malaya dan PM Abdulrachman yang pro Barat ikut serta dan memegang hegemoni akan menjamin bahwa Federasi akan tetap pro Barat sekaligus dapat membendung komunisme ke Asia Tenggara.

AS sudah sejak awal menyetujui gagasan mengenai Federasi itu. Namun sikap AS kemudian cukup jelas, yakni menghendaki penyelesaian damai dengan dua pertimbangan pokok. **Pertama**, seperti dalam sengketa Irian Barat, upaya diplomatik AS dalam sengketa Malaysia pada dasarnya bertujuan untuk menghindari meletusnya perang besar antara Indonesia dengan Malaysia dan Inggris serta ANZUS di pihak lain. Posisi AS semakin terjepit jika ANZUS dilibatkan karena AS juga bagian dari ANZUS bersama Inggris dan Selandia Baru.

Kedua, AS sangat berkepentingan dengan Indonesia sehingga tidak mungkin mengambil postur keras terhadap Indonesia. Apalagi pemerintahan Soekarno saat itu sudah dipengaruhi komunis. Sebaliknya, mengambil sikap oposisi terhadap Malaysia berarti menempatkan AS berlawanan dengan sekutu-sekutunya

sendiri, khususnya Inggris, Australia, Selandia Baru, dan tentu dengan Malaysia.

Dalam rangka membendung perluasan pengaruh komunisme di kawasan Asia Pasifik dan melihat perkembangan politik di Indonesia di bawah sistem Demokrasi Terpimpin yang cenderung ke arah komunis, bagi Australia dan Selandia Baru memang tidak ada pilihan lain kecuali memihak Inggris dan mendukung Federasi Malaysia. Di satu pihak, kedua negara di selatan ini memiliki ikatan sejarah yang kuat dan dalam dengan induk semangnya, Inggris, dan menjadi anggota *British Commonwealth of Nations*. Di pihak lain, bersama AS, keduanya terikat pakta pertahanan ANZUS sejak 1951. Bagi Australia dan Selandia Baru, ketangguhan dan persekutuan dengan AS dan Inggris sejak PD II tidak perlu diragukan lagi sehingga tidak mengherankan apabila keduanya selalu mengekor pada garis kebijakan kubu Barat, khususnya AS dan Inggris.

Pembentukan Federasi Malaysia ternyata banyak mendapat reaksi keras, baik dari dalam maupun luar kelima daerah bersangkutan. Tantangan reaktif dari dalam umumnya dilakukan secara legal berupa pernyataan-pernyataan anti-Malaysia dan berusaha menggagalkannya. Reaksi keras terutama diperlihatkan Barisan Sosialis Singapura, Partai Rakyat Singapura, dan Partai Buruh. Tantangan paling keras datang dari 36 organisasi buruh Singapura yang menyatakan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme dan masuk Federasi berarti tidak memperoleh kemerdekaan dan tetap menjadi pangkalan Inggris dan AS. Bahkan pertentangan secara illegal dilancarkan oleh rakyat Brunei dan rakyat Kalimantan Utara pada umumnya, menyusul rencana peresmian Federasi Malaysia tanggal 31 Agustus 1963. Mereka menentang keras rencana itu dan mengadakan pemberontakan di bawah pimpinan Azahari, Ketua Partai Rakyat Brunei. Partai Rakyat di bawah Azahari pulalah yang memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962, yang terdiri dari Sabah, Brunei, dan Serawak.

Singapura sejak awal menunjukkan sikap ragu-ragu terutama karena masalah

perimbangan penduduk Cina dan non-Cina menjadi salah satu motif utama pembentukan Federasi, di samping pertimbangan ekonomi. Pada akhirnya hal-hal itu pula yang menjadi pertimbangan pokok bagi Singapura untuk melepaskan diri dari ikatan Federasi dalam tahun 1965.⁽⁸⁾

Sementara kesultanan Brunei merasa kedudukannya lebih rendah dari Malaya karena berada jauh dari kemungkinan menjadi Yang Dipertuan Agong. Padahal Sultan Brunei Sir Umar Ali menginginkan jabatan Yang Dipertuan Agong, begitu pula dengan Malaya.⁽⁹⁾ Di samping itu, seperti halnya Singapura, secara ekonomi, kekayaan minyak bumi kesultanan Brunei dengan deposit-deposit baru yang begitu besar akan lebih banyak tersedot untuk kepentingan pemerintah Federal maupun bagian lain Federasi daripada untuk pembangunan Brunei sendiri.

Selain tantangan dari dalam daerah-daerah bersangkutan, pembentukan Federasi juga mendapat tantangan dari luar, terutama dari Indonesia dan Filipina. Indonesia menentang pembentukan Federasi karena dianggap sebagai proyek Neokolonialisme (Nekolim) Inggris dan Blok Barat pada umumnya yang akan mengepung Indonesia dari arah Utara. Di samping itu, proses pengintegrasian daerah-daerah bersangkutan dilakukan secara tidak demokratis bahkan dipaksakan dari luar.

Lain dengan motif Indonesia, Filipina menentang karena tuntutanannya atas wilayah Sabah tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Inggris sehingga Filipina merasa berhak memperolehnya kembali. Di samping itu, Filipina juga sebenarnya mempunyai rencana tersendiri untuk membentuk suatu persekutuan yang lebih luas dalam bentuk konfederasi yang mencakup Malaya, Kalimantan Utara, Filipina, dan Indonesia. Rencana inilah yang melatarbelakangi gagasan Presiden Macapagal tentang Maphilindo.⁽¹⁰⁾

Oposisi internal serta pertentangan regional terutama yang ditimbulkan oleh

(8). Hidayat Mukmin, *op. cit.* hlm. 89.

(9). Kusumah Hadiningrat, *Sejarah Operasi-Operasi Dalam Rangka Dwikora* (Jakarta: 1971), hlm. 12.

(10). Departemen Luar Negeri RI, *Kumpulan Bahan-Bahan Mengenai Masalah Malaysia*. Jld. I (Jakarta: 1964), hlm. 7.

Indonesia dan Filipina segera mendapat reaksi dari dunia internasional. Di satu sisi, masalah ini merupakan pertentangan antara Blok Komunis dan Blok Kapitalis. Di sisi lain, perbedaan persepsi mengenai substansi masalahnya serta kepentingan yang berbeda dan kurang nyata memunculkan beraneka macam tanggapan dan reaksi dari negara-negara di dunia.

3.2 Konfrontasi Politik

Ketika gagasan Federasi Malaysia dilontarkan oleh PM Abdulrachman, pihak Indonesia belum mempersoalkannya. Hal ini disebabkan karena keterlibatan Inggris dan sekutu-sekutunya belum jelas terlihat. Demikian juga oposisi internal terhadap rencana itu belum menguak ke permukaan sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menyatakan penolakan atau oposisinya. Sementara Indonesia sendiri masih berkonsentrasi penuh pada sengketa Irian Barat.

Sebelum meletusnya pemberontakan di Brunei pada Desember 1962, satu-satunya oposisi terbuka dari pihak Indonesia datang dari PKI yang dikemukakan pada Desember 1961. Pemerintah Indonesia sendiri tidak berani menyatakan oposisi terbuka karena adanya risiko bahwa setiap konfrontasi yang terjadi akan mengundang kecurigaan pada tuntutan atas Irian Barat yang justru menjadi sasaran kepentingan diplomasi AS.⁽¹¹⁾ Sikap oposisi PKI didasarkan pada anggapan bahwa Federasi Malaysia merupakan konsentrasi kekuatan kolonial baru justru pada garis perbatasan Indonesia. Lebih dari itu, Federasi Malaysia dianggapnya sebagai ancaman terhadap kaum komunis karena Federasi merupakan benteng pembendungan komunisme di Asia Tenggara.

Meletusnya pemberontakan di Brunei tanggal 8 Desember 1962, menyusul Proklamasi Negara Kesatuan Kalimantan Utara, segera mendapat sambutan hangat dari PKI, di samping pemerintah dan masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno

(11). Michael Leifer, *op. cit.* hlm. 113.

menanggapi peristiwa di Brunei itu sebagai "**tidak dapat dipisahkan dari Nefos**". Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani mengajak pers untuk memihak rakyat yang tengah berjuang demi kemerdekaannya. Partai-partai politik, terutama PKI dan ormasnya, menambah dan mempertegas desakan mereka. Sementara KASAB Jenderal Nasution mengingatkan seluruh bangsa terhadap ancaman Nekolim di sekitar Indonesia.

Meluasnya oposisi internal maupun eksternal, termasuk pemberontakan di Kalimantan Utara, serta untuk mengakomodasikan situasi dan berbagai kepentingan politik domestik, mendorong Pemerintahan Soekarno melancarkan politik konfrontasi terhadap "Malaysia". Ditambah lagi datangnya tuduhan dari PM Abdulrachman tentang keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan di Kalimantan Utara justru memperhebat agitasi dan kegiatan mobilisasi umum di Indonesia.

Paling kurang terdapat tiga alasan Pemerintahan Soekarno dalam melegitimasi politik konfrontasi terhadap Malaysia. **Pertama**, masalah ancaman secara langsung terhadap wilayah dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia justru karena posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kedua, adanya anggapan kuat bahwa Federasi Malaysia adalah "Proyek Nekolim" Inggris dan sekutu-sekutunya dalam Blok Barat yang bakal mengepung dan mengancam Indonesia dari arah Utara. Di samping mengancam keselamatan negara, isu Nekolim justru sangat bertentangan dengan gagasan Presiden Soekarno tentang pembaruan tatanan kawasan internasional. Dalam pidatonya 11 Juli 1963 di Seskoad Bandung, Presiden Soekarno antara lain mengatakan:⁽¹²⁾

Dibentuknya Malaysia oleh Tengku Abdulrachman dan pihak Inggris bagi kita adalah merupakan konfrontasi terhadap revolusi Indonesia, konfrontasi terhadap keselamatan kita dan terhadap cita-cita yang sejak lama kita rencanakan.

(12). Deplu RI. Kumpulan Bahan-bahan, *op. cit.* jld. I. hlm. 3.

Ketiga, bahwa Malaysia sebagai negara boneka buatan Inggris merupakan suatu dominasi dan eksploitasi terus-menerus atas rakyat daerah bekas jajahan Inggris di Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara. Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio pada tanggal 20 Januari 1963 mengatakan bahwa Malaya telah secara terbuka menjadi antek imperialis dan telah bertindak bermusuhan terhadap Indonesia.⁽¹³⁾

Pada pertengahan Pebruari 1963, Presiden Soekarno secara eksplisit menjelaskan oposisinya terhadap pembentukan Federasi Malaysia:⁽¹⁴⁾

Mengapa kami menentangnya? Karena Malaysia merupakan manifestasi neokolonialisme. Kami tidak ingin mempunyai neokolonialisme di sekitar kami. Kami menganggap Malaysia sebagai pengepungan terhadap RI. Malaysia merupakan produk pikiran dan usaha neokolonialisme. ... Malaysia akan menjamin penyediaan timah bagi imperialis, karet dan minyak untuk imperialis. Untuk alasan ini, kita dengan tekad yang bulat menentang, tanpa syarat apapun, Malaysia.

Lebih jauh, Indonesia memandang Federasi Malaysia sebagai suatu negara yang tidak bersifat representatif dan dipaksakan atau direkayasa untuk kepentingan kolonial. Suatu hasil rancangan pihak Barat untuk mengabadikan kepentingan-kepentingan militer dan ekonomi kolonial di Asia Tenggara, yang pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan peranan kawasan Indonesia.⁽¹⁵⁾

Secara internal, sikap oposisi Indonesia terhadap Malaysia dilatarbelakangi beberapa faktor berikut. **Pertama**, pengalaman nyata bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Dalam pernyataan dukungannya terhadap pemberontakan di Kalimantan Utara, Presiden Soekarno menyerukan:⁽¹⁶⁾

Kami lahir dalam pertempuran. Kami tidak lahir dalam sinar bulan purnama seperti bangsa lain. ... Ada bangsa lain, yang tanpa upaya apapun pada pihaknya, diberikan kemerdekaan oleh imperialis sebagai suatu hadiah. Tidak kita, kami berjuang dengan penuh pengorbanan. Kami memperoleh kemerdekaan kami melalui

(13). Deppen RI. *Gelora Konfrontasi Mengganyang Malaysia* (Jakarta: 1964), hlm. 163.

(14). Michael Leifer. *op. cit.* hlm. 116.

(15). J.A. C. Mackie. *op. cit.* hlm. 10.

(16). Michael Leifer. *op. cit.* hlm. 111 (Pidato Soekarno 19-21-1962).

perjuangan mati-matian yang tak ada bandingannya di dunia ini.

Kedua, sebagai manifestasi dari sikap keras anti-imperialisme dan kolonialisme, suatu kepercayaan terhadap kemampuan kekuatan sendiri dari pemerintahan Soekarno yang oportunistik dan penuh semarak, serta memperlihatkan ambisi regional dan peranan Indonesia sebagai pembaharu tatanan dunia baru. Dalam amanatnya kepada para panglima Kodam seluruh Indonesia tanggal 17 Maret 1964, Presiden Soekarno menjelaskan oposisinya:⁽¹⁷⁾

Pendek kata, saudara-saudara, kita punya posisi tidak mengakui Malaysia. ... Ini saya harap saudara-saudara camkan benar-benar: Revolusi kita ini ditakuti. ... Mereka (maksudnya kaum imperialis) melihat Revolusi Indonesia itu bukan main *impac*-nya, *influence*-nya kepada *Asian-African Nations*. Revolusi Indonesialah yang menggerakkan, mempersatukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan di Amerika Latin .. yang menggerakkan seluruh *new emerging forces* di dunia ini ... Oleh karena itu mereka buat Malaysia.

Politik konfrontasi bahkan disenafaskan dengan kebijaksanaan merebut Irian Barat sebagaimana terungkap dalam pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1965:⁽¹⁸⁾

Kita melaksanakan Trikora tanpa '*collapse*', tanpa runtuh dan hasilnya pun gilang-gemilang. Kita melaksanakan Dwikora tanpa '*collapse*', tanpa runtuh, dengan hasilnya ... sekarang Malaysia sudah lebih dari 50% hancur berantakan.

Ketiga, unsur oportunisme pemerintah Soekarno dalam membangkitkan kembali suatu cara kebijaksanaan luar negeri yang dapat memenuhi kebutuhan politik dalam negeri. Diterapkannya kembali politik konfrontasi telah memungkinkan Soekarno mampu mempertahankan keseimbangan kekuatan politik segitiga dengan merebut momentum revolusi simbolik yang kian menyusut setelah sengketa Irian Barat berakhir.

(17). Yayasan Pendidikan Soekarno, *Bung Karno dan ABRI*, Kumpulan Pidato 1950-1966 (Jakarta: 1989), hlm. 81.

(18). Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1965.

Akhirnya, dapat dikemukakan bahwa gelora konfrontasi terhadap Malaysia juga sangat dipengaruhi oleh semakin menguatnya dominasi kaum komunis dalam pemerintahan Soekarno sejak 1962. Munculnya anggapan bahwa Federasi Malaysia adalah proyek Nekolim yang mengancam keselamatan Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep pemikiran strategis PKI. Demikian pula seluruh kegiatan untuk "mengganyang Malaysia" secara implisit terkandung dalam skenario dan strategi PKI dalam rangka kudeta 30 September 1965.

3.3 Konfrontasi Ekonomi dan Militer

Meningkatnya ketegangan antara pemerintahan di Jakarta dan Kuala Lumpur yang sesewaktu bisa meledak menjadi perang terbuka, mendorong berbagai pihak, khususnya PBB dan Filipina, untuk membawa kedua belah pihak yang bersengketa ke meja perundingan. Indonesia pada hakikatnya tidak berkeberatan dengan penyelesaian damai, seperti diungkapkan sendiri oleh Presiden Soekarno:⁽¹⁹⁾

Indonesia bukan tidak mengutamakan penyelesaian secara damai, bukan tidak suka kepada perundingan, apalagi mengenai persoalan bangsa Melayu dengan bangsa Melayu sendiri.

Pada tanggal 31 Mei 1963 berhasil diadakan pertemuan puncak di Tokyo antara Presiden Soekarno dan PM Tengku Abdulrachman. Pertemuan kedua pemimpin negara itu menghasilkan persetujuan bahwa kedua negara kembali kepada *Spirit of Malayan Indonesian Treaty of Friendship* dan mengakhiri permusuhan.

Pendekatan lebih lanjut dilakukan di Manila pada tanggal 7 Juni 1963 antara Menlu RI Subandrio, Wakil PM Malaya Tun Abdul Razak, dan Emmanuel Pelaez dari Filipina.

Rekomendasi dari Pertemuan Tingkat Menteri ini kemudian dibicarakan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Manila tanggal 30 Juli 1963 antara Presiden

(19). Departemen Penerangan RI. *Gelora Konfrontasi*, *op. cit.* hlm. 276.

Soekarno, PM Tengku Abdulrachman, dan Presiden Macapagal dari Filipina.

Konferensi Manila ini menghasilkan tiga kesepakatan pokok. **Pertama**, menyetujui rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri sebelumnya. **Kedua**, PM Abdulrachman bersedia menanggukhan Proklamasi Federasi Malaysia tanggal 31 Agustus 1963 -sebagai hasil keputusan bersama antara Malaya dan Inggris- sambil menunggu hasil penyelidikan pihak PBB tentang sikap rakyat Kalimantan Utara mengenai Federasi Malaysia. **Ketiga**, menyambut baik gagasan Presiden Macapagal untuk membentuk sebuah federasi antara sesama rumpun Bangsa Melayu yang dikenal dengan MAPHILINDO.⁽²⁰⁾

Tetapi usaha untuk mengadakan penyelesaian secara damai menjadi terganggu ketika pihak Malaya dan Inggris mengumumkan Proklamasi Federasi Malaysia (*Malasyain Day*) akan dilakukan pada 16 September 1963, apapun hasil penyelidikan PBB di Kalimantan Utara. Indonesia menganggap keputusan sepihak itu "tidak demokratis, bertentangan dengan Deklarasi Manila, serta bertentangan dengan resolusi PBB tentang dekolonisasi". Atas dasar itu, Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengakui Malaysia dan selanjutnya membuka babakan baru dalam konfrontasi terhadap Malaysia.

Sejak tanggal 16 September 1963 itulah, secara formal dimulai konfrontasi Mengganyang Malaysia.⁽²¹⁾ Sebelum Federasi Malaysia diproklamirkan tanggal 16 September 1963, konfrontasi mengambil bentuk berupa pernyataan-pernyataan dan demonstrasi yang lebih mengandung aspek politis. Pada hari Federasi diproklamasikan, terjadi demonstrasi besar-besaran terhadap Kedutaan Besar Malaya dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta maupun di Filipina. Di Jakarta, gedung Kedutaan Besar Inggris mengalami kerusakan berat.

Tindakan balasan terjadi di Kuala Lumpur ketika gedung dan lambang

(20). Deppen RI. "Dokumen Persetujuan Manila", *Gelora Konfrontasi*, *op. cit.* hlm. 71-79.

(21). Kusumah Hadiningrat, *op. cit.* hlm. 33.

Bhinneka Tunggal Ika dirusak oleh para demonstran pada keesokan tanggal 17 September. Pada hari yang sama, Kuala Lumpur memutuskan hubungan diplomatik dengan Jakarta dan Manila. Situasi bertambah panas ketika tanggal 18 September kembali terjadi kontrademonstrasi di depan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Bahkan kali ini bukan hanya kedutaan Inggris yang menjadi sasaran para demonstran, tetapi meluas sampai merusak rumah, kendaraan, dan harta benda milik warga negara Inggris. Buruh Indonesia yang sudah masuk dalam pengaruh PKI melakukan aksi sepihak mengambilalih beberapa perusahaan dan perkebunan milik Inggris. Sementara penyusupan pasukan ke daerah lawan diintensifkan melalui darat, laut, dan udara. Konfrontasi politik kini meningkat kepada konfrontasi ekonomi dan militer.

Untuk mengatasi aksi sepihak yang dilancarkan kaum buruh Indonesia, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1963 yang berisi ketentuan bahwa semua perusahaan bukan tambang minyak yang telah diambilalih kaum buruh dalam rangka konfrontasi diserahkan kepada menteri menurut bidangnya masing-masing, sedangkan pengawasan umum dilakukan Menteri Pertama.

Konfrontasi ekonomi makin dipertegas ketika Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengeluarkan Surat Perintah Nomor 1/KOTOE Tahun 1963 pada tanggal 21 September 1963. Isinya memerintahkan supaya memutuskan semua hubungan lalu lintas perekonomian dengan daerah-daerah yang menamakan diri "Malaysia" terutama Malaya dan Singapura yang melaksanakan "dedolarisasi" di Kepulauan Riau. Sementara Belawan, Makasar, dan Tanjung Priok ditetapkan sebagai *free trade zone* dan Sabang sebagai *free port*. Dalam Keterangan Pemerintah "Pengganyangan 'Malaysia' Program Aksi Pemerintah" tentang program Kabinet Kerja di depan DPR-GR tanggal 11 Desember 1963 dikatakan⁽²²⁾

(22). Departemen Penerangan RI, *Gelora Konfrontasi*, *op. cit.* hlm. 165.

Oleh karena itu Pemerintah harus melakukan "Program Aksi" (*Program of action*) untuk menghadapi meningkatnya tantangan-tantangan ekonomi yang sebenarnya bersifat Ekonomi Perjuangan (*welfare-economy*) dalam rangka pengganyangan "Malaysia".

Malaysia dengan dukungan Inggris juga melancarkan konfrontasi ekonomi dengan Indonesia. Bersamaan dengan itu, penyusupan pasukan dan kegiatan-kegiatan militer semakin ditingkatkan sehingga bentrokan bersenjata tidak dapat dihindari. Perkembangan demikian mendorong Presiden Soekarno untuk memperluas dan memperhebat politik konfrontasinya dalam bidang militer. Dalam pidatonya tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) sebagai alternatif terakhir untuk menggagalkan Federasi Malaysia.

Namun dibandingkan dengan konfrontasi di bidang politik dan ekonomi, konfrontasi di bidang militer mengambil skala yang lebih terbatas. Alokasi kesatuan militer secara besar-besaran tidak dilakukan, kecuali penempatan pasukan-pasukan reguler secara terbatas di sepanjang perbatasan. Justru yang paling aktif dan besar-besaran dalam aksi pengganyangan proyek Nekolim Malaysia dilakukan oleh para sukarelawan. Jumlah para sukarelawan ini saja sudah mencapai 21 juta orang pada saat Dwikora diumumkan tanggal 3 Mei 1964. Mobilisasi para sukarelawan inilah yang diinginkan PKI dalam kerangka strategi politik dan militernya, yaitu sebagai sebuah kekuatan nasional yang ditampung dalam Angkatan V yang sejak semula mendapat tantangan dari TNI-AD.

PKI melihat konfrontasi sebagai suatu kesempatan untuk menempatkan diri dalam arus agitasi nasionalis. Sifat patriotik revolusionernya makin ditonjolkan dan diperkeras dengan ingar-bingar pernyataan anti-Barat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Soekarno berulang kali menegaskan pentingnya Nasakom agar tercapainya kesatuan Nasional dalam menghadapi ancaman musuh Nekolim Malaysia.

Dalam pada itu, politik konfrontasi dalam kenyataannya tidak mendapat dukungan penuh dari dalam Indonesia sendiri. Berbeda dengan perjuangan merebut

Irian Barat, dalam konfrontasi dengan Malaysia tidak semua potensi di dalam negeri bersatu-padu mendukung kebijaksanaan pemerintah. Walaupun secara nasional tampak seluruh potensi domestik bersatu, pada kenyataannya ada kelompok-kelompok tertentu dalam negeri yang menentang dan meragukan keberhasilan kebijaksanaan pemerintah tersebut. Walaupun mereka tetap setia kepada pemerintah, mereka sebenarnya **menentang secara diam-diam** politik konfrontasi itu, terutama beberapa kalangan di lingkungan TNI-AD.⁽²³⁾ Dalam kelompok ini termasuk pula para dosen, staf dan ilmuwan militer pada Seskoad, Perwira Tinggi dan menengah pada Staf Umum TNI-AD.

Michael Leifer menjelaskan oposisi di dalam Indonesia sendiri sebagai berikut:⁽²⁴⁾

.. perlawanan diam-diam terhadap konfrontasi jelas ada dengan alasan adanya kekeliruan dalam penentuan prioritas dan keraguan atas efektivitasnya. Perlawanan seperti ini tak mempunyai kesempatan untuk menyatakan diri kepada masyarakat umum sampai perubahan fundamental berlangsung dalam suasana politik dalam negeri Indonesia.

Dalam pelaksanaan politik konfrontasi, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Indonesia akan melaksanakan kebijaksanaan konfrontasi terhadap Malaysia dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi menghindari rujukan pada dimensi militer. Dalam kenyataannya, yang paling dominan dalam proses konfrontasi adalah dimensi politik. Pengerahan tenaga sukarelawan lebih memperlihatkan dimensi politis daripada militer untuk menunjukkan bahwa proyek Malaysia tidak hanya ditentang oleh lembaga-lembaga formal seperti pemerintah dan ABRI tetapi juga oleh rakyat.

Di samping pertimbangan politis, dari segi kekuatan militer, Indonesia tentu sulit mengimbangi kekuatan pasukan lawan. Apalagi ABRI sendiri masih membutuhkan masa konsolidasi setelah perjuangan berat merebut Irian Barat selesai.

(23). Catatan kaki dari Hidayat Mukmin, *op. cit.* hlm. 159-160.

(24). Michael Leifer, *op. cit.* hlm. 111.

Walaupun demikian, ABRI tetap loyal kepada kebijaksanaan Dwikora yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Soekarno. TNI-AD berharap agar pemerintah berusaha memaksimalkan kemampuan diplomasinya untuk memberi kesempatan yang cukup bagi ABRI mengkonsolidasi diri, terutama mencari bantuan senjata dan peralatan. Senjata-senjata kemudian datang dari Uni Soviet seperti kapal perang, pesawat tempur MIG, pesawat antikapal selam, dan helikopter turbo prop.⁽²⁵⁾ Namun perlu dicatat bahwa di tengah gelora konfrontasi, di kalangan pimpinan dan intelejen TNI-AD selalu tampak waspada bahkan mencurigai perilaku politik PKI.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya perang terbuka, pemerintah membubarkan Komando Operasi Tertinggi Pembebasan Irian Barat melalui Keppres RI No. 142 Tahun 1963. Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 1963, dibentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI) untuk menggagalkan Federasi Malaysia. Langkah Pemerintah dipertegas lagi melalui *regrouping* Kabinet Kerja dengan Tiga Program utama, yaitu pengganyangan Malaysia, sandang-pangan, dan keamanan.

Untuk mengkoordinasi operasional satuan-satuan ABRI di bawah satu kesatuan komando, dibentuklah Komando SIAGA berdasarkan SK Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 23/KOTI/1964 tanggal 16 Mei 1964. Dengan meningkatnya pelaksanaan Dwikora sejalan dengan semakin meruncingnya konfrontasi, maka dikeluarkan Kepres PANGTI ABRI/KOTI/KOTOE Nomor 52/KOTI/1964 tanggal 14 September 1964 dan pembentukan Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah (PEPELRADA). Menyusul kemudian SK Presiden Nomor 9/KOTI/1965 tanggal 28 Pebruari 1965 tentang penyempurnaan organisasi Komando SIAGA menjadi Komando Mandala Siaga (KOLAGA) (Struktur Komando Mandala Siaga lihat bagan pada **lampiran 8**)

Dengan semakin meningkatnya konfrontasi di segala bidang, pemerintah mengadakan perubahan organisasi KOLAGA dari organisasi fungsional menjadi

(25). Kusumah Hadiningrat, *op. cit.* hlm. 32-39.

sistem komponen. Dengan ini, seluruh Angkatan Perang, baik di bidang ofensif maupun defensif, dapat dikerahkan secara intensif, tegas, cepat, dan tepat. Perubahan ini dikeluarkan tanggal 21 Oktober 1965. Ini dilakukan karena sejak meletusnya G.30.S/PKI praktis seluruh perjuangan dalam rangka konfrontasi memperlihatkan kekendoran.

Kesiap-siagaan kemudian semakin ditingkatkan ketika Kepala Staf KOTI Letjen Soeharto, setelah menerima perintah dari Presiden Soekarno, memaklumkan pembubaran Badan Tertinggi KOTI untuk kemudian diganti dengan Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) dengan Presiden Soekarno sebagai Panglima Besarnya. Letjen Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf KOGAM yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Besar ABRI/Presiden. Namun dengan tercapainya *Djakarta Accord* tanggal 1 Agustus 1966 mengenai normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia, maka pada tanggal 22 Agustus 1966 KOGAM dibubarkan.

Ada dua hal yang perlu dikemukakan berkaitan dengan konfrontasi militer ini. **Pertama**, mengenai kekuatan pada pihak Indonesia dan pihak lawan. Dari unsur kekuatan manusia, keunggulan ada pada pihak Indonesia. Kekuatan di bidang Angkatan Darat secara kuantitas dapat dikatakan seimbang, sedangkan di bidang Angkatan Laut pihak lawan mengungguli ALRI. Demikian juga di bidang Angkatan Udara, tampak kekuatan pihak lawan unggul di atas AURI, baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena itu, pihak Indonesia berusaha memanfaatkan seefisien mungkin keunggulan di bidang "tenaga manusia" (tenaga sukarelawan) bersama organisasi-organisasi militer yang dibentuk oleh KOTI (Kekuatan dan penggunaan pasukan Indonesia dan pihak lawan lihat **lampiran 9 dan 10**.)

Kedua, tentang kegiatan-kegiatan militer selama konfrontasi. Pihak lawan giat melakukan patroli darat, laut, dan udara dengan menggunakan berbagai jenis dan tipe kapal laut maupun udara, bahkan sampai melintasi wilayah RI. Pihak RI juga melakukan patroli darat, laut, dan udara dengan pesawat TU-16. Beberapa kali

patroli darat bertemu dan terjadi *vuur contract* ringan. Pihak lawan secara teratur melakukan penembakan-penembakan dengan meriam dan mortir ataupun dengan *howitzer* ke wilayah RI di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan Timur. Kegiatan pasukan RI di daerah Kalimantan tertuju pada penumpasan *irregular tropps* yang membangkang terhadap perintah-perintah pihak RI. Pada akhir 1966, kegiatan lawan maupun pihak RI praktis terhenti dengan tercapainya penyelesaian konfrontasi antara RI dan Malaysia. Walaupun konfrontasi sudah dihentikan, operasi-operasi militer pihak RI tetap dilakukan di Kalimantan Utara, terutama bagian Barat melalui operasi TERTIB I dan II dari SATGAS Mendau. Apalagi, kebanyakan unsur-unsur "*irregular-troops*" ini terdiri dari pasukan yang pro-komunis.

BAB IV

KONFRONTASI DALAM PANDANGAN PERS

Dalam bab ini diuraikan bagaimana pandangan pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia sebagai obyek penelitian akan dipilah-pilah, atas sub-sub tema berdasarkan beberapa data & isu pokok mengenai konfrontasi, baik secara internal maupun eksternal. Sementara pembahasannya tetap mengikuti urutan kronologis. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini secara berturut-turut meliputi tiga sub-tema utama.

Pertama, mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia dengan beberapa isu penting seperti keterlibatan pihak Inggris (Nekolim) ditambah AS, Australia, dan Selandia Baru; motif yang melatarbelakangi munculnya gagasan Federasi; dan prosedur atau jalur diplomasi yang ditempuh, baik oleh Malaya-Inggris maupun Komisi "referendum" PBB.

Kedua, politik konfrontasi "Ganyang Malaysia" yang terbagi lagi menjadi konfrontasi politik dan konfrontasi ekonomi serta militer. Beberapa isu penting yang menyertai politik konfrontasi ini antara lain pemberontakan rakyat di Kalimantan Utara, sikap dan postur keterlibatan Inggris dan sekutu-sekutunya yang makin besar dan keras, politik konfrontasi sebagai bagian dari politik strategi PKI (isu komunisme), sentimen pribadi antara Presiden Soekarno dan PM Tengku Abdulrachman yang seringkali menimbulkan ketegangan dan kegagalan setiap upaya damai.

Ketiga, upaya rujuk kembali yang diprakarsai TNI-AD sebagai antiklimaks peristiwa G 30 S/PKI yang diikuti perubahan mendasar tatanan kehidupan politik di Indonesia. Sub bagian ini kurang mendapat perhatian penulis karena berada di luar periodisasi dan tujuan penelitian. Walaupun demikian, penulis tetap berusaha memperlihatkan benang merahnya, terutama pandangan pers terhadap konfrontasi

setelah kegagalan kudeta yang dilancarkan PKI, disusul dengan upaya rujuk dengan Malaysia yang diprakarsai oleh TNI-AD.

4.1 Gagasan Pembentukan Federasi Malaysia

Ketika gagasan pembentukan Federasi Malaysia dilontarkan pertama kali pada 27 Mei 1961 oleh PM Malaya Tengku Abdulrachman di depan *Foreign Journalists Association* di Singapura, pihak Indonesia belum memberikan perhatian serius. Pemberitaan di media massa juga menunjukkan hal yang sama, bahkan hampir semua surat kabar atau pers Indonesia memasukkan berita tersebut bukan pada halaman pertama dan hanya berupa berita pendek pada salah satu kolom kecil. Karena itu, tidak mengherankan kalau awal peristiwa bersejarah itu luput dari ulasan atau tinjauan mendalam pers Indonesia dalam tajuk rencananya.

Tetapi setelah diketahui bahwa gagasan Federasi itu merupakan ciptaan Kuala Lumpur-London, reaksi pihak Indonesia segera menguak di berbagai media massa di Indonesia. *Harian Rakyat* dalam rubrik "**Tinjauan Luar Negeri**" edisi 22 Oktober 1962 menulis:

Mengapa PM Abdulrachman yang dulu menentang bergabungnya Singapura dengan persekutuan Tanah Melayu justru menjadi penganjur pertama pembentukan Federasi Malaysia? Inggris, memang ingin terus memimpin kekuasaan politik dan militer atas Singapura dan Borneo Inggris. Tetapi karena pengawasan atas kehidupan politik di Singapura makin sulit, Inggris memutuskan untuk menguasainya melalui tangan lain ... yang pro-Inggris di Persekutuan Tanah Melayu. ... Tengku mendesak Inggris supaya dianeksasinya secara simultan wilayah-wilayah Singapura dan Kalimantan.

Surat kabar revolusioner milik PKI itu dalam "**Editorial**" edisi 1 November 1962 menyambut pergolakan di Sabah, Brunei, dan Serawak, menuntut kaum imperialis untuk tidak mencegah kemerdekaan daerah-daerah itu. Selain mengecam kaum imperialis, *Harian Rakyat* dalam edisi yang sama menunjukkan dominasi kaum komunis di Indonesia yang anti-imperialis:

... Kita tidak bisa bersikap lain selain menyambut pergolakan itu (Sabah) karena wataknya yang anti imperialis dan untuk kemerdekaan nasional. ... karena di Malaya berbagai kekuasaan-bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga pertahanan -masih di tangan kaum imperialis, maka di Indonesia bukan saja kaum komunis, tetapi pun kaum Nasionalis, kaum Islam progresif, dan lain-lain menginginkan Malaya benar-benar merdeka penuh dulu, sebelum memikirkan tentang "Malaysia" atau "ASA" atau lain-lainnya. Tidak ada kekuatan apapun - setan-setan pun tidak - yang bisa mencegah kemerdekaan Sabah, Brunei, dan Serawak!"

Menanggapi anjuran harian *Malayan Times* supaya pemerintah dan rakyat Indonesia tidak campur tangan dalam persoalan Malaysia, harian *Suluh Indonesia* (SI) yang membawa suara PNI dalam "**Tajuk Rencana**" edisi 8 November 1962 menyatakan sikapnya:

Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio belum lama berselang menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah mempunyai klaim terhadap persoalan Malaysia. Demikian pula tokoh politik penting, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo dalam pernyataannya tegas-tegas menekankan tidak ingin campur tangan mengenai Malaysia.

Oleh karena itu maka kita anggap tidak pada tempatnya apabila "*Malayan Times*" menganjurkan kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tidak campurtangan dalam persoalan Malaysia. ... Pemerintah dan rakyat Indonesia tidak pernah berniat untuk ikut-ikutan memasuki persoalan rumah tangga oranglain. Akan tetapi di samping itu, haruslah pula disadari bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadap setiap perkembangan di sekitar rumah tangganya, justru karena apa yang akan dinamakan Malaysia, langsung berbatasan dengan Negara Indonesia.

Reaksi dan posisi Indonesia terhadap Malaysia semakin keras dan terbuka menyusul pemberontakan rakyat Kalimantan Utara yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 8 Desember 1962. Dalam edisi 10 Desember 1962, *Harian Rakyat* menulis dalam editorialnya:

... Apapun sifat pemberontakan ini, ia adalah suatu tamparan yang keras terhadap politik Malaysia yang begitu getol dipropagandakan

dan dipelopori Tengku Abdulrachman dari Malaya. Ini membuktikan bahwa gagasan Malaysia - yang seperti diketahui untuk mewujudkan neokolonialisme - sama sekali tidaklah populer seperti yang hendak dibayangkan oleh Tengku. Di pihak lain, kejadian di Kalimantan Utara itu mendemonstrasikan bahwa sistem kolonialisme-imperialisme itu sesungguhnya sangat bobrok dan bahwa rakyat pada hakekatnya tidak pernah diam atau menghentikan perjuangan untuk menghancurkannya.

... Sebagai tanah jajahan adalah wajar bahwa penduduk negeri ini mengharapkan bantuan dari semua 'the new emerging forces'. Dan sebaliknya adalah kewajiban luhur dari semua 'kekutan yang sedang tumbuh' itu untuk memberikan bantuannya.

Mengutip pidato Presiden Soekarno pada HUT ABRI 5 Oktober 1962 dan Ketua CC PKI D. N. Aidit di depan Kongres Nasional ke-7 PKI mengenai usaha-usaha Nekolim mengepung RI dari segala penjuru, *Harian Rakyat* dalam Editorial tanggal 11 Desember menghimbau:

Sudah waktunya, dalam hubungan ini, pemerintah dan rakyat Indonesia menyatakan sikapnya. Dan sikap itu, sebagaimana tugasnya pemerintah dan rakyat Indonesia menentang imperialisme dan neokolonialisme, demikian pula seharusnya ketegasan kita membela perjuangan rakyat di Kalimantan Utara.

Harian Duta Masyarakat yang dikenal sebagai pembawa suara NU menyindir Inggris sebagai singa yang sudah hampir sirna sifat kesingaannya yang megah itu mengalami pukulan beruntun. Salah satu tamparan keras justru datang dari rakyat Brunei yang sejak tahun 1888 menjadi *a protected sultanete*. Dalam "**Induk Karangan**" edisi 11 Desember 1962, harian *Duta Masyarakat* mengungkapkan motif pembentukan Federasi Malaysia dan sikapnya terhadap pemberontakan rakyat di Kalimantan Utara:

Kenapa Inggris menyukai Brunei? Mudah saja soalnya. Brunei menduduki tempat kedua dalam produksi minyak bumi setelah Kanada di dalam lingkungan negara persemakmuran Inggris. ... Belum lagi dihitung penghasilan dari karet alam. Jelaslah dengan demikian, mengapa Inggris berdiam di situ, membelanya dengan sekuat tenaga, memakaikan baju kolonialisme di bawah istilah '*protected sultanete*'.

Sebagai bangsa yang cinta kemerdekaan dan berkewajiban

membela bangsa-bangsa terjajah, kita menganggap tiap perlawanan adalah perlawanan yang benar. Tidak ada perlawanan menentang penjajahan yang tidak benar. Kamus lain tidak ada.

Dua hari setelah pernyataan sikap demikian itu, giliran PM Abdulrachman yang diserang oleh *Duta Masyarakat*. Harian ini dalam induk karangan edisi 13 Desember 1962 berjudul "Malaya Keliru", menulis:

PM Tengku Abdulrachman sepanjang yang kita tahu bukanlah seorang Inggris, atau sekurang-kurangnya lebih mirip seorang melayu daripada seorang Inggris. Dan yang tidak kurang pentingnya ialah dia seorang muslim, yang sedikit banyak mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Tapi, tindakan-tindakannya yang condong untuk menumpas revolusi kemerdekaan di Brunei, keputusannya untuk mengirim bala bantuan polisi Malaya untuk menghambat orang yang mau merdeka, sangat membikin pikiran kita susah dan kacau. Hampir-hampir tak tampak oleh mata kita watak kemelayuan dan kepatriotikan muslimnya yang mesti pro kepada kemerdekaan, dan bukannya pro kepada penjajahan.

Dalam rubrik "Tinjauan Luar Negeri" edisi 15 Desember, harian ini juga mengkritik cara kerja Komisi Bersama Inggris-Malaya pimpinan Lord Cobbold yang telah mengambil keputusan mendukung gagasan pembentukan Federasi Malaysia Raya tanpa referendum atau cara lain yang dapat memberi gambaran tentang aspirasi rakyat di daerah-daerah yang akan disatukan dalam Federasi. Dalam rubrik yang sama, *Duta Masyarakat* mempertegas sikapnya soal Brunei:

Kita pun tidak bisa bersikap lain kecuali menyokong hasrat rakyat Brunei untuk merdeka dan mendirikan negaranya sendiri yang bebas dari ikatan macam apapun. Tegasnya, hendaknya pertamanya persoalan yang menyangkut nasib seluruh rakyat Brunei dikembalikan kepada rakyat Brunei sendiri.

... Berbicara soal berfaedah atau tidaknya Federasi buat Brunei bukanlah Komisi Bersama Inggris-Malaya, dan bukan pula tuan Lord Cobbold atau pun tuan Duncan Sandys, dan jelas bukan pula tuan Tengku Abdulrachman. ... pembentukan Federasi Malaysia itu sama artinya dengan proklamasi perampasan kedaulatan rakyat Brunei.

Duta Masyarakat menyatakan dukungannya atas sikap Rasjid Lukman, anggota Kongres Filipina, yang menawarkan 30.000 sukarelawan muslim Filipina untuk membantu perjuangan kemerdekaan kaum muslim Brunei. Harian ini berpendapat bahwa muslimin di manapun ibarat satu tubuh yang bulat. Jika satu merasa sakit, yang lain dibuat tidak tenteram. Selanjutnya, *Duta Masyarakat* dalam induk karangan edisi 18 Desember 1962 di bawah judul "Solidaritas Muslim" menyatakan:

Sikap Rasjid Lukman satu tanda yang jelas bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap menghadapi perang antara yang mau merdeka dan yang tidak mau orang lain merdeka... Muslimin Indonesia tidak punya kesulitan apa-apa dalam melihat persoalan yang terang-benderang ini. Kita percaya, begitu pula muslimin Malaya.

Sebagai alat revolusi, harian *Suluh Indonesia (Sulindo)* menyatakan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Kalimantan Utara. Harian PNI ini sependapat dan sangat mendukung himbuan Wampa/Menteri Penerangan Dr. Roeslan Abdulgani supaya pers Indonesia berpihak kepada rakyat yang berjuang membebaskan diri dari penderitaan dan penjajahan. Dengan mengacu pada penegasan Presiden Soekarno bahwa gerakan rakyat Kalimantan Utara tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Nefos, harian ini mengingatkan setiap alat revolusi, termasuk pers sosialis Indonesia, supaya bersama-sama membasmi musuh-musuh revolusi. Salah satu di antaranya ialah kolonialisme dan imperialisme. Dalam Tajuk Rencananya tanggal 13 Desember 1962, *Sulindo* lebih jauh menyatakan:

Dalam hubungan ini kita mempunyai keyakinan penuh bahwa perjuangan rakyat Kalimantan Utara dengan bantuan seluruh kekuatan yang anti penjajahan, akan mendapat kemenangan... Demikianlah maka kita ucapkan selamat berjuang kepada rakyat Kalimantan Utara disertai keyakinan, bahwa perjuangannya, dengan bantuan seluruh kekuatan progresif yang anti-kolonialisme, akhirnya akan mendapat kemenangan.

Dengan judul "Tambah Kalap", Tajuk Rencana *Sulindo* secara tajam dan sirtis menanggapi tuduhan PM Abdulrachman maupun nasihat Wakil Perdana Menteri Malaya Abdul Razak. Abdulrachman menuduh para pemimpin politik Indonesia telah bersikap bermusuhan dengan Malaya yang dikaitkan dengan pergolakan di Brunei. Sementara Abdul Razak "memberi nasihat" kepada rakyat Indonesia agar tidak mendukung pergolakan di Kalimantan Utara karena pergolakan itu merupakan "pendurhakaan" terhadap Sultan. Lebih jauh, tajuk rencana itu menyatakan:

Berkenaan dengan ini, kita ingin memperingatkan kepada pemimpin-pemimpin Negarawan Malaya untuk lebih menginsyafi bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Utara adalah perjuangan rakyat yang cinta kemerdekaan. Dalam menghadapi kenyataan demikian, rakyat Indoensia sesuai dengan panggilan revolusi ada di samping rakyat Kalimantan Utara... bukan saja karena solidaritas Asia-Afrika, tetapi karena panggilan revolusi... menghancurkan Kolim dengan segala bentuknya.

Harian Rakyat dalam "Editorial" edisi 22 Desember 1962 mem bakar semangat revolusioner rakyat Indonesia dalam menyongsong Rapat Umum keesokan harinya. *Harian Rakyat* mengutip pidato DN Aidit di Cianjur yang menyatakan:

Ketahuiilah, revolusi Kalimantan Utara adalah bantuan besar kepada rakyat Indonesia dalam menggagalkan gagasan Inggris-Tengku Abdulrachman mengenai Malaysia... kita harus berterima kasih kepada rakyat Kalimantan Utara, dan sebagai buktinya kita harus memberikan apa yang ada pada kita untuk membantu perjuangannya."

Sikap rakyat Indonesia yang memihak revolusi Kalimantan Utara, menurut HR, adalah suatu prinsip yang sesuai dengan Manipol seperti ditandaskan oleh Presiden Soekarno di Surabaya: "Berkianatlah terhadap sumpah kita jika kita tidak membantu Revolusi Kalimantan Utara". Pada akhir editorialnya itu, HR menyerukan:

Mari kita tunjukkan, kita buktikan kesetiakawanan kita terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dengan mensukseskan, menggelorakan rapat umum setiakawanan rakyat Indonesia yang diadakan besok pagi. Siap siagalah membantu Revolusi Rakyat Kalimantan Utara.

Dalam Editorial edisi akhir tahun, 31 Desember 1962, HR menegaskan bahwa kebangkitan rakyat Kalimantan Utara merupakan salah satu pilar dari kekuatan baru yang sedang tumbuh di dunia (Nefos):

Kita merebut Irian Barat untuk memperkuat '*the New Emerging Forces*'. Kita membantu Revolusi Rakyat Kalimantan Utara untuk memperkokoh '*the New Emerging Forces*'. Kita perkuat persahabatan kita dengan kubu sosialis untuk memperkuat '*the New Emerging Forces*'. Inilah jalan untuk menuju ke kemenangan.

Pertentangan internal, baik secara legal maupun ilegal, yang berkaitan dengan gagasan pembentukan Federasi Malaysia mendapat sorotan tajam dari *Duta Masyarakat*. Selain datang dari rakyat Kalimantan Utara, tantangan itu juga datang dari PM Singapura Lee Kuan Yew terutama mengenai politik partai UMNO yang dipimpin Tengku Abdulrachman dan Razak yang cenderung memojokkan warga keturunan Cina. Harian ini juga mengecam tindakan tak terpuji yang dilakukan PM Abdulrachman yang dianggap "kelewat terlambat" menggunakan saluran diplomatik mengenai ketegangan di Kalimantan Utara. Pada bagian akhir induk karangan edisi 19 Desember 1962, *Duta Masyarakat* selanjutnya mengungkapkan:

Soalnya sekarang makin jelas, PM Rachman seharusnya dengan cepat menilai kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Posisinya sudah pasti tidak berada di tempat baik, baik di mata rakyat sendiri lebih-lebih di mata negara tetangga yang kelewat banyak dihina.

Dalam rubrik *Tinjauan Luar Negri* pada edisi yang sama, *Duta Masyarakat* menyerang kepribadian PM Abdurachman yang impulsif dan pro-imperialis dengan mengorbankan tali persaudaraan sesama bangsa Asia Tenggara, termasuk kecaman-kecamannya yang terbuka melalui pers terhadap konsepsi-konsepsi nasional Indonesia seperti sistem Demokrasi Terpimpin serta politik bebas dan aktif. Harian *Duta Masyarakat* lebih jauh menulis dalam tinjauannya sebagai berikut:

Kita yakin bahwa adalah kepentingan rakyat Indonesia dan Ma-

laya untuk memelihara persahabatan yang akrab... Tempuhlah jalan-jalan diplomatik yang ada untuk menjernihkan suatu persoalan ... dan jangan ditempuh saluran pers dan publikasi murahan yang kekanak-kanakan.

Saling menyindir dan mengecam antara pemimpin kedua negara kemudian mewarnai perdebatan sekaligus mengaburkan hakikat persoalan sehingga berbagai upaya damai seringkali mengalami kegagalan. Dapat dikatakan bahwa sikap pemerintah dan rakyat Indonesia yang mendukung revolusi rakyat Brunei tetapi tidak diterima oleh "Malaysia" merupakan penyebab sekaligus pembuka tahap konfrontasi politik.

Harian *Sinar Harapan* (SH) tampak lebih positif dan dingin dalam menanggapi berbagai isu yang berkaitan dengan masalah "Malaysia" ini. Surat kabar yang kemudian berafiliasi dengan Parkindo ini (1965) selalu bersikap hati-hati dalam mengemukakan pandangannya. Berbeda dengan *Suluh Indonesia*, harian ini lebih tenang dalam menanggapi anjuran harian berbahasa Inggris *Malayan Times* supaya pemerintah dan rakyat Indonesia tidak campur tangan dalam persoalan Malaysia. Dalam *Tajuk Rencana* dengan judul "Indonesia Terkuat di Asteng" edisi 7 November 1962, *Sinar Harapan* menulis:

Harian berbahasa Inggris *Malayan Times* menerima baik pernyataan Menlu Dr. Subandrio bahwa Indonesia tidak mempunyai klaim kewilayahan atas Brunei... Filsafat politik Indonesia mungkin berbeda dengan tetangga-tetangganya, tetapi hendaknya itu tidak menjadi halangan untuk membina hubungan yang mesra dan saling pengertian.

Sinar Harapan dalam tajuk yang sama juga menunjukkan pengakuan *Malayan Times* terhadap peranan Indonesia di Asia Tenggara sebagai negara terkuat dengan wilayah paling luas dan penduduk paling banyak.

Sikap kehati-hatian *Sinar Harapan* terlihat jelas dalam pandangannya terhadap pemberontakan rakyat Kalimantan Utara. Sikap atau pandangannya selalu berpijak pada dasar hukum atau data yang konkret dan logis. Dengan judul

"Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa", harian itu dalam *Tajuk Rencana*-nya tanggal 13 Desember 1962 berpendapat:

Apa yang terjadi di Kalimantan Utara (Brunei) adalah sesuatu yang pernah dialami oleh Indonesia sendiri; perjuangan menegakkan kemerdekaan dan melawan penjajahan... apa yang terjadi di Brunei tidak dapat lain kita pikirkan dari 'realisasi daripada ide yang termaktub dalam kalimat pertama Pembukaan UUD Negara kita. Kita beri garis bawah ucapan Menpen supaya pers Indonesia berpihak kepada rakyat yang berjuang membebaskan diri dari penderitaan dan penjajahan.

Menurut Subyago-Pr,⁽¹⁾ salah seorang wakil Pemimpin Redaksi *Sinar Harapan* waktu itu, pandangan-pandangan SH memang selalu berusaha menggambarkan situasi umum tentang apa yang sedang terjadi. Di samping supaya tidak salah langkah dan tetap survival, dinamika dan situasi politik pada masa itu, menurut Subagyo, memang sangat rumit dengan intensitas tinggi. Menyinggung pemberontakan rakyat Kalimantan Utara, ia sendiri meragukan originalitas motif dan aspirasi yang tumbuh di balik pergolakan itu:

Konon, Azhari waktu itu 'diterjunkan' ke Kalimantan Utara. Tetapi kami harus memberitakan bahwa ada pemberontakan rakyat di sana dan sudah tentu harus mendukung rakyat yang memberontak. Ini perlu diteliti lebih jauh sebab sifatnya sangat politis dan mahal sekali.

Keterangan Subagyo diperkuat oleh sejarawan berkebangsaan Australia JAC Mackie.⁽²⁾ Menurut Mackie, Azhari dapat diduga menerima bantuan dari PKI dan juga dari Kolonel Suharjo, Panglima Kalimantan Timur (yang kemudian pro-PKI dan melarikan diri ke Peking) dalam melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara.

Seperti juga surat kabar lainnya, kecuali *Harian Rakyat* yang revolusioner progresif, harian *Merdeka* pimpinan B.M. Diah (independen) belum banyak menyoroti masalah "Malaysia" di awal pemunculannya. Perhatian utama masalah

(1). Wawancara dengan Subagyo di Jakarta tanggal 15 Juni 1993, jam 10.10-11.15 (wawancara lisan).

(2). Dalam buku Mackie, JAC. *KONFRONTASI. The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966* (Kuala Lumpur: 1974). hal. 37.

luar negeri waktu itu umumnya masih tertuju pada masalah Sengketa Irian Barat. Namun, dengan meletusnya pemberontakan di Kalimantan Utara, fokus perhatian kini mulai terbagi. Sejak terjadinya pemberontakan di Kalimantan itu, intensitas perhatian *Merdeka* terhadap proyek Malaysia tergolong cukup tinggi. Bobot dan kedalaman analisisnya juga tidak kalah dibandingkan *Harian Rakyat* maupun *Suluh Indonesia* yang revolusioner-progresif.

Tiga hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Kalimantan Utara tanggal 8 Desember 1962, *Merdeka* dengan tegas menyatakan sikapnya dalam Induk Karangan edisi 11 Desember:

Tidak sukar untuk mencari titik di mana rakyat Indonesia seharusnya berdiri. Kita selamanya dan akan tetap berada di barisan 'the New Emerging Forces', berarti kita mendukung revolusi dan perang kemerdekaan yang sedang bergolak di Kalimantan Utara. Kita harus mendukung secara aktif, mengkonsolidir opini umum Asia-Afrika dan jitu terhadap perang kemerdekaan yang sedang bergolak.

Penumpasan pemberontakan rakyat Kalimantan Utara oleh pasukan dan polisi Inggris dikecam dan dilihat oleh *Merdeka* sebagai wujud nyata sikap *arrogan* dan egois dari PM Tengku Abdulrachman. Dengan sindiran tajam, *Merdeka* dalam Induk Karangan edisi 12 Desember menulis:

... pemberontakan di Kalimantan Utara adalah suatu tamparan tangan dewasa bagi kaum kolonialis "Malaysia" dan pipi Abdulrachman... Tengku ternyata bukan hanya pion yang bertindak sesuai dengan keinginan dalang - kaum imperialis - malah mengirim pasukan polisi untuk membunuh bangsa Asia yang sedang bertempur melawan penjajah. Tidak bisa lain bahwa Tengku harus digambarkan sebagai seorang jagoan yang membela kaum kolonialis dengan pelbagai macam kepentingannya.

Menanggapi pernyataan PM Abdulrachman di depan Parlemen Malaya bahwa para pejuang Kalimantan Utara berusaha menyerahkan Kalimantan Inggris kepada Indonesia, *Merdeka* menilainya sebagai ungkapan kepanikan Abdulrachman

sekaligus untuk menutupi "politik busuk" di balik proyek Malaysia. *Merdeka* menyatakan tidak beralasan kalau Abdulrachman menuduh Indonesia sebagai penyulut pemberontakan rakyat di Kalimantan Utara. Sebaliknya, harian ini menuduh PM Malaya itu sebagai ekspansionis yang mulai ketakutan terhadap bayangannya sendiri. *Merdeka* menyatakan hal itu dalam edisi 13 Desember di bawah judul "Maling Berteriak Maling" dari Induk Karangannya:

... Tengku tampaknya makin takut oleh bangsanya sendiri... Tengku Abdulrachman bagaikan maling berteriak maling hanya untuk menutupi "kebusukan Malaysia" yang pada hakekatnya adalah pelaksanaan politik ekspansionis sesungguhnya."

Karena itu pula dalam Induk Karangannya edisi 15 Desember, harian ini menyerukan supaya pihak Indonesia segera membantu secara nyata revolusi rakyat Kalimantan Utara karena merupakan bagian dari revolusi kita.

4.2 Politik Konfrontasi

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia mulai bereaksi setelah tahu bahwa rencana pembentukan Federasi Malaysia didalangi Inggris dan Indonesia menganggapnya sebagai "proyek Nekolim". Sejauh itu, reaksi Indonesia dianggap masih dalam batas yang wajar dan situasi masih cukup terkendali. Apalagi reaksi itu tidak hanya datang dari pihak Indonesia, tetapi juga dari Filipina dan bahkan dari dalam "Malaysia" sendiri.

Akan tetapi ketegangan mulai muncul ketika Indonesia menyambut gembira dan menyatakan dukungannya terhadap revolusi rakyat Kalimantan Utara. Di satu pihak, Indonesia mengecam Kuala Lumpur dan London yang menumpas revolusi rakyat itu dengan kekuatan senjata. Di pihak lain, Pemerintah Indonesia bersedia memberikan bantuan berupa apa saja untuk kemerdekaan rakyat Kalimantan Utara.

Sikap Indonesia itu ternyata tidak diterima oleh pihak Malaya, khususnya PM Tengku Abdulrachman. Perang kata-kata pun sulit dihindari sehingga suasana

politik bertambah panas. Dari sinilah, konfrontasi politik dimulai yang ditandai dengan saling menuding dan mengecam antara pemimpin maupun kekuatan-kekuatan sosial politik kedua negara bertetangga. Dunia pers juga tidak mau ketinggalan.

Sebagai alat revolusi yang cukup ampuh dan strategis, selain memberitakan apa yang terjadi, pers Indonesia juga dengan tegas menyatakan sikap atau pandangannya. Bahkan pers seringkali menjadi penyulut semangat revolusioner dan memperkeruh atmosfer politik maupun hubungan bilateral kedua negara. Di samping menyerang imperialis Inggris dan sikap pro-Barat PM Tengku Abdulrachman yang mengorbankan sesama bangsa Asia Tenggara, pers Indonesia juga tidak mentolerir langkah-langkah yang ditempuh PM Malaya itu, baik dalam menghadapi aspirasi dan pertentangan internal, termasuk pemberontakan di Kalimantan Utara, maupun dari luar seperti Indonesia.

Harian *Suluh Indonesia* edisi 7 Januari 1963 menurunkan Tajuk Rencana dengan judul "Apa tidak perlu tindakan diplomatik". Harian ini menyesalkan keteledoran PM Abdulrachman yang kembali menyerang Indonesia secara publik dan meninggalkan saluran diplomatik. Kalau sebelumnya ia menggunakan media massa, kali ini PM Malaya itu memanfaatkan forum terbuka ketika berpidato di depan rapat raksasa di Kanger, 3 Januari 1963. Harian ini lebih jauh menyatakan:

"Konfrontasi politik antara Indonesia dan Malaya tampaknya memang terus meningkat sejak memasuki tahun 1963. Sikap dan langkah-langkah PM Abdulrachman yang dinilai kurang bersahabat justru semakin memperkuat oposisi Indonesia terhadap Malaysia."

Perang kata-kata terdengar makin keras dan tajam, seperti terungkap dalam Tajuk Rencana *Suluh Indonesia* edisi 24 Januari 1963, "Lanjutkan Politik Konfrontasi":

... Istilah 'gawat' yang dipergunakan PM Tengku Abdulrachman,

bagi kita bukan barang baru... Dan rakyat Indonesia juga merasa tidak menggigil karena pernyataan PM Abdulrachman itu.

Dalam hubungan ini, bahkan kita berpendapat, terhadap Malaya, khususnya terhadap PM Tengku Abdulrachman, perlu dilanjutkan politik konfrontasi seperti yang ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio... sebagai tanggapan semata-mata atas tindakannya yang tidak bersahabat terhadap Indonesia... Presiden/ Pemimin Besar Revolusi pernah menyatakan RI belum pernah merasa terhina seperti apa yang dilancarkan oleh PM Abdulrachman... memang sudah keterlaluan.

Harian *Merdeka* menilai permintaan Inggris yang menghendaki jaminan dari Indonesia untuk tidak melibatkan diri dalam perjuangan rakyat Kalimantan Utara sebagai sesuatu yang tidak beralasan dan memperlihatkan kemunduran pandangan dan langkah Inggris mengenai kemerdekaan dan hak asasi. Lebih jauh, harian ini dalam Induk Karangan edisi 4 Januari 1963 berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Inggris ialah mundur dari Kalimantan Utara dan memberikan hak kepada rakyat di sana untuk menentukan nasibnya sendiri. Dikatakannya bahwa:

Indonesia tidak mungkin disamakan dengan Abdulrachman kepada siapa Inggris bisa mendiktekan segala kemauannya kemudian meminta segala jaminan yang paling maksimal... Ataukah Inggris pun harus pula mendapat malu seperti sejarah membuat malu setiap kaum kolonialis?

Demonstrasi pemerintah Inggris dengan menggelar dan memperbanyak jumlah pasukannya di Brunei telah memperuncing konflik. Pihak Indonesia segera meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi, termasuk ancaman keamanan wilayah Indonesia. Situasi ini sebagian tergambar dalam Induk Karangan *Merdeka* 30 Januari:

PM Malaya sekarang berada dalam keadaan ... yang bisa membahayakan keamanan negara kita... Kita sudah tentu tidak boleh terlambat menghadapi situasi yang tidak tenteram di Kalimantan Utara apalagi setelah Inggris mengirimkan pasukan yang lebih banyak ke sana. Di lain pihak, kita harus lebih teliti menghadapi spion-spion Inggris yang mungkin berkeliaran di tanah air kita terutama sekali kemungkinan merembesnya para kaki tangan Inggris dan Abdulrachman dari Kalimantan Utara ke

Kalimantan wilayah Indonesia. Kita harus lebih cepat dari mereka.

Harian *Merdeka* juga mengecam tindakan Malaya yang menangkap 160 orang pemuka Partai Barisan Sosialis oleh polisi di Singapura akhir Januari. Menurut *Merdeka*, semua itu merupakan usaha pihak Inggris dan Malaya untuk dapat merealisasikan berdirinya "Malaysia" tanggal 31 Agustus 1963.

Sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan Tengku andaikata beliau benar-benar mengabdikan kepada kepentingan rakyat, dan bukan neokolonialisme... 'sepandai-pandai membungkus yang busuk akan berbau juga'.

Menanggapi hal yang sama, *Suluh Indonesia* dalam Tajuk Rencana edisi 6 Februari 1963 menyatakan:

Apa yang dilakukan oleh para penguasa sekarang di Singapura, adalah *typis* yang mencerminkan tindakan-tindakan kolonial seperti pernah dialami oleh rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda. Oleh karena itulah maka rakyat Indonesia di samping mencela penangkapan-penangkapan di Singapura, sekali lagi menekankan kesediaannya untuk membantu rakyat Singapura dan Kalimantan Utara untuk mensukseskan perjuangan menuntut keadilan serta kemerdekaan.

Dalam Tajuk Rencana edisi 7 Februari 1963, *Suluh Indonesia* kembali menyerang PM Abdulrachman yang dinilainya angkuh dan otoriter. Mengacu pada pernyataan Wakil Presiden merangkap Menteri Luar Negeri Filipina Pelaez, —bahwa sumber ketegangan di Asia Tenggara adalah pembentukan Malaysia—, *Suluh Indonesia* justru menuding PM Abdulrachman sebagai penyebab utama timbulnya ketegangan. *Suluh Indonesia* menginterpretasikannya:

Betapa tidak, Malaysia adalah buatan Tengku. Tengkulah yang akan menjadi bidan lahirnya apa yang dinamakan Malaysia... Dengan demikian secara logis dan wajar dapat dikatakan bahwa Tengkulah yang menjadi biang keladi ketegangan di Asia Tenggara sekarang ini.

Seperti biasanya, harian *Duta Masyarakat* selalu berusaha menyoroti masalah di hadapannya dengan kacamata ajaran dan falsafah keislaman. Menanggapi

tindakan kekerasan PM Abdulrachman terhadap kaum oposisi yang menentangnya, dengan judul "Malaya Sakit", *Duta Masyarakat* menyatakan dalam Induk Karangannya tanggal 7 Februari 1963:

Kita tahu, dan semua orang tahu, kalangan Islam yang luas mempunyai pandangan yang berbeda dengan Abdulrachman... Kita punya keyakinan yang berdasarkan hukum dan bukti sejarah bahwa tiada umat Islam yang meleset perhitungannya terhadap penjajahan... Tak ada penggadaian yang lebih hina daripada menggadaikan umat Islam kepada orang lain.

Di pihak lain, *Duta Masyarakat* secara tegas memisahkan urusan politik dengan agama. Berkaitan dengan undangan untuk mengikuti perlombaan membaca Al Qur'an di Malaya, harian ini dalam Induk Karangannya edisi 8 Februari menyatakan:

... Kita setuju buat kirim utusan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia, khususnya Umat Islam Indonesia, tidak bermusuhan dengan bangsa Malaya, tapi hanya bermusuhan dengan pikiran-pikiran Abdulrachman yang tidak bersahabat.

Harian *Merdeka* dalam edisi 7 Februari 1963 secara kritis menyoroiti krisis "Malaysia" dengan perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, proyek Malaysia dilihat sebagai bagian penting politik strategis Blok Barat yang dipelopori Inggris dengan Abdulrachman sebagai bonekanya dalam membendung politik ekspansionis komunisme, seperti tercermin dalam kutipan berikut:

Blok Barat... mencoba mempertahankan sisa-sisa pengaruh dan kekuasaannya, baik langsung maupun tidak langsung, di Asia Tenggara... Australia sudah pagi-pagi mendukung penumpasan terhadap revolusi Kalimantan Utara oleh Inggris, demikian pula Amerika beberapa waktu yang lalu menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Malaysia.

Di sisi lain, masalah Malaysia dilihat *Merdeka* sebagai pencerminan pertentangan antara Nefos dan Oldefos dengan PM Abdulrachman sebagai pemain utamanya. Peran yang dimainkan Abdulrachman ini mendapat sorotan sekaligus kecaman keras dari *Merdeka*:

Di sini pula lagi-lagi terdapat bentrokan kuat yang bisa membawa huru-hara antara 'Nefos' kontra 'Oldefos'. Dan apa yang merupakan suatu tragik dalam abad ke-20 ini adalah peranan yang kolonialistis dan ekspansionis yang dimainkan oleh PM Abdurachman sebagai seorang Asia... Dengan sadar atau tidak ia telah ditunggangi kaum imperialis bahkan sedang membukakan pintu kekacauan dan malapetaka bagi saudara-saudara sepupunya di Asia Tenggara...

Harian Rakyat yang menyebut diri sebagai "Harian Buruh Indonesia" dalam edisi 13 Maret 1963 dengan tegas mengklaim bahwa: "Proyek Nekolim Malaysia merupakan benteng Inggris dan AS untuk mengamankan berbagai kepentingan Barat di Asia Tenggara, sedangkan peran Tengku cuma kertas stempel, stempelnya Inggris".

Situasi bertambah buruk menyusul pernyataan yang dikeluarkan PM Abdurachman bahwa "setiap serangan Indonesia akan dibalas". Pernyataan Abdurachman kemudian terbukti dengan adanya pernyataan dari Menteri Keuangan Malaya Tan Siew Sin mengenai rencana pembatasan lalulintas pembayaran dengan Indonesia. Dengan tegas, *Merdeka* menanggapi langkah politik Malaya ini dalam edisi 13 Februari 1963:

Keterangan ini tidak salah lagi harus ditafsirkan 'serangan Malaya yang nyata' dalam rangka hubungan yang bertambah buruk dengan negara itu. Pancingan-pancingan Abdurachman harus dibalas dengan jitu. ... Satu tindakan secara politis maupun militer yang '*un-Indonesian*' harus dilakukan terhadap Abdurachman yang bertambah menantang... Pada babak ini... akan membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh mempersiapkan tindakan-tindakan yang lebih konkrit di samping untaian kata.

Di tengah situasi yang makin memburuk itu, Presiden Soekarno tampil mempertegas sikap dan oposisi Indonesia terhadap Malaysia ketika Pemimpin Besar Revolusi itu menyampaikan amanatnya di depan Sidang Bersama PB Front Nasional (PBFN) dan Pengurus Daerah Front Nasional (PDFN) tanggal 13 Februari 1963. **Pertama**, Presiden menyetujui Panca Program FN. **Kedua**, soal Malaysia. **Ketiga**, instruksi Presiden agar Indonesia keluar dari IOC dan kemudian segera melaksanakan *The Games of The New Emerging Forces*.

Harian *Sinar Harapan* dalam tanggapannya atas Tri Amanat Presiden Soekarno melalui Tajuk edisi 14 Februari menyatakan:

... Telah ditegaskan oleh Bung Karno tekad seluruh rakyat Indonesia untuk berkonfrontasi menghadapi tindak-tanduk neo-kolonialis yang memakai 'kuku' Tengku Abdulrachman hendak berkeras mengepung Indonesia melalui 'Malaysia'nya ... dan mempersiapkan Ganefo.

Di sini tiada pilihan lain, ikut dalam gerak roda revolusi, atau minggir samasekali... Hari depan Bangsa Indonesia sudah kita pertaruhkan dan kita semua diminta pertanggungjawab sebesar-besarnya.

Dalam Tinjauan Luar Negeri edisi 11 Februari, *Sinar Harapan* secara tajam menyoroti langkah-langkah politis yang ditempuh Malaya dan Inggris untuk mempengaruhi opini internasional maupun kaum oposisi di dalam Malaysia sendiri, terutama serangan PM Abdulrachman terhadap Indonesia, seperti menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pertama kali menyebut "Malaysia Raya" sebagai gagasan Neokolonialisme untuk menutupi kegagalan pemberontakan di Brunei. Indonesia juga dituduh telah melancarkan perang dingin dengan penduduk Malaya yang menurut *Sinar Harapan* telah dibalas oleh PM Abdulrachman dengan melancarkan kampanye-kampanye anti-Indonesia.

Suluh Indonesia menanggapi amanat Presiden Soekarno di depan Sidang bersama PBFN dan PDFN sebagai tahap baru dalam arus revolusi. Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi, menurut *Suluh Indonesia*, telah menempatkan Malaysia dalam kategori musuh pokok revolusi. Senada dengan pandangan *Suluh Indonesia*, *Merdeka* dalam Induk Karangan 15 Februari 1963 menyatakan tanggapannya:

Apakah artinya pidato Presiden itu? Oleh segenap bangsa Indonesia terutama oleh Pimpinan Angkatan Bersenjata, pidato Presiden itu tidak boleh cuma dianggap satu penegasan saja, melainkan satu perintah ... yang mempunyai sangkut-paut dengan gerakan politis, ekonomi, dan militer harus serta-merta melakukan tindakan jangka pendek atau panjang yang jitu untuk menggagalkan Malaysia.

Harian Rakyat dalam tanggapannya justru tidak menyoroti masalah Malaysia, tetapi mengenai kedudukan dan perkembangan peranan FN dalam kancah revolusi. Dalam editorial edisi 15 Februari, *Harian Rakyat* menyatakan:

Dengan adanya 'Panca Program' sekarang ini, FN menjadi ibarat laskar yang tadinya hanya bersenjata bambu runcing sekarang mendapatkan senapan mesin... Sekarang FN bisa maju beberapa langkah ke depan dan mutu perjuangannya bisa meningkat.
... maka 20 juta anggota FN di segala penjuru tanah air sudah bisa mempelajari dan memikirkan bagaimana pelaksanaan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, *Harian Rakyat* habis-habisan menyerang imperialis AS (baca: pers AS) yang mendiskreditkan posisi Indonesia dan Presiden Soekarno khususnya. Dalam edisi 6 Februari, mengutip pernyataan Bung Karno dan Aidit, *Harian Rakyat* menulis

"Rakyat Indonesia bukan rakyat tempe, tapi sudah ditempa oleh revolusi bersenjata... imperialis tetap imperialis, bajingan tetap bajingan... Mari kita menghantam kaum imperialis sampai keok."

4.3 Upaya Damai yang Gagal

Meningkatnya ketegangan di Asia Tenggara yang sesewaktu bisa menimbulkan perang terbuka, mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk maju ke meja perundingan. Munculnya gagasan untuk menyelesaikan sengketa secara damai ditanggapi secara kritis oleh *Suluh Indonesia*. Menurut harian ini, upaya penyelesaian damai mustahil tercapai tanpa mengikis habis apa yang menjadi pangkal masalah, yaitu PM Abdulrachman. Karena itu, dalam Tajuk Rencananya edisi 22 Februari 1963, harian ini menegaskan:

... Apabila sumber pokok ini dilenyapkan tentunya sangat logis ketegangan akan lenyap juga... Sebaliknya apabila tidak demikian, dengan sendirinya sulit untuk bisa mengharapkan manfaat dari KTT Asia Tenggara ini.

Pandangan Harian *Merdeka* terhadap rencana KTT itu tidak setajam *Suluh Indonesia*, walaupun secara prinsipil keduanya sejalan. Dalam Induk Karangan edisi 18 Maret 1963, *Merdeka* mengingatkan:

... Jika Malayanya Abdulrachman tetap membawa pikiran-pikiran Inggris yang bersitegang membela kepentingan Oldefos dalam bidang politik, ekonomi, dan militer di Asia Tenggara, dari sekarang boleh dikatakan KTT nanti akan gagal.

Beberapa hari sebelumnya, Harian *Merdeka* juga menuduh pihak Malaya dan Inggris dengan sengaja memperkeruh masalah, bahkan menyulut api peperangan di tengah upaya diplomatik yang diprakarsai Filipina dan Indonesia. Diawali dengan pernyataan PM Abdulrachman untuk mempercepat pembentukan Malaysia tanggal 10 Juli 1963 dari rencana semula tanggal 31 Agustus 1963. Kemudian menyusul pernyataan dari London bahwa "Inggris terikat untuk mempertahankan Malaysia yang kini sedang direncanakan jika Federasi itu diserang dan meminta bantuan".

Menurut *Merdeka* dalam Tajuk edisi 13 Maret:

Inggris dan Tengku dengan sengaja membunyikan tambur peperangan untuk menggagalkan usaha-usaha diplomatik di Filipina... Mereka lebih suka bicara tentang perang daripada berunding dan bicara baik-baik.

Menelusuri hakikat dan tujuan misi Menlu Subandrio ke Manila atas undangan Filipina, Harian *Duta Masyarakat* meneropong rencana KTT dari perspektif posisi sentral Indonesia di Asia Tenggara. Harian ini dalam edisi 8 Maret 1963 menegaskan:

Suka atau tidak suka, pandangan Indonesia mesti diperhatikan. Tidak ada satupun masalah yang bisa lewat begitu saja di Asia Tenggara ini tanpa persetujuan Indonesia, apalagi dengan berniat melawan Indonesia.

Di samping menunjukkan kedudukan dan arti penting peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, *Duta Masyarakat* juga mengangkat falsafah hidup

berdampingan secara damai dalam masyarakat Indonesia. Dikatakannya sebagai bangsa yang cinta damai dan senantiasa bersedia melakukan sesuatu atas dasar musyawarah, pihak Indonesia bersedia mendiskusikan masalah bersama Asia Tenggara. Namun itu akan berhasil bila berjalan di atas prinsip dan tujuan yang sehat tanpa adanya campur tangan pihak luar.

Untuk itu, *Duta Masyarakat* berpendapat bahwa pengertian yang sungguh dari pihak Malaya sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan KTT yang direncanakan. Lebih jauh, harian ini menyatakan:

Kita sependirian dengan Menlu Subandrio apapun perbedaan pendapat yang ada antara Malaya dan Indonesia, dua negara yang berdempeten dan mempunyai rakyat yang tidak banyak perbedaan apalagi segi keagamaannya, akan dapat diselesaikan baik-baik lewat saluran diplomatik.

Misi perjalanan Menlu Subandrio ke Filipina tampaknya memperlihatkan secercah harapan. KTT Tiga Negara -Indonesia, Malaya, Filipina- disepakati akan segera dilangsungkan dan didahului Konferensi Tingkat Menteri dan pertemuan teknis tingkat di bawah Menteri Luar Negeri. Harian *Suluh Indonesia* menilai misi Menlu Subandrio berhasil memuaskan. Namun harian ini dalam edisi 16 Maret 1963 mengingatkan sekali lagi:

Pertama, mungkinkah dengan sukarela bangsa asing (Inggris) melepaskan campurtangannya dalam soal Malaysia ini? **Kedua**, mungkinkah Tengku melepaskan dirinya dari pelukan Inggris?

Peringatan *Suluh Indonesia* mulai terbukti dengan datangnya tuduhan dari PM Abdurachman bahwa Indonesia adalah ekspansionis dan sejak lama mencita-citakan Indonesia Raya yang mencakup Malaya dan Kalimantan Utara. *Suluh Indonesia* dalam Tajuk Rencana edisi 3 April 1963 mengecam Abdurachman bahwa tuduhan itu:

... benar-benar tuduhan lancang yang sulit dimaafkan... yang memang sengaja dilakukan untuk mendiskreditkan nama baik In-

donesia. Dan dengan kenyataan demikian, maka sulit bagi rakyat Indonesia untuk bisa percaya terhadap kesungguhan kehendak Abdulrachman untuk menyelesaikan ketegangan di Asia Tenggara dengan cara-cara yang bersahabat.

Tidak mengherankan apabila pertemuan teknis sebelum Konferensi Tingkat Menlu berjalan tersendat-sendat dan diliputi suasana tegang. Hasilnya pun mengambang dengan tidak dimasukinya masalah Malaysia dalam agenda pembicaraan. Dengan gaya sindiran, *Suluh Indonesia* menanggapi hasil pertemuan teknis itu dengan memberi judul Tajuk Rencana edisi 23 April 1963: "Acaranya Rokok, Bicara Soal Tembakau".

Harian Rakyat secara kritis mempertanyakan motif utama yang mendadsari gagasan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. *Harian Rakyat* menunjuk adanya komplotan baru di Asia Tenggara yaitu "Malaysia", di samping komplotan lama: SEATO. Dalam kaitan ini, *Harian Rakyat* edisi 9 Maret mempertanyakan:

... Apa sesungguhnya maksud dari KTT itu: untuk menolak Malaysia atau untuk menerimanya? Untuk memotong rencana neokolonial Malaysia atau untuk merintis jalan untuknya?

Jika sekiranya maksud KTT itu untuk memberi hati kepada Malaysia, maka dengan demikian bukan hanya Malaysia, tetapi juga KTT itu sendiri bisa bersifat neokolonial.

Harian Duta Masyarakat berpendapat bahwa kerukunan yang rasional dan saling menguntungkan bagi ketiga negara yang berasal-usul sama itu mempunyai hari depan yang baik. Selanjutnya *Duta Masyarakat* edisi 3 April mengingatkan:

... Kita selalu bersedia menempuh jalan musyawarah asal tanpa campur tangan pihak luar. Tuhanlah yang telah menciptakan kita berdarah Melayu dan tidak ada jalan lain daripada berpikir di atas ketentuan itu. Seperti telah dicanangkan oleh Presiden Soekarno hendaknya 'persoalan Asia diselesaikan oleh orang-orang Asia'.

Sementara upaya-upaya diplomatik dilakukan secara intensif, kontak senjata mulai terdengar di Kalimantan Utara. Diberitakan bahwa pasukan Inggris memancing kontak senjata itu dengan menembak hancur perahu seorang penumpang Indonesia,

menangkap orang-orang Indonesia, dan melanggar wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara. Pesawat-pesawat Inggris juga diberitakan masuk ke wilayah Indonesia sambil menyebarkan surat-surat ancaman. *Duta Masyarakat* dalam Induk Karangan edisi 9 Mei 1963 berpendapat:

Ini berarti kita sudah ditembak, kita sudah dilanggar, kita sudah ditantang dan dihina... Kita tidak bisa terima dan biarkan semua itu. Penganiayaan terhadap satu orang Indonesia dalam istilah perjuangan berarti penghinaan terhadap seratus juta orang Indonesia.

Namun sejauh itu pihak Indonesia belum mau meladeni tantangan dan pancingan pasukan Inggris karena terikat pada komitmen penyelesaian damai lewat meja perundingan yang telah disepakati dan sedang dirintis. Bahkan di tengah suasana tegang seperti itu, sebelum dilangsungkannya Pertemuan Tingkat Menteri di Manila awal Juni 1963, Presiden Soekarno memanfaatkan perjalanan istirahatnya ke Tokyo untuk "melobi" Presiden Macapagal di Manila, termasuk membicarakan persiapan KTT maupun Pertemuan Menlu Indonesia, Malaya, dan Filipina. Presiden Soekarno juga dijadwalkan bertemu dengan utusan Presiden Kennedy dari AS dan PM Tengku Abdulrachman, di samping menerima delegasi IOC yang berupaya agar Indonesia tetap ambil bagian dalam Pesta Olahraga Sedunia itu.

Pertemuan antara Presiden Soekarno dan PM Abdulrachman mendapat sambutan berbagai pihak dengan tercapainya kesepakatan antara kedua kepala negara untuk kembali pada *Spirit of the Malayan Indonesian Treaty of Friendship* dan mengakhiri permusuhan. Dalam Induk Karangannya tanggal 3 Juni 1963, *Duta Masyarakat* menulis:

Kita merasa besar artinya Komunike Bersama yang menggambarkan pulihnya hubungan persahabatan Indonesia dengan Malaya. Ini tak lain dan tak bukan perintah sejarah kepada kita. Dan kita merasa yakin bahwa Allah Subhanahuwata 'ala akan selalu menyertai kita...

Pertemuan puncak di Tokyo itu telah memperlicin jalannya Pertemuan Tingkat Menlu awal Juni sebelum dilangsungkannya KTT Tiga Negara di Manila. Pertemuan Tingkat Menlu berhasil melahirkan sebuah Komunike Bersama yang akan dibawa ke tingkat KTT akhir Juli untuk diratifikasi. Harian *Duta Masyarakat* menilai kesuksesan itu sebagai *surprise* sebagaimana Menlu Subandrio dalam pidato penandatanganan komunike itu menyatakan, " ... Banyak orang merasa heran apakah kita ini bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sedangkan baru saja kemarin kita maki-memaki."

KTT Manila yang dilangsungkan sejak 30 Juli antara Presiden Soekarno dari Indonesia, PM Abdulrachman dari Malaya, dan Presiden Macapagal dari Filipina berjalan mulus. Hasil terpenting dari KTT ini adalah ditanggukannya pelaksanaan atau pembentukan Federasi Malaysia sambil menunggu hasil referendum atau plebisit di Kalimantan Utara, dan diterimanya gagasan Maphilindo. *Duta Masyarakat* menyebut hasil KTT itu sebagai "awan gelap sekitar KTT Maphilindo mulai tertiuip pergi". Bahkan dalam edisi 7 Agustus 1963, harian ini melihat hasil KTT itu sebagai kemenangan Indonesia: "... Kita mencapai suatu hal, satu kemenangan buat kita. Yakni, Malaysia tidak dapat diadakan sebelum dilaksanakan suatu referendum di Kalimantan Utara."

Dengan mengacu pada pandangan Presiden Soekarno, *Sinar Harapan* menilai hasil KTT Manila sangat positif menuju pembangunan Dunia Baru, terutama dengan lahirnya konsep Maphilindo, sebagai suatu keharusan sejarah. Harian *Merdeka* sebaliknya cukup pesimis dengan KTT, terutama menyangkut sikap dan peranan Inggris yang kuat-kokoh di belakang PM Abdulrachman. Dalam edisi 5 Agustus 1963, *Merdeka* menyatakan:

Sudah jauh-jauh hari kita canangkan bahwa Malaysia ala London telah dijadikan suatu '*fait accompli*' sehingga Abdulrachman dalam KTT cuma merupakan boneka dari kayu yang secara dramatis bergerak sesuai dengan tali-tali yang dilepas dan ditarik dari langit-

langit kamar perundingan... Sayang sekali Abdurachman bukanlah orang jujur yang berani mengatakan jauh sebelumnya bahwa ia menolak KTT .. dan hadir dalam konperensi terhormat itu kalau ia cuma suruhan Inggris.

Pendapat *Merdeka* tidak jauh berbeda dengan *Suluh Indonesia*. Perbedaannya, kalau *Merdeka* lebih menyoroti sikap dan peran Inggris di belakang PM Abdurachman, sebaliknya *Suluh Indonesia* justru mempersoalkan kepribadian Tengku Abdurachman yang mudah goyah dan emosional. "Kasih terhadap kurangnya tekad memegang janji yang mestinya dipunyai oleh seorang pembesar," tulis harian ini dalam edisi 12 Agustus 1963.

Harian Rakyat tidak memberikan sikap atau pandangannya mengenai hasil KTT Manila. Ironis memang, harian yang selalu mengikuti dengan cermat dan mempunyai pandangan-pandangan yang kritis dan tajam soal Malaysia ini justru tidak menggubris hasil KTT dengan Deklarasi Manilanya yang ditandatangani tanggal 5 Agustus itu. Dalam ediorial edisi 1, 5, 6, dan 9 Agustus 1963, *Harian* ini praktis tidak menyinggung Deklarasi Manila. Bahkan edisi 5 Agustus, editorial harian ini menurunkan judul "Terus Gagalkan Malaysia dan Adakan KKA II". *Harian PKI* ini memang tampaknya tidak mengharapkan "hasil positif" dari KTT di Manila itu seperti tergambar pada editorialnya tanggal 31 Juli 1963:

... Tetapi bagaimanapun yang menjadi sikap Tengku Abdurachman, dan main lidah apapun yang akan dipertunjukkan di Manila, kita rakyat Indonesia sudah bertekad bulat menghadapinya, yaitu seperti kata Presiden Soekarno: kita terus berkonfrontasi dan keremus Malaysia.

Ketegangan memang menyelimuti pihak-pihak yang bertikai sebelum KTT Manila dilangsungkan tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus 1963. Pihak Inggris dan Malaya mengeluarkan pernyataan bahwa Federasi Malaysia tetap didirikan tanggal 31 Agustus 1963. AS mengkaitkan program bantuannya kepada Indonesia dengan masalah Malaysia. Jepang dan Australia menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Malaysia, sementara koran-koran Australia menuduh Angkatan

Bersenjata, PNI, dan PKI sebagai sumber konfrontasi. Ketegangan meningkat menyusul sindiran tajam dari PM Abdulrachman yang menyamakan Presiden **Soekarno** dengan **Hitler**. Ditambah lagi tindakan pihak Inggris yang mengusir pejabat RI dari Sabah di Kalimantan Utara. Ketegangan itu memuncak dengan demonstrasi besar-besaran terhadap Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang disusul pernyataan tegas Presiden Soekarno dalam rapat umum "Mengganyang Malaysia" di Istana Olahraga Bung Karno Jakarta yang antara lain menyatakan: "Malaysia harus dikeremus dan dicecek kemudian dilepeh".

Situasi yang demikian terus menghantui dan mempengaruhi KTT Manila sehingga tidak mengherankan kalau ada pihak-pihak yang pesimis terhadap hasil yang dicapai maupun konkritisasi pelaksanaannya. Dunia pers juga dihindangi sikap dan pandangan yang demikian, termasuk *Harian Rakyat*. Implikasinya, perhatian surat kabar, terutama yang progresif revolusioner seperti *Harian Rakyat*, lebih banyak tertuju pada isu-isu di luar KTT Manila. Apakah ini berarti KTT Manila cuma sandiwara diplomatis?

Jawabannya bisa ya bisa tidak, tergantung dari "kacamata" penafsiran yang digunakan. Namun yang pasti, ketegangan kembali menyelimuti Asia Tenggara hanya dalam kurun waktu sebulan setelah Deklarasi Manila ditandatangani. Ketegangan itu berawal dari pernyataan bersama Malaya dan Inggris bahwa Proklamasi Federasi Malaysia akan dilakukan pada tanggal 16 September 1963 tanpa menunggu hasil referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Kalimantan Utara.

Upaya penyelesaian secara damai, khususnya dengan tercapainya Deklarasi Manila, kembali sirna. *Harian Rakyat* edisi 31 Agustus menyatakan:

Hal ini hanya mungkin atas dasar, atau Sekjen PBB berlaku sewenang-wenang menentukan sendiri 'keinginan' Rakyat Kalimantan Utara atau PT Melayu mau memaksakan Malaysia tanpa mempedulikan KTT Manila. ... Dan ini artinya konfrontasi kita jalan terus!

Pada tanggal yang sama, *Merdeka* menyesalkan tindakan Inggris dan Malaya serta pelaksanaan referendum di Kalimantan Utara:

Tapi amat disayangkan bahwa pekerjaan misi PBB di Kalimantan Utara tampaknya merupakan satu formalitet belaka. Malaysia akan tetap didirikan. Untuk ini waktunya sudah ditetapkan. Persetujuan Manila sudah dirobah menjadi secarik kertas belaka.

Nada penyesalan juga terdengar dari *Duta Masyarakat*. Dalam Induk Karangannya tanggal 13 September, harian ini menyatakan:

Persis apa yang disesalkan U Thant (Sekjen PBB), kitapun memendam penyesalan yang mirip. Pekerjaan gegabah telah berjalan di siang hari bolong di depan hidung PBB.

Harian *Sinar Harapan* edisi tanggal 14 September menilai keputusan Proklamasi Federasi Malaysia oleh Malaya dan Inggris telah merongrong misi penyelidikan U Thant yang dianggap oleh Tengku dan Inggris sebagai "pro forma" saja dan sekadar untuk "bikin senang" RI dan Filipina. Padahal bagi RI, kehendak rakyat Kalimantan Utara merupakan syarat mutlak sebelum mengakui eksistensi Malaysia. Selanjutnya harian ini berpendapat:

Konsekuensi dari sikap Tengku itu sangat besar dan mungkin akan menyebabkan terpecahnya Maphilindo dan meruncingnya kembali konfrontasi Malaysia-Inggris di satu pihak, dan Philipina-Indonesia di pihak yang lain... Untuk menghindari menjadi eksplosifnya ketegangan di Asia Tenggara mungkin ada baiknya masalah ini dibawa ke muka forum Majelis Umum PBB.

Reaksi keras juga datang dari Harian *Suluh Indonesia*. Di samping mengemukakan rencana Proklamasi Malaysia tanggal 16 September 1963 yang berarti mendahului kesimpulan hasil referendum PBB, harian ini menyesalkan tindakan pihak Inggris yang sengaja menghalang-halangi atau mempersulit tim peninjau referendum dari Indonesia dan Filipina. Harian ini juga mengkritik tajam pelaksanaan tim referendum PBB yang dipimpin Michelmores yang dinilai menyimpang dari persetujuan KTT Manila, di samping waktu yang tersedia sangat terbatas.

4.4 Konfrontasi Ekonomi dan Militer

Reaksi keras dari pihak Indonesia dan Filipina, ditambah lagi pernyataan penyesalan dari Sekjen PBB terhadap "tindakan mendahului" dari pihak Inggris dan Malaya, mendapat tanggapan positif dari Kuala Lumpur dan London. Pada 29 Agustus 1963, dari Kuala Lumpur diumumkan bahwa Proklamasi Federasi Malaysia diundur dari tanggal 31 Agustus ke tanggal 16 September sambil menunggu pengumuman hasil misi U Thant.

Sekjen PBB U Thant sendiri kemudian mengumumkan hasil referendum di Kalimantan Utara itu pada tanggal 14 September yang menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak menyetujui bergabung dalam Federasi Malaysia. Disusul dua hari kemudian, tanggal 16 September, diumumkan pembentukan Federasi Malaysia. Dua peristiwa beruntun itu segera mendapat reaksi keras dari Indonesia dan Filipina. Di satu pihak, baik Indonesia maupun Filipina tidak dapat menerima misi U Thant karena prosedurnya dianggap tidak sah seperti telah disepakati dalam KTT Manila. Di pihak lain, PM Abdulrachman dituduh telah mengkhianati jiwa dan bertindak menyimpang dari hasil-hasil KTT Manila.

Pada hari Proklamasi Federasi Malaysia itu juga terjadi demonstrasi rakyat secara besar-besaran terhadap Kedutaan Besar Malaya dan Inggris di Jakarta. Kontrademonstrasi terjadi di Kuala Lumpur pada tanggal 17 September dan pada hari yang sama Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Filipina. Aksi demonstrasi massa kembali terjadi di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada tanggal 18 September. Dapatlah dikatakan bahwa secara formal, konfrontasi "Menggangyang Malaysia" dimulai sejak Proklamasi Malaysia tanggal 16 September 1963.

Segenap unsur kekuatan revolusi di dalam negeri terbakar oleh elan revolusioner "Menggangyang Malaysia" yang dilahirkan secara paksa itu. Tidak terkecuali pers Indonesia. *Harian Rakyat* dalam Editorial edisi 16 September dengan

judul "Malaysia-Gugurkan Dia!" menyatakan dengan tegas bahwa konfrontasi terhadap Malaysia kini memasuki tahap baru. Harian ini kembali menuding Inggris dan AS serta kawan-kawannya sebagai pihak yang mengotaki dan menentukan di belakang pembentukan Malaysia yang kontroversial itu. Tuduhan terhadap AS kali ini terutama berkaitan dengan kepemimpinan AS (Michelmores) dalam tim PBB ke Kalimantan Utara yang dianggap berat sebelah dan memihak Malaysia. Karena itu, *Harian Rakyat* berpendapat:

Dengan terang-terangan mendukung Malaysia, AS terang-terangan memelopori neokolonialisme dan memusuhi RI. Maka itu sikap kita terhadap AS pun tidak mungkin lain selain menghadapinya sebagai musuh nomor wahid, karena Tengku dan sebangsanya tak akan senekad sekarang, sekiranya tidak ada AS dan Inggris di belakangnya... Mari kita nyalakan terus api melawan neokolonialisme... memusnahkan imperialisme.

Mengomentari aksi demonstrasi rakyat di Jakarta dan beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Medan, *Harian Rakyat* dalam Editorial edisi 17 September menyatakan, "Salut kita yang setinggi-tingginya tertuju kepada kaum demonstran dan semua yang beraksi... melawan neokolonialisme Malaysia."

Sementara *Harian Sinar Harapan* melihat Proklamasi Federasi Malaysia sebagai ancaman serius terhadap persaudaraan MAPHILINDO. Dalam Tajuk Rencana edisi 16 September, *Sinar Harapan* sekali lagi memperingatkan Kuala Lumpur tentang sikap dasar Indonesia yang hanya akan "menerima baik dan menyokong Malaysia" jika pembentukannya dilaksanakan atas dasar KTT Manila. Di satu pihak, *Sinar Harapan* mempersalahkan tindakan gegabah PM Abdurachman yang dinilai belum mampu membebaskan diri dari jeratan Inggris sekaligus mengingatkannya bahwa keretakan dalam MAPHILINDO hanya akan menguntungkan kekuatan-kekuatan asing sehingga bisa memperkeruh situasi di Asia Tenggara.

Di pihak lain, *Sinar Harapan* mengimbau PBB supaya meninjau kembali

prosedur pelaksanaan tim Michelmores dan segera melakukan koreksi seperlunya berdasarkan syarat-syarat dan kesepakatan KTT Manila. Dengan itu, menurut *Sinar Harapan*, ketenteraman di Asia Tenggara tetap terjamin. Lebih jauh, *Sinar Harapan* dalam edisi yang sama menyatakan pandangannya:

... Selama Tengku masih bimbang mengikatkan nasibnya bersama Indonesia dan Filipina kepada kekuatan sendiri di Asia Tenggara, dan selama ia masih lebih condong bersandar kepada Inggris, 'Malaysia'-nya tetap akan kayal dan tanpa daya hidup. Selama syarat-syarat persetujuan Maphilindo tidak dipenuhi, Malaysia tidak akan diberi pengesahan oleh Indonesia dan Filipina dan akan terus ditentang dengan konfrontasi.

Pada tanggal 12 September atau empat hari menjelang *Malaysian Day*, Harian *Merdeka* menyatakan bahwa situasinya kini mirip dengan kegentingan ketika konfrontasi Trikora mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Agustus tahun 1962. Berdasarkan Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI kepada keempat Angkatan Bersenjata supaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan berkaitan dengan Proklamasi Malaysia tanggal 16 September, Harian *Merdeka* mengimbau seluruh bangsa Indonesia:

Marilah kini kita kembali dengan semangat Trikora menghadapi ancaman dari Utara ini, demi perjuangan menegakkan keadilan untuk mencapai adil makmur buat umat manusia.

Selanjutnya dalam edisi 18 September atau dua hari setelah Malaysia resmi terbentuk, Harian *Merdeka* melancarkan tuduhan kepada PBB yang dinilai telah membiarkan diri masuk dalam perangkap Inggris. Dikatakannya bahwa Inggris dengan licik telah memperdayai tim Michelmores dengan hanya menghadirkan golongan-golongan yang prokolonialis atau orang-orang bayaran dalam dengar pendapat yang diadakan. Sebab, menurut *Merdeka* patriot-patriot sejati dan golongan nasionalis sudah ditangkap atau menarik diri ke daerah pedalaman sebelum tim PBB melakukan misinya ke Kalimantan Utara. Namun *Merdeka* mengingatkan Inggris

mengenai tekad rakyat Kalimantan Utara yang anti-Malaysia di bawah Komandan Tertinggi Pembebasan Kalimantan Utara Letjan Jenderal Abang Kifli yang sudah tentu mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak Indonesia. *Harian Merdeka* menegaskan:

Selanjutnya pencinta kemerdekaan, Indonesia dengan tegas berpihak kepada rakyat Kalimantan Utara. Inggris yang masih belum mau sadar... sekali lagi akan mengalami kegagalan di Kalimantan Utara dalam mempertahankan penjajahannya seperti yang dialaminya di negara-negara lain.

Tantangan keras juga datang dari *Suluh Indonesia*. Selain mengecam tindakan ceroboh PM Abdulrachman dan Inggris dengan *Malaysia Day*-nya, harian ini juga menuduh PBB ikut bertanggung jawab atas masalah Malaysia karena cara kerjanya yang menyimpang dari Deklarasi Manila dan banyak menguntungkan proyek Malaysia. Dalam Tajuk Rencana edisi 17 September, harian ini menyerukan:

Mari kita teruskan perlawanan kita terhadap imperialisme dan neokolonialisme dengan aksi-aksi yang dipimpin baik dan bersasaran tepat untuk menenyapkan Malaysia dan memperkuat posisi RI kita dalam konfrontasi 'Ganyang Malaysia' nya kaum imperialis dan neokolonialis.

Harian *Duta Masyarakat* menilai keseriusan tingkat perjuangan sekarang menjadi begitu rupa sehingga memerlukan komando di satu tangan, yakni pimpinan revolusi sendiri. Dalam Induk Karangannya tanggal 20 September, harian ini berpendapat bahwa perundingan di forum PBB yang kini tengah dilakukan oleh Menlu Subandrio, kewaspadaan fisik untuk menjaga setiap kemungkinan, dan pengawasan terhadap gejala-gejala yang merusak sarana ekonomi, memerlukan pemusatan kekuatan dan pikiran. Menurut *Duta Masyarakat*, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh dunia internasional untuk menolak pengakuan Malaysia yang tidak sesuai dengan jiwa KTT Manila. Berkaitan dengan itu, *Duta Masyarakat* menghimbau:

Yang harus dilakukan sekarang adalah menyatukan tekad. Mari kita bercontoh pada Trikora dimana jiwa patriotik bergandengan secara akrab dengan disiplin sehingga tiap tindakan tak bisa lain dirasakan sebagai suatu pukulan yang efektif kepada lawan.

Demikian pers Indonesia sebagai alat revolusi secara gencar melancarkan konfrontasi, baik dalam pemberitaan maupun pandangan-pandangannya, untuk membakar semangat revolusioner seluruh kekuatan nasional. Hal ini sejalan dengan seruan PWI untuk "memboikot Malaysia". Dalam pernyataan tanggal 15 September 1963 yang ditandatangani Ketua Umum Karim DP, PWI menyatakan bahwa "Proklamasi Malaysia" adalah suatu pelanggaran kasar terhadap Deklarasi Manila. Karena itu, ia menginstruksikan kepada korps wartawan Indonesia untuk terus melancarkan konfrontasi dalam pemberitaan, tulisan, dan lukisan untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat dalam rangka menghancurkan proyek neokolonialisme Malaysia itu.⁽³⁾

4.4.1 Konfrontasi Ekonomi

Reaksi terhadap Proklamasi Malaysia ternyata tidak terbatas pada aksi demonstrasi massa yang lebih berdimensi politik, tetapi juga aksi-aksi yang berdimensi ekonomi berupa tindakan pengambilalihan beberapa perusahaan dan perkebunan Inggris. Tetapi karena terdorong oleh elan revolusioner yang sulit terkendali, aksi atau konfrontasi ekonomi yang dilakukan secara spontan itu banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan sarana ekonomi yang justru merugikan negara dan arus revolusi itu sendiri, seperti yang terjadi dengan Perusahaan Minyak Shell.

Karena itu pemerintah mengeluarkan ketentuan berupa Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1963 yang bertujuan menertibkan pengambilalihan dan pendayagunaan perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih oleh buruh dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi ekonomi terus meningkat dan

3). Harian Rakyat, edisi 16 September 1963.

memanas dengan dikeluarkannya Surat Perintah No. 1/KOTOE Tahun 1963 pada tanggal 21 September 1963 oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Surat itu berisi perintah untuk memutuskan semua hubungan lalu lintas perekonomian dengan semua daerah yang menamakan diri "Malaysia" dan melaksanakan "dedolarisasi" di Kepulauan Riau.

Harian Sinar Harapan dalam Tajuk Rencana edisi 18 September menyatakan keyakinannya bahwa salah satu tulang punggung dalam konfrontasi dengan Malaysia adalah konfrontasi di bidang ekonomi. Harian ini juga mengingatkan bahwa Instruksi Presiden No. 194 Tahun 1963 pasti mempunyai akibat dan daya cakup yang sangat luas dan penting dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, khususnya konfrontasi di bidang ekonomi. Karena itu, menurut harian ini dalam Tajuk Rencana edisi 18 September, pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pengacau ekonomi, sebab:

Kita berkeyakinan bahwa konfrontasi Malaysia itu salah satu tulang-punggungnya adalah konfrontasi di bidang ekonomi. Pengacauan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di bidang-bidang harga beras khususnya dan bidang perekonomian umumnya, pasti tidak menguntungkan perjuangan kita di bidang ekonomi konfrontasi Malaysia itu.

Dalam tajuk lain edisi yang sama, *Sinar Harapan* mengecam keras tindakan PM Tengku Abdulrachman yang menginjak-injak lambang Negara RI Bhineka Tunggal Ika. Harian *Sinar Harapan* yang biasanya bersikap tenang dan sangat hati-hati itu kali ini benar-benar terbakar semangat nasionalismenya dan menyerang PM Abdulrachman tanpa ampun:

Tindakan Abdulrachman menginjak-injak lambang RI Bhineka Tunggal Ika sungguh-sungguh tindakan yang tak senonoh bagi seorang kepala pemerintahan... Nampaknya Tengku sudah lupa diri, kerasukan, oleh bisikan hasutan kaum kapitalis Inggris... Kami yakin, bahwa sebagian besar rakyat Malaya tidak mendukung sikap Tengku yang memusuhi RI. Kami canangkan ucapan Dr. Subandrio bahwa menghadapi Malaysia kita boleh hati panas tapi berkepala dingin.

Harian *Merdeka* edisi 3 Oktober menyatakan betapa pentingnya upaya konsolidasi kekuatan perekonomian nasional dalam rangka konfrontasi di bidang ekonomi dengan Malaysia. Menurut *Merdeka*, pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia justru lebih menguntungkan jalannya roda konfrontasi sejauh itu dimanfaatkan secara optimal. Dikatakannya:

Kita sudah membulatkan tekad untuk menjalankan konfrontasi. Karena itu situasi yang timbul dari pemutusan hubungan dengan Malaysia ini, kita pergunakan untuk melancarkan jalannya roda revolusi dan mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan kita terutama dalam bidang ekonomi.

Dalam alur pemikiran itu, Harian *Merdeka* menilai kebijaksanaan pemusatan tugas dan pembangunan *task force* politik di bawah Menlu Subandrio dan *task force* ekonomi di bawah kepemimpinan Wampa Leimena sebagai keputusan yang sangat tepat. Menurut harian ini, kebijaksanaan itu merupakan realisasi dari tekad bangsa Indonesia untuk melancarkan konfrontasi politik dan ekonomi secara terkoordinir dan efektif. Dalam induk karangan edisi 5 Oktober, *Merdeka* lebih jauh mengungkapkan:

Tindakan-tindakan yang sampai sebegitu jauh dilakukan dalam bidang ekonomi telah mulai terasa akibatnya oleh Malaysia, terutama sekali di Singapura, yang hidupnya sebagian besar tergantung dari perdagangannya dengan Indonesia dan industrinya memperoleh bahan mentah dari negara kita.

Selain dari mengadakan koordinasi yang baik di antara *task force ekonomi* dan *task force politik*, bantuan dari Angkatan Laut untuk menutup serapat-rapatnya lubang-lubang penyelundupan diperlukan untuk masa ini. Sukses di bidang ini amat vital bagi konfrontasi kita.

Konfrontasi dengan Malaysia dalam bidang ekonomi tampaknya sangat efektif sebagai tulang punggung roda konfrontasi. Hal itu disinyalir oleh Harian *Duta Masyarakat* dalam Induk Karangannya edisi 5 November:

Bahwa kemenangan akhir akan kita peroleh dalam konfrontasi

terhadap Malaysia semakin hari bertambah jelas. Ibarat orang sekarat mereka kini lagi bertindak bukan main menghadapi pemutusan segala hubungan perekonomian yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Posisi Indonesia sebagai sumber duit bagi Singapura dan Malaya semua kita sudah tahu begitu menentukan. Pemutusan segala hubungan perekonomian yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan demikian benar-benar suatu pukulan yang mematikan.

Pandangan *Merdeka* itu didasarkan atas berita *Antara* bahwa Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia di dalam sebuah konperensi yang dihadiri para pengusaha mengharapkan agar konfrontasi ekonomi Indonesia terhadap Malaysia dihentikan. Hal serupa pernah disinyalir oleh *Harian Merdeka* bahwa PM Singapura Lee Kuan Yew mengeluh dan mempersalahkan "Malaysia" yang tidak mau mengindahkan tuntutan Indonesia soal "Malaysia" ini.

Di tengah gelombang aksi demonstrasi dan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris oleh kaum buruh dan tani, *Harian Rakyat* menyesalkan tindakan-tindakan pengrusakan oleh apa yang disebutnya sebagai "elemen-elemen kontra-revolusioner" ala Darul Islam dan rasialisme. Sebaliknya, harian ini memuji aksi-aksi kaum revolusioner yang dinilai tertib dan dipimpin dengan sasarannya yang jelas dan tepat. Dalam kaitan ini *Harian Rakyat* menilai, tepat sekali seruan yang dikeluarkan oleh CDR-PKI untuk menyelamatkan alat-alat produksi. Dalam edisi 21 September harian itu menanggapi seruan itu bahwa:

Ini sesuai sekali dengan Keputusan Presiden No. 41 dan 42 yang dasarnya juga menyelamatkan alat-alat produksi dan produksi sendiri, di samping melegalisasi aksi-aksi pengambilalihan yang telah sempat terjadi.

Dalam gerak konfrontasi ekonomi ini, fokus perhatian *Harian Rakyat* justru ditujukan pada Amerika Serikat (AS) dan bukan Inggris atau Malaysia, dengan isu pokok pembekuan bantuan ekonomi AS sebagai dalil. Dalam Editorial edisi 27 September, *Harian Rakyat* menulis:

Lihatlah imperialisme AS tak menyimpan-nyimpan cara dan segala lubang yang mungkin dimasukinya untuk menggertak kita: tak cukup rupanya 'statement' Dubes Bowles dan Presiden Kennedy, malahan tak cukup rupanya gertakan komandan Armada VII, kini 'bantuan'nya ke Indonesia betul-betul dibekukannya.

Untuk menghadapi tindakan AS itu, *Harian Rakyat* sangat mendukung politik "berdiri di atas kaki sendiri" yang ditegaskan oleh DN Aidit, baik untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi maupun dalam menyelesaikan revolusi umumnya. *Harian Rakyat* kemudian mengutip reaksi *Harian Warta Bhakti*: "Tidak! Kita tidak gentar"; pernyataan Menlu Subandrio "... kalau tak ada mesin, kita pakai pacul"; dan pidato Bung Karno beberapa tahun sebelumnya: " lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bestik tapi menjadi budak".

Tidak mengherankan kalau *Harian Rakyat* menganggap AS itu sebagai musuh "**nomor satu**" Indonesia. Lebih jauh, *Harian Rakyat* dalam Editorial 13 November menyatakan:

... Istilah 'bantuan' membuktikan kesombongan mereka... Lagi pula, siapa membantu siapa? Bantuan AS kepada Indonesia... tak ada artinya dibanding bantuan Indonesia kepada AS berupa laba tiap tahun...

4.4.2 **Konfrontasi Militer**

Dibandingkan dengan konfrontasi di bidang politik dan ekonomi yang luas dan dalam dengan intensitas tinggi, konfrontasi di bidang militer mengambil skala yang lebih kecil dan terbatas. Dislokasi kesatuan militer secara besar-besaran praktis tidak pernah dilakukan di sepanjang perbatasan, selain pasukan-pasukan reguler secara terbatas. Yang justru aktif terlibat langsung dalam konfrontasi militer ini adalah para sukarelawan yang jumlahnya mencapai 21.000.000 pada saat Presiden Soekarno mencetuskan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) tanggal 3 Mei 1964.

Dengan konfrontasi militer tidak berarti konfrontasi politik dan ekonomi berkurang atau menjadi tidak penting lagi. Konfrontasi politik, terutama ekonomi,

tetap mewarnai bahkan mendominasi politik strategis Indonesia dalam upaya menghancurkan Nekomim Malaysia. Perbedaannya hanya terletak pada soal penekanan dan waktu. Sebelum Malaysia didirikan pada 16 September 1963, yang tampak menonjol ialah konfrontasi politik dan dalam skala kecil konfrontasi militer⁽⁴⁾ berupa bentrok senjata secara sporadis di sekitar wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Setelah Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia tanggal 17 September 1963 yang dibalas oleh Indonesia dengan pemutusan hubungan dagang secara total dengan Malaya dan Singapura, yang paling menonjol justru konfrontasi ekonomi yang diikuti konfrontasi militer berupa penyusupan pasukan secara intensif dan terkoordinir serta terencana. Sementara itu, dimensi politik tetap mewarnai konfrontasi walaupun dengan porsi yang lebih kecil.

Dalam hal ini konfrontasi di bidang ekonomi, terutama militer, merupakan kompensasi atas kegagalan Indonesia di bidang diplomasi. Kegagalan itu mencapai puncak ketika Malaya dan Inggris secara "paksa" memproklamasikan Federasi Malaysia tanggal 16 September 1963 tanpa mengindahkan jiwa dan semangat Deklarasi Manila. Baik Indonesia maupun Filipina menentang keras Proklamasi Malaysia itu. Di samping melancarkan konfrontasi ekonomi, pihak Indonesia segera mengadakan konsolidasi kekuatan militer dan siap siaga menghadapi perang terbuka. Pihak Malaysia mengantisipasi keadaan ini dengan meningkatkan kekuatan pasukan gabungan Inggris, Australia, Brigade Gurka, dan mobilisasi umum terhadap pemuda berusia 18-20 tahun. Situasi pada akhir tahun 1963 ini dianggap oleh Indonesia sebagai situasi perang.⁽⁵⁾

Harian Rakyat edisi 21 September menegaskan perjuangan melawan Malaysia adalah *a matter of principle* dan oleh karena itu:

-
- 4). Kegiatan militer dimulai sejak bulan Januari 1963 oleh Inggris menyusul pemberontakan rakyat Kalimantan Utara dan terus meningkat sejak Proklamasi Federasi Malaysia bulan September 1963.
5). Hadiningrat Kusumah, *Sejarah Operasi-Operasi Gabungan dalam rangka Dwikora* (Jakarta: 1971), hal. 37.

... Kita tak boleh gentar dan semboyan kita haruslah: pantang mundur! Lebih dari waktu-waktu yang biasa kita harus mengusahakan... penggabungan segala kekuatan revolusioner semaksimal-maksimalnya. Ganyang Malaysia! Menanglah Revolusi Kalimantan Utara!

Menanggapi pemboman yang dilakukan Inggris di Balaikarang Kalimantan Barat, *Harian Rakyat* mengingatkan bahwa pemboman itu bukan mematikan melainkan menghidupkan semangat anti-imperialis rakyat Indonesia. Lebih jauh HR dalam Editorial edisi 17 Oktober mengeluarkan ancaman:

... Jika Inggris akan terus-terusan bertingkah-laku seperti sekarang dalam membantu Malaysia, maka jangan kaget jika pada suatu pagi yang cerah seluruh milik Inggris di Indonesia akan habis riwayatnya.

Rencana perluasan daerah operasi Armada VII AS sampai ke Samudera Indonesia yang mendapat persetujuan India ditentang habis-habisan oleh harian ini dalam edisi 17 Desember. *Harian Rakyat* juga mengharapkan pemerintah supaya melakukan protes resmi terhadap "... rencana gila-gilaan yang seenaknya memasukkan RI ke depan 'garis agresi' AS itu." Dalam editorial edisi 26 Desember di bawah judul "Armada VII AS Lawan Banteng", *Harian Rakyat* menyatakan dukungannya terhadap seruan Presiden Soekarno supaya rakyat Indonesia menjalankan tugas-tugas nasional dengan semangat banteng yang diucapkan Pemimpin Besar Revolusi itu dalam pidatonya "Mengganyang Armada VII AS".

Lebih jauh *Harian Rakyat* menandaskan:

... Dengan ketajaman banteng kita mengupasnya habis-habisan dan yang lebih penting lagi, segenap rakyat Indonesia bersama pemerintahan Soekarno dengan semangat banteng akan terus menyapu dan melabrak Armada VII itu, sampai mereka angkat jangkar, angkat tangan, dan angkat kaki.

Berbeda dengan *Harian Rakyat* yang banyak menyerang politik luar negeri dan strategi militer AS, *Harian Merdeka* justru mengkhawatirkan insiden-insiden

bersenjata di sepanjang perbatasan Kalimantan Utara. Pelanggaran-pelanggaran batas wilayah dan penangkapan-penangkapan yang dilakukan Inggris terhadap orang-orang Indonesia di sana, menurut *Merdeka*, merupakan demonstrasi sekaligus pancingan terhadap pasukan Indonesia. Oleh karena itu, menurut *Merdeka* edisi 7 Oktober, selain diimbangi dengan:

... Memperkuat Angkatan Laut kita di sekitar daerah perbatasan karena walaupun bagaimana bahasa kekerasan adalah satu-satunya yang paling mudah dimengerti oleh kaum kolonial. Kekuatan AL kita di daerah itu harus dapat mengimbangi kekuatan AD kita di perbatasan Kalimantan Utara.

Merdeka berpendapat bahwa peranan pasukan-pasukan pilihan seperti RPKAD, PGT, dan AURI selama ini tampak sangat besar dan menentukan keamanan maupun aksi-aksi yang lebih besar oleh pihak lawan. Akan tetapi, dengan diperbesarnya postur kekuatan lawan, maka dipandang perlu untuk segera diantisipasi sebelum perang terbuka menjadi kenyataan.

Suluh Indonesia sependapat dengan *Harian Merdeka* agar segera memperbesar postur kehadiran pasukan reguler ABRI untuk mengimbangi kekuatan lawan sekaligus mengantisipasi kemungkinan agresi yang sesewaktu dilancarkan pihak lawan. *Harian Suluh Indonesia* juga mendukung pengerahan tenaga-tenaga sukarelawan sebagai inti kekuatan revolusi yang belum selesai. Dalam edisi 25 Oktober 1963, *Suluh Indonesia* lebih jauh menyatakan:

... Kita sudah bertekad membantu revolusi rakyat Kalimantan Utara dalam mencapai kemerdekaannya. Sebab selama Kalimantan Utara belum diperintah oleh rakyatnya sendiri, pangkalan-pangkalan militer Inggris yang tersebar di daerah itu akan tetap kita rasakan sebagai kepungan terhadap kita, berarti pula ancaman bagi revolusi kita.

Konfrontasi terus meningkat ketika memasuki tahun 1964, baik di bidang ekonomi dan militer maupun politik. *Harian Rakyat* dengan gencar terus menyerang AS dan Inggris beserta Malaysianya dengan tuduhan terus-menerus melakukan

provokasi, pelanggaran perbatasan, bahkan menuduh Neokolonialis hendak mencaplok RI untuk dimasukkan ke dalam Malaysia. *Harian Rakyat* juga mengancam keras "kampanye internasional anti Indonesia" yang didalangi oleh AS, Inggris, dan Malaysia. Dalam edisi 9 Januari 1964, *Harian Rakyat* menegaskan sikapnya:

Jawaban yang paling tepat adalah membalas kekerasan neokolonial itu dengan kekerasan kemerdekaan. Yang paling tepat adalah seperti yang sudah dilakukan oleh pasukan-pasukan ABRI: menembak jatuh 4 pesawat musuh yang melanggar perbatasan.

Harian Rakyat bahkan mencanangkan bahwa konfrontasi terhadap Nekolim Malaysia telah memasuki taraf baru. Di satu pihak, *Harian Rakyat* menunjuk tindakan kekerasan ataupun provokasi pihak Nekolim, sementara di pihak lain ia menyebut keberhasilan ABRI sebagai balasan terhadap serangan lawan dan tindakan kaum buruh Indonesia -yang praktis sudah dikuasai PKI- mengambil alih perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia pertengahan Januari 1964. Lebih dari itu, *Harian Rakyat* dengan tegas menolak gagasan penyelesaian secara Asia (Maphilindo), kecuali apabila "Malaysia" dibubarkan terlebih dahulu. Dalam Editorial edisi 24 Januari, *Harian Rakyat* dengan nada sindiran menulis:

Setiap usaha 'pendekatan', termasuk kegiatan Robert Kennedy, hanya bisa dipertimbangkan Rakyat Indonesia jika neokolonialisme 'Malaysia' dibubarkan terlebih dahulu, tanpa SEATO, tanpa Armada VII AS.

Perjuangan militer dalam pandangan *Harian Rakyat* merupakan salah satu aspek saja dari konfrontasi total pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan meningkatnya situasi konfrontasi, *Harian Rakyat* justru menekankan supaya konfrontasi terus diperluas, diperdalam, dan diperhebat. Nada yang sama juga dilontarkan oleh *Harian Suluh Indonesia*. Menanggapi kedatangan Jaksa Agung AS Robert Kennedy untuk bertemu dengan Presiden Soekarno di Tokyo, harian ini dengan tajam mengatakan:

Apa pula tekanan yang akan digunakannya? Kita percaya sepenuhnya bahwa tekanan-tekanan yang diterima oleh Indonesia, khususnya Presiden Soekarno, tidak akan membelokkan sasaran perjuangan kita... Kita berjalan terus! Kalau perlu, sendiri!

Pers Indonesia lainnya umumnya menyambut positif upaya mempertemukan kembali pihak-pihak yang bertikai yang lebih dikenal dengan "Maphilindo". Apalagi setelah Presiden Soekarno tidak berkeberatan dengan gagasan itu, bahkan menyerukan supaya "masalah Asia diselesaikan secara Asia". Sebelum KTT dilangsungkan bulan Juni 1964 di Tokyo, terlebih dahulu diadakan Pertemuan Tingkat Menteri di Bangkok dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 1964. Tetapi hasil pertemuan di Bangkok ini tampak kurang memuaskan seperti terbesit dari pernyataan Menlu Subandrio bahwa hasil pertemuan itu "rapuh" dan keadaan masih bisa berbalik ke arah manapun. Menurut *Harian Rakyat*, "pertemuan yang dipaksakan itu ibarat mempertemukan dua ujung jarum". Bahkan tanpa memperdulikan hasil upaya diplomatik dan rencana pertemuan "Bangkok II", *Harian Rakyat* edisi 25 Pebruari sangat meragukan motif dan prospek perundingan itu:

... apa yang bisa diharapkan dari suatu perundingan sekarang ini dengan orang-orang yang demikian itu? Maka politik yang realistik sekarang ini adalah meneruskan politik konfrontasi total secara konsekuen, meneruskan dan mengkonsolidasi pengambilalihan semua perusahaan Inggris dan membangun serta memperkuat front persatuan anti Malaysia.

Memasuki pertengahan Maret 1964, Indonesia meningkatkan konfrontasi dengan datangnya komando dari Presiden Soekarno yang disusul dengan rapat kerja seluruh Panglima Kodam di bawah pimpinan Menteri Pangab. Presiden Soekarno menyerukan amanatnya untuk meningkatkan sikap revolusioner ofensif dan ketahanan revolusi dalam rangka menghimpun para sukarelawan "Ganyang Malaysia". Peningkatan konfrontasi total menjadi nyata dan mendapat legitimasi dengan dicetuskannya Dwi Komando Rakyat pada tanggal 3 Mei 1964.

Harian Sinar Harapan berpendapat bahwa Dwikora merupakan jawaban

dan senjata yang ampuh bagi Indonesia untuk mengatasi segala macam persoalan yang berhubungan dengan proyek Nekolim "Malaysia". Menanggapi ucapan Menlu Inggris Butler bahwa Inggris tidak ingin bertindak sbagai suatu negara Asia, *Sinar Harapan* edisi 8 Mei 1964 menyatakan:

... Singkat saja tanggapan kita, bahwa hal itu memang tidak mungkin sebab Inggris bukanlah negara Asia! ... di sini kita tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa Indonesia yang telah memerdekakan dirinya dengan proklamasi dan perjuangan tidak mau dan tidak akan didikte lagi penyelesaian persoalan nasionalnya oleh kekuasaan asing.

Harian Duta Masyarakat menyebut Dwikora sebagai benteng kekuatan revolusi untuk menghadang maupun menyerang setiap serangan "dari utara" (Nekolim Malaysia). Dwikora merupakan tindak lanjut dari tekad seluruh Rakyat Indonesia untuk menghancurkan proyek Nekolim Malaysia. Komentar yang sama juga dikemukakan *Harian Suluh Indonesia*. Dalam edisi 28 Mei, harian ini menilai pencetusan Dwikora sangat tepat untuk :

... lebih meningkatkan daya-juang dan membulatkan seluruh potensi untuk lebih bisa mempertinggi ketahanan dalam menghadapi segala kemungkinan dalam rangka "Mengganyang Malaysia".

Dwikora, menurut *Harian Rakyat* akan membuat besar hati setiap patriot dan sebaliknya membuat kecil hati kaum imperialis. Dalam Editorialnya edisi 4 Mei harian ini juga menyatakan:

Sekarang rakyat Indonesia sudah berada dalam fase baru perjuangan pengganyangan Malaysia... penuh dijiwai oleh Dwikora, diilhami oleh semboyan Ganyang Malaysia, bebaskan Kaltra, ganyang Tengku, bantu Azahari... Dwikora adalah komando revolusioner... maka hanya bisa dilaksanakan secara revolusioner pula. Hidup Dwikora!

Konfrontasi bertambah panas ketika Presiden Soekarno mencanangkan agar "Malaysia" sudah harus bubar sebelum tahun 1965. *Harian Rakyat* berpendapat bahwa

sejalan dengan seruan Presiden itu kita harus memperbesar pukulan terhadap Nekolim Malaysia dan kaum imperialis Inggris, AS, dan Australia. Di samping itu, kata harian ini dalam edisi 21 Mei:

Kita harus menggalang segenap kekuatan Nefo... dan benar-benar membina kegotongroyongan nasional berporoskan Nasakom... Dalam situasi seperti ini, perundingan dengan Malaysia sebenarnya percuma saja sebab Malaysia sudah tentu tetap ngotot minta diakui

Walaupun ada pihak-pihak yang pesimis atau kurang setuju dengan usaha perdamaian melalui saluran diplomatik, KTT Tokyo akhirnya terlaksana juga dalam bulan Juni 1964. Pertemuan puncak yang dihadiri Presiden Soekarno, PM Abdulrachman, dan Presiden Macapagal dari Filipina itu menerima saran Macapagal untuk membentuk sebuah komisi konsiliasi yang terdiri dari negara-negara Asia dan Afrika. Namun upaya diplomatik ini pun gagal menyelesaikan sengketa karena PM Abdulrachman bersikeras dengan tuntutannya supaya pasukan sukarelawan Indonesia ditarik dari Kalimantan. Konfrontasi pun berjalan terus.

Memang benar apa yang ditulis *Sinar Harapan* sebelum maupun sesudah KTT Tokyo bahwa KTT Tokyo merupakan bagian integral dan lanjutan perjuangan Dwikora di meja perundingan. Karena itu, menurut *Sinar Harapan*, berhasil tidaknya KTT samasekali tidak mempengaruhi perjuangan Indonesia mengganyang Neokolonialisme. Kegagalan KTT Tokyo bukan salah kita dan lebih dari itu justru memperkuat kedudukan Indonesia dalam diplomasi internasional untuk terus mengganyang Malaysia. Dalam Tajuk edisi 30 Juli 1964, *Sinar Harapan* menulis:

"Tegasnya bagi kita: Dwikora kita teruskan dan kita perhebat, soal-soal Asia kita selesaikan secara Asia."

Harian Rakyat edisi 22 Juni menggambarkan kegagalan KTT Tokyo sebagai "kegagalan yang gagah": "Ngalor ngidul", katanya, yang satu mau bubarkan Malaysia, yang lain mau bubarkan pasukan gerilyawan, dan yang lain lagi mau bubarkan kesatuan Kaltra untuk Sabah!" Kata *Harian Rakyat* lagi:

Apa selanjutnya? Terserah kepada Malaysia dan segala penyokongnya, mulai Inggris, Australia, sampai AS!... Kita siap untuk kemungkinan apapun, sepertinya terus berjanji : Mana dadamu, ini dadaku!

Menanggapi tuntutan PM Abdurachman, *Harian Duta Masyarakat* edisi 6

Agustus 1964 berkomentar:

Apa yang harus diberhentikan, kalau pengkianatan Persetujuan Manila belum diselesaikan dan dikembalikan ke atas singgasana martabat yang terhormat.

Dalam situasi konfrontasi yang terus memanas, *Duta Masyarakat* kembali menyerukan kepada umat Islam supaya tetap berpegang teguh pada api Islam: ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Memasuki bulan Agustus 1964, konfrontasi tampak semakin keruh, terutama dengan meningkatnya kampanye anti-Amerika di Indonesia menyusul dikeluarkannya Komunike Bersama Johnson-Tengku yang dituduh sebagai komplotan baru yang mengancam RI. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan keputusan tentang penghentian kegiatan AMPAI yang berarti pembubaran badan penyalur kebudayaan asing (AS) ke Indonesia.

Situasi bertambah gawat ketika Presiden Soekarno memerintahkan ABRI untuk meningkatkan kesiap-siagaan menyusul adanya aksi demonstrasi kapal perang Inggris-AS di sekitar perairan Indonesia. *Harian Rakyat* edisi 5 September menyerukan: "Lebih baik mati daripada hidup dijajah. Merdeka atau Mati!" *Harian Suluh Indonesia* menyatakan keyakinannya bahwa apapun tingkah Malaysia dan para penyokongnya, keruntuhan Neokolonialisme tidak dapat dicegah.

Sinar Harapan edisi 16 September mengecam aksi demonstrasi kekuatan itu dengan mengatakan:

... Dwikora harus ditingkatkan sehingga dapat menghadapi segala kemungkinan. Termasuk ketolololan kaum militer Inggris yang agaknya sudah gatal mau adakan provokasi perang: yang jika pecah... pasti akan menjalar, membakar seluruh belahan bumi ini. Ternyata selama setahun menghadapi gertakan dan ancaman perang Inggris gairah juang rakyat semakin meningkat.

Di tengah suasana yang genting itu, untuk efisiensi pelaksanaan Dwikora di seluruh Indonesia, dibentuklah Penguasa Pelaksana Dwikora di seluruh Indonesia dan Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) melalui Keppres PANGTIABRI/KOTI/KOTOE No. 52/ KOTI/1964 pada tanggal 14 September 1964. *Harian Suluh Indonesia* menyangsikan keandalan keputusan itu dalam pelaksanaannya. *Harian* ini mengingatkan kekakuan keputusan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya justru memberikan hasil yang impoten.

Sinar Harapan menekankan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak menghidupkan hantu SOB dari kuburannya seperti dikhawatirkan banyak pihak. Lebih jauh, *Sinar Harapan* menyambut dan sangat mendukung unsur musyawarah dan gotong-royong yang diberi tempat menonjol dalam keputusan itu. Namun di atas semua itu, *Sinar Harapan* edisi 16 September menyatakan:

Yang penting ialah bahwa pelaksanaannya tidak kaku sehingga bukannya menstimulir militan rakyat, tapi terlalu mengekang... mudah-mudahan dalam pelaksanaannya dapat mencegah otoriter seorang penguasa.

Harian Duta Masyarakat menilai bahwa diefektifkan program pengganyangan Malaysia perlu disertai usaha-usaha memperkuat *home front*, baik di bidang sosial-ekonomi dan politik maupun mental. *Duta Masyarakat* mengharapkan keputusan baru tersebut akan mempercepat terganyangnya Nekolim Malaysia secara tuntas. *Harian Merdeka* mengingatkan bahwa meningkatnya konfrontasi berarti pula mempertajam kewaspadaan, mempersenjatai diri untuk bisa menghadapi setiap kemungkinan. "Kita sudah berada di tengah jalan revolusi dan tidak ada istilah pantang mundur: Ganyang terus Malaysia sampai tamat riwayatnya!" tegas harian ini.

Menjelang akhir 1964, konfrontasi total diperhebat lagi. Hal ini terutama disebabkan oleh sikap AS yang secara terang-terangan menyokong Malaysia, baik secara politik dan ekonomi maupun militer, sehingga kampanye anti-Amerika nyaris

tak terkendali di Indonesia. Di sisi lain, pertentangan internal antarkekuatan politik Indonesia semakin meruncing dan mendorong Presiden Soekarno mempertemukan kesepuluh partai politik di Bogor. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Bogor yang menurut *Harian Rakyat* "tidak ada yang kalah selain musuh, dan semua menang selain musuh!" tulis *Harian Rakyat* dalam Editorialnya tanggal 14 Desember 1964. Dalam kaitan itu pula, *Suluh Indonesia* mengutip pernyataan Asmara Hadi dan Ali Sastroamidjojo yang mengatakan: "... antara kawan harus ditempuh konsultasi dan terhadap lawan konfrontasi!"

Dalam penilaiannya tentang Deklarasi Bogor, *Harian Rakyat* edisi 15 Desember 1964 menyerukan:

... Dengan ini hendaknya dihentikannya, sekali dan selamanya, misalnya tafsiran oleh HMI, Soksi, dan BPS atas Marhaenisme, atau tafsiran golongan Katolik terhadap Marxisme, dan sebagainya.

Pada akhir 1964, perhatian surat kabar terhadap konfrontasi dengan Malaysia tampak menurun drastis akibat pertentangan tajam antara koran-koran PKI dan simpatisannya melawan koran-koran pendukung BPS. Pertentangan itu akhirnya berbuntut pada pembubaran BPS oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Desember 1964. Walaupun demikian, tidak berarti elan revolusioner "mengganyang Malaysia" juga ikut menyurut drastis.

Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sebuah rapat umum anti pangkalan asing di Jakarta, 7 Januari 1965, Presiden Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Keputusan itu secara resmi baru disampaikan kepada Sekjen PBB pada bulan Maret 1965 karena Pemerintah Indonesia memerlukan waktu untuk menggalang dukungan politis dari kekuatan non-blok sekaligus untuk memperoleh senjata. Keputusan tersebut menunjukkan konsistensi sikap Presiden Soekarno atas pidatonya di PBB pada 1960 yang antara lain berisi tekad bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan Nekolim dan perlunya PBB *diretool* menuju terciptanya tatanan dunia baru.

Keluaranya Indonesia dari PBB diperkuat lagi dengan dikeluarkannya "Deklarasi Indonesia keluar dari PBB" oleh Sidang DPA pada 18 hingga 20 Januari 1965. Menyambut Deklarasi itu, *Harian Rakyat* edisi 21 Januari menulis dalam Editorialnya:

Sungguh suatu Deklarasi yang bersejarah. Bersejarah karena ia mencerminkan dengan jelas perasaan, pikiran, dan tekad rakyat Indonesia. Deklarasi secara tepat menilai PBB tidak representatif, tidak mencerminkan imbalan kekuatan dunia yang sudah berubah. Zaman perjuangan kemerdekaan yang melanda planit kita tidak tercermin dalam komposisi PBB.

Untuk meningkatkan dan mengintensifkan daya juang, baik di bidang ofensif maupun defensif, Indonesia memperbesar jumlah sukarelawan di Kalimantan Utara sebanyak 1150 orang berdasarkan Keppres No. 12/KOTI/1965 yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 1965. Di bawah pimpinan langsung Presiden Soekarno tanggal 19 Maret 1965, kaum buruh dan KOTI mengambilalih perusahaan-perusahaan minyak AS dan untuk sementara berada di bawah penguasaan Pemerintah RI. *Harian Rakyat* edisi 20 Maret menyambut gembira tindakan itu dengan menyatakan:

Semalam banyak putera-puteri Indonesia mencururkan air mata. Begitu gembiranya mereka! Minyak, salah satu benteng terakhir imperialisme AS di Indonesia... telah diambil... dan patriot mana yang tak akan ikut berbahagia dan bangga. Salut kita kepada kaum buruh Nasakom yang gagah berani... KOTI yang mengambilalih keputusan cepat dan tepat! Salut kita kepada Presiden Soekarno.

PKI dan terompetnya, *Harian Rakyat*, memang pantas bergembira karena musuh nomor satu mereka telah dicuci bersih dari bumi Indonesia oleh pemerintahan Soekarno. Namun ketegangan yang memuncak dengan AS ditambah lagi keputusan Indonesia keluar dari PBB justru semakin mempersulit posisi Indonesia ke dalam maupun keluar. Di dalam negeri, pemerintah makin masuk dalam perangkap pengaruh PKI. Secara eksternal, di satu pihak Indonesia makin menjauhi Moskow tetapi di lain pihak makin mendekati Peking dan Piyongyang.

Harian *Duta Masyarakat* menandakan bahwa membaik atau memburuknya hubungan Indonesia dengan AS tergantung sepenuhnya pada pihak AS. Kalau AS berada segaris dengan politik internasional RI, *Duta Masyarakat* dalam edisi 16 April 1965 menyatakan:

... tidak ada persoalan lagi. Tidak ada alasan untuk bertengkar. Tidak ada gunanya hubungan menjelek. Hari inipun segala-galanya menjadi beres. Kami selalu siap dengan sambutan kapan saja sikap internasional AS menunjukkan garis yang positif menurut ukuran aspirasi kemerdekaan dan perdamaian sejati di dunia.

Komentar Duta Masyarakat itu merupakan tanggapan terhadap Komunique Bersama RI dengan AS menyusul kedatangan Duta Khusus Washington Bunker ke Jakarta dalam rangka meredakan ketegangan hubungan kedua negara. *Suluh Indonesia* menanggapi hal yang sama dengan mengatakan bahwa komunique itu menunjukkan betapa besar *good-will* rakyat Indonesia terhadap AS untuk memelihara hubungan baik antara kedua negara. Dalam pada itu, *Suluh Indonesia* menekankan bahwa *good-will* yang besar itu tidak perlu diartikan sebagai pengorbanan prinsip." Demikian *Suluh Indonesia* edisi 21 April 1965.

Sedikit meredanya hubungan RI-AS ternyata tidak mempengaruhi jalannya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini terutama ditunjukkan oleh sikap Presiden Soekarno yang tidak bersedia bertemu dengan PM Abdurachman di Tokyo. *Harian Rakyat* berpendapat: "... untuk apa lagi kita berunding sekarang ini. Pengalaman sudah membuktikan kebohongan kaum imperialis dan bonekanya Abdurachman." *Harian Duta Masyarakat* menggambarkan kebulatan tekad Bung Karno-kekuatan Nasakom dan Rakyat untuk menolak hadir di Tokyo ibarat "Bertemu ruas dengan buku". Demikian Induk Karangan *Duta Masyarakat* edisi 4 Mei 1965.

Harian *Merdeka* melihat rencana pertemuan di Tokyo itu sebagai siasat licik kaum imperialis yang tampak sudah tidak berdaya menghadapi konfrontasi total Indonesia terhadap Nekolim. *Harian Sinar Harapan* berpendapat Indonesia bukan

tidak suka musyawarah atau damai, namun Indonesia berpegang teguh pada prinsip mengutamakan kemerdekaan dan kehormatan bangsa dan negara.

Arah konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia mulai menemukan sasaran utamanya pada pertengahan 1965. Hal itu berawal dari cekcok terbuka antara Tengku Abdulrachman dengan PM Lee Kuan Yew dari Singapura yang berbuntut keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia. Bahkan Singapura mengimbau Sabah dan Serawak untuk meninggalkan Federasi Malaysia. *Duta Masyarakat* edisi 18 Juni menyatakan:

Bagaimanapun juga satu hal yang pasti, percekocokan di antara tokoh-tokoh ini merupakan kontradiksi yang menggoyahkan. Di atas kepala, Inggris mengangkangi, di kaki bara yang membakar.

Masalah dan kesulitan yang dihadapi Singapura dalam integrasinya dengan Federasi Malaysia memang sudah muncul sejak awal pertumbuhan proyek Nekolim itu. Dan apa yang ditulis *Duta Masyarakat* menjadi nyata ketika tanggal 9 Agustus 1965 Singapura secara resmi menyatakan keluar dari Federasi Malaysia. *Harian Angkatan Bersenjata* yang membawa suara Angkatan Bersenjata (RI) dan terbit pertama kali tanggal 9 Maret 1965, dalam edisi 10 Agustus menyatakan sindiran sekaligus optimismenya:

Peristiwa ini membuktikan bahwa setiap gagasan hasil kerja Nekolim yang menginjak-injak hak asasi tak akan berusia lanjut. Rontoknya Singapura sebagai jantung hati Malaysia merupakan peringatan yang jitu kepada budak-budak Malaysia di Kuala Lumpur bahkan majikannya di London bahwa konfrontasi Indonesia berada di rel yang benar serta diridhoi Tuhan. Bahkan tanpa mengkonsentrasikan kekuatan secara fisik nyata pun, Malaysia sudah rontok dan pasti hancur. Sinar kemenangan konfrontasi Indonesia kian terpancar dengan megahnya di balik redup-redup nafas Nekolom yang naas mempertahankan diri.

.. Dalam semangat konfrontasi yang disemени dengan persatuan Nasakom dan ABRI, maju terus mengganyang Nekolom. Rakyat Indonesia siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Kita pasti menang!

Lain lagi komentar *Suluh Indonesia* menyambut keluarnya Singapura dari

Federasi Malaysia. Dalam Tajuknya edisi 10 Agustus, *Suluh Indonesia* mengatakan "Ini adalah salah satu hadiah 17 Agustus buat rakyat Indonesia." Dalam edisi keesokannya, Tajuk *Suluh Indonesia* menulis:

Kemenangan yang kita capai ternyata bukan saja makin besar tetapi juga jangka waktunya makin pendek. Belum lagi dua tahun kita berhasil membebaskan Irian Barat, sekarang kita merontokkan Malaysia.

Namun *Kompas* yang terbit pertama kali tanggal 28 Juni 1965 menyangsikan kemungkinan Lee Kuan Yew yang berwatak dinamis itu untuk benar-benar lepas dari Inggris. Dalam Tajuk Rencananya edisi 23 Agustus, *Kompas* menunjukkan perlunya peranan Indonesia sebagai tetangganya yang besar untuk membantu dia lepas dari Inggris:

Di sinilah letak peranan kita... Ada dua hal yang perlu diperhatikan sekarang ini: memperkuat posisi untuk mendesak Inggris mundur dari Asia Tenggara dan sekaligus mempengaruhi orientasi Singapura yang bebas dari Inggris.

Harian Rakyat, seperti halnya *Suluh Indonesia*, meramalkan kehancuran proyek Nekolim itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun dalam edisi 12 Agustus 1965, *Harian Rakyat* mengingatkan: "Awas! Nekolim mungkin menggunakan perkembangan baru ini untuk mendongkrak kita. Lanjutkan Dwikora dan tingkatkan kewaspadaan kita."

Kenyataannya memang demikian bahwa konfrontasi berjalan terus bahkan semakin ditingkatkan sejak bulan Agustus. Ketika menerima Menko/Kasab Jenderal A.H. Nasution tentang perkembangan di Kalimantan Utara, Presiden Soekarno menginstruksikan supaya konfrontasi berjalan terus sampai semua pangkalan militer Nekolim lenyap dari sekitar kita. *Harian Angkatan Bersenjata* edisi 12 Agustus pada bagian pojok di bawah Editorial mengutip pernyataan Menko Hankam/Kasab bahwa: "Konfrontasi anti Nekolim tak akan selesai sebelum hapusnya pangkalan Singapura dan Hongkong."

Kewaspadaan nasional tampak memang mewarnai situasi konfrontasi dalam bulan Agustus dan September 1965. Hampir semua surat kabar menyerukan hal ini mengingat atmosfir politik di Asia Tenggara semakin sulit diraba, sementara pertarungan terselubung di dalam negeri semakin tajam dikemukakan. Dominasi dan pengaruh PKI yang makin luas dan kuat di hampir semua lembaga negara dan ABRI maupun masyarakat di pedesaan semakin mengkhawatirkan pihak-pihak yang anti-PKI, termasuk kalangan pers.

Suasana mencekam itu pun datang ketika PKI melancarkan kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September. Peristiwa tragis ini ternyata membawa implikasi yang luas dan dalam bagi bangsa dan negara RI. Kudeta berdarah itu juga merupakan titik balik yang mendorong Indonesia melakukan reorientasi politik konfrontasi terhadap Malaysia menuju penyelesaian damai secara bilateral.

BAB V

KESIMPULAN

Bab Kesimpulan ini dibagi dalam tiga sub-bab, yaitu Interpretasi, Generalisasi dan Karakterisasi, serta Konklusi. Sub-bab **Interpretasi** merupakan suatu usaha untuk menjelaskan hubungan antar-konsep seperti hubungan antara sistem politik Demokrasi Terpimpin dan Pers Terpimpin; dan pola hubungan antara pemerintah dan partai politik di satu pihak dengan dunia pers (pers partai) di pihak lain di bawah sistem politik Demokrasi Terpimpin (lihat lampiran 11).

Dalam sub-bab **Generalisasi dan Karakterisasi** digambarkan secara umum berbagai isu atau gejala di balik Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dikemukakan di Tajuk Rencana, Induk Karangan, atau Editorial dari ketujuh surat kabar yang diteliti. Selanjutnya bagaimana masing-masing surat kabar menyatakan pandangan dan sikap terhadap isu-isu yang erat kaitannya dengan karakteristik dan politik setiap surat kabar, baik dalam perspektif pers sebagai corong partai politik maupun sebagai alat revolusi di dalam kerangka politik Demokrasi Terpimpin. Karakteristik di sini mengacu pada visi dan misi surat kabar, sedangkan politik surat kabar lebih sebagai strategi agar tetap survival di bawah tekanan rezim penguasa.

Bab ini ditutup dengan sub-bab Konklusi, yakni suatu usaha untuk menarik kesimpulan mengenai pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia Malaysia. Kesimpulan ini ditarik secara kritis dan logis dari dua sub-bab terdahulu.

5.1. Interpretasi

Eksistensi dan kehidupan pers sebagai pencerminan dari sistem politik merupakan suatu kenyataan yang menyejarah di Indonesia. Hal itu terbukti jelas dari hasil kajian empirik yang dilakukan Edward C. Smith yang menyimpulkan bahwa

eksistensi dan kehidupan pers di Indonesia sepanjang sejarahnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuasaan. Ketergantungan pers terhadap politik mencapai puncaknya di bawah sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan semboyan "politik adalah panglima", pers Indonesia benar-benar berada dalam posisi yang sangat lemah sehingga mudah ditundukkan dan dikendalikan penguasa. Bahkan citra pers sebagai corong partai politik dan ideologi praktis tidak tampak sama sekali. Sebab pers hanya boleh menyuarakan pernyataan dan kepentingan pemerintah.

Presiden Soekarno yang berada di puncak dan menguasai percaturan politik nasional melakukan pengawasan secara ketat terhadap pers. Ia bahkan berhasil menguasai pers sedemikian untuk mengeksploitasi falsafah politiknya. Surat kabar yang berhaluan lain dan menolak tunduk kepada politik Soekarno dianggap "musuh revolusi" dan oleh karena itu harus disingkirkan demi "revolusi yang belum selesai". Apalagi dengan memanfaatkan UU Darurat Perang (SOB) sejak bulan Maret 1957, setiap penguasa sepertinya boleh sekendak hatinya menyerang pers. Sementara perlindungan terhadap pers berupa UU Pers tidak pernah ada. Kalaupun ada, fungsinya bukan untuk melindungi, tetapi justru sebaliknya mematikan kebebasan pers. Sebab, pers bebas bisa mengganggu revolusi.

Di sisi lain, sebagai alat revolusi yang andal, Presiden Soekarno dalam kedudukan dan kekuasaan yang semakin kuat, memerlukan pers untuk mengindoktrinasi masyarakat mengenai Demokrasi Terpimpin dan Manipol. Termasuk gagasan-gagasan politiknya seperti Nasakom, Dekon, Ganefo, Nefos, dan Oldefos. Tidak mengherankan kalau jumlah tindakan antipers terus menurun sejak 1959. Lagipula, walaupun kekuasaan Presiden sudah demikian besar masih ada pusat kekuasaan lain di sampingnya, yakni Angkatan Bersenjata, di samping PKI (Politik Segitiga).

Kekuasaan Angkatan Bersenjata sebagian diperoleh berkat kemenangannya dalam menghadapi pemberontak PRRI di Sumatera, sementara Presiden Soekarno

yakin bahwa kaum pemberontak mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Barat, khususnya Amerika Serikat. Walaupun Pemerintah mengurangi tindakan anti-pers dan sebaliknya semakin membutuhkan pers, namun pers agaknya sudah dihindangi trauma yang cukup dalam sehingga tampak kehilangan gairah dalam membuat berita maupun tajuk rencana. Di pihak lain, Pemerintah sendiri tetap mengontrol dan masih gigih menyerang pers, biarpun kadangkala siaran berita atau tajuk yang dibuat kurang berbahaya.

Pers agaknya tidak menemukan jalan lain lagi untuk mempertahankan diri. Kelangkaan sumber dan suasana protektif bagi pers di satu pihak, dan meluasnya ketegangan antara kekuatan-kekuatan politik dalam negeri, terutama antar-kekuatan politik segitiga, bagaimanapun dapat meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kritik maupun sikap dan haluan "politik lain" dari politik pemerintah. Undang-Undang Pers yang disahkan tahun 1960 justru mematikan kebebasan pers dan bukan untuk melindungi pers. Pada akhir 1960, pers pada hakekatnya sudah dinasionalisasikan. Sejak 1961, pers Indonesia praktis kehilangan segala-galanya. Secara kuantitatif tinggal sedikit sekali pers yang masih boleh hidup dan secara kualitatif pers praktis tidak lagi berfungsi dan berperan semestinya.

Di tengah suasana ketegangan dan semangat revolusioner di dalam negeri serta kesemaran politik luar negeri, terutama perjuangan merebut Irian Barat dan politik konfrontasi terhadap Malaysia, semua instruksi dan aturan permainan berada di tangan penguasa perang tertinggi, yakni presiden sendiri. Pemberitaan surat kabar harus berdasarkan perintah dalam rangka Manipol oleh Presiden dan bahan berita dari pemerintah. Dengan demikian, pers partai sebagai alat perjuangan partai politik atau ideologi tertentu tinggal "stempelnya" saja, sebab semua harus menyuarakan politik dan keinginan pemerintah. Pandangan dan sikap pers harus berjalan seiring dengan pandangan dan sikap pemerintah kalau tidak ingin diberangus karena dicap kontrarevolusioner. Barangkali yang menjadi pengecualian dalam hal ini, sesuai

dengan "tempat dan kekuasaan" yang dimilikinya, adalah koran-koran PKI dan sebagian PNI beserta simpatisannya. Mereka praktis lebih berani bersuara, terutama terhadap lawan-lawan mereka di luar pemerintah.

Ketika pemerintah melancarkan politik konfrontasi terhadap Malaysia, sebagai salah satu alat dan kekuatan revolusioner, pers harus mendukung sepenuhnya politik nasional tersebut. Tidak boleh terdengar suara sumbang di tengah arus revolusioner "Menggangyang Malaysia". Konfrontasi terhadap Malaysia, baik dalam dimensi politik maupun ekonomi dan militer, harus mendapat perhatian mendalam dengan intensitas tinggi dari setiap surat kabar untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Pandangan dan sikap pers terhadap isu-isu di balik politik konfrontasi juga harus mencerminkan pandangan dan sikap pemerintah, terlepas dari setuju atau tidak, sejalan atau bertentangan dengan visi dan misi politik ataupun ideologi yang dianut setiap surat kabar.

Ironisnya, pola hubungan dan interaksi antara partai politik dengan surat kabar sebagai organnya tetap terpelihara di dalam kerangka Nasakom. Seperti telah disebutkan, periode 1963-1965 memperlihatkan kedudukan dan pengaruh partai meningkat lagi sejalan dengan merosotnya kekuasaan TNI-AD. Selain sifat konservatif dan hilangnya wewenang resmi TNI-AD setelah berakhirnya SOB, Presiden Soekarno beralih perhatian kepada parpol dan ormas dalam melahirkan ide-ide baru dan usulan-usulan ideologis maupun dalam meraih dukungan massa. Namun pers umumnya tidak memiliki "kekuatan dan jalan" untuk menyuarakan kepentingan politik atau ideologi partai tempat ia berafiliasi. Padahal hampir semua surat kabar mendapat bantuan "dana dan orang" dari partai, walaupun secara kuantitas maupun kualitas berbeda satu dengan lainnya.

5.2 Generalisasi dan Karakterisasi

Pola "hubungan semu" antara pers partai dengan partai politik terlihat cukup

jelas pada masalah konfrontasi Indonesia - Malaysia (lihat **lampiran 12**). Pandangan dan sikap pers terhadap konfrontasi, baik terhadap jenis maupun argumen di balik isu-isu yang muncul, tampak mengekor pada pandangan dan sikap pemerintah. Pandangan dan sikap pers yang terlihat di halaman Editorial, Tajuk Rencana, atau Induk Karangan "sangat samar-samar" mencerminkan visi maupun misi politik dan ideologi tertentu.

Pers pada umumnya memberikan pandangan dan sikap terhadap isu-isu tertentu dengan mengacu "persis atau sedekat mungkin" pada pandangan dan sikap pemerintah, terutama Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Dalam jumlah dan kedalaman yang relatif sangat terbatas, pandangan dan sikap surat kabar didasarkan atas pernyataan pimpinan partai politik tertentu. Tercatat *Harian Rakyat* paling banyak mengutip dan memberi komentar atau analisis secara kritis dan mendalam, kadangkala sangat tajam, terhadap pernyataan Ketua C PKI D. N. Aidit. Disusul *Harian Suluh Indonesia* terhadap Ketua PNI Ali Sastroamidjojo dan *Harian Merdeka* terhadap BM Diah, serta *Harian Angkatan Bersenjata* terhadap KASAB Jenderal Nasution. Selebihnya, *Duta Masyarakat*, *Sinar Harapan*, dan *Kompas*, tidak pernah memberikan pandangan atau sikap terhadap isu tertentu berdasarkan pandangan dan sikap, bahkan mengutip sekalipun, pimpinan NU, Parkindo, dan Partai Katolik.

Ketiga surat kabar terakhir pada umumnya mengutip dan memberi komentar secara terbatas terhadap pernyataan sikap dan pandangan pemerintah mengenai berbagai isu yang muncul. Berbeda dengan keempat koran lainnya, terutama *Harian Rakyat* dan *Suluh Indonesia*, ketiga koran yang bernafaskan agama tersebut sangat berhati-hati dalam menyatakan pandangan atau sikap. Bahkan *Kompas*, di samping "sangat kabur" keterkaitannya dengan Partai Katolik, visi dan sikapnya terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia sangat sulit terbaca.

Walaupun demikian, ketujuh surat kabar di atas memiliki garis persamaan

dalam beberapa hal. **Pertama**, isu-isu yang dimunculkan dalam Tajuk masing-masing surat kabar hampir sama -kecuali *Angkatan Bersenjata* dan *Kompas* karena baru terbit tahun 1965-, walaupun perspektif yang digunakan berbeda. Kalau ditinjau dari frekuensi kemunculan maupun kedalaman analisis, urutan isu-isu yang dimaksud adalah Kolim-Nekolim, kepribadian PM Tengku Abdulrachman, peranan Inggris dan campur tangan Blok Barat (AS, Australia, dan Selandia Baru), Nefos (Kalimantan Utara) yang dipertentangkan dengan Oldefos (lihat **lampiran 11**).

Kedua, bahwa tidak ada satu koran pun yang menentang atau menyatakan kekurangsetujuannya terhadap politik konfrontasi Pemerintahan Soekarno terhadap Malaysia. Semenjak politik konfrontasi dicetuskan pada awal 1963, semua surat kabar menyatakan: "Ganyang Malaysia, Ganyang Tengku, Hancurkan Neokolonialisme!" *Harian Rakyat*, sedikit di bawahnya *Suluh Indonesia*, yang paling gencar memberitakan dan menganalisis setiap peristiwa dan perkembangan masalah Malaysia. Gaya bahasa dan pilihan katanya pun sangat tajam menjurus kasar.

Ketiga, seperti telah disinggung di atas, hampir semua surat kabar berusaha membangun pandangan dan sikapnya di atas pernyataan Pemimpin Besar Revolusi/ Presiden Soekarno, baik dalam pidato resmi kenegaraan, ceramah, kuliah maupun dalam rapat-rapat umum dalam rangka "Ganyang Malaysia". Selain itu, pernyataan yang sering dikutip sebagai acuan analisis adalah dari Menlu Subandrio untuk konfrontasi politik (diplomasi), Menteri Ekonomi Dr. Leimena untuk konfrontasi ekonomi, dan Jenderal A. H. Nasution untuk dimensi militer.

Meski ada beberapa kesamaan, tetap ada perbedaan yang menjadi karakteristik masing-masing surat kabar dalam menyoroti permasalahan maupun dalam menyatakan sikap atau pandangan masing-masing. *Harian Rakyat* secara ideologis berhaluan komunis (PKI) sehingga tidak mengherankan bila "musuh utama" yang dikejanya adalah Amerika Serikat, Inggris dan kawan-kawan. AS yang merupakan pemimpin Blok Barat yang berhaluan liberal-kapitalis bahkan dianggap

sebagai musuh nomor satu RI. Ironis memang klaim itu bukan ditujukan kepada Inggris yang justru menjadi arsitek proyek Malaysia karena berbagai kepentingannya yang besar dan luas. Bahkan harian komunis ini melihat PM Abdulrachman dan Malayanya tidak lebih sebagai "boneka" Nekolim Inggris dan pemimpin utamanya adalah AS.

Sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh *Harian Rakyat* terutama kepada AS bagaimanapun tidak terlepas dari kedudukan dan peranan AS sebagai pemimpin dan penggerak utama negara-negara Blok Kapitalis. Dalam konteks perang dingin yang bersifat bipolar, blok kapitalis merupakan musuh utama blok komunis. Maka tidak mengherankan apabila *Harian Rakyat* yang menjadi corong utama kaum komunis Indonesia (PKI) juga menempatkan AS sebagai musuh utama.

Di sisi lain, dengan meluas dan menguatnya dominasi serta pengaruh PKI dalam percaturan politik nasional di bawah Sistem Demokrasi Terpimpin, *Harian Rakyat* dengan tegas dan gayanya yang lugas menyatakan bahwa proyek Malaysia tidak lain merupakan benteng terakhir bagi kaum Nekolim di Asia Tenggara. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, yang dimaksud *Harian Rakyat* sebenarnya adalah "benteng terakhir blok kapitalis dalam rangka politik pembendungannya terhadap Komunisme" di Asia Tenggara. Teori domino Komunisme memang semakin terbukti setelah Cina, Korea Utara, dan Vietnam secara beruntun jatuh ke dalam komunisme. Mulai dari AS, Perancis, sampai Belanda di Irian Barat, sudah angkat kaki dari Asia-Pasifik. Satu-satunya yang tersisa dan ingin dipertahankan sekuat tenaga adalah Inggris di Asia Tenggara. Berarti tinggal Inggris satu-satunya "musuh" yang tersisa bagi kaum komunis di kawasan ini yang juga harus diusir.

Dalam kerangka itu, *Harian Rakyat* menyerang Inggris habis-habisan, apalagi ketika AS secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Malaysia. Dibandingkan surat kabar lainnya, *Harian Rakyat*-lah yang paling kuat dan paling

banyak berteriak: "Kita sedang dikepung oleh Neokolonialisme dari segala penjuru!" Harian ini pulalah yang paling banyak dan dengan gencar melancarkan berbagai isu yang ditujukan kepada AS, Inggris, dan kawan-kawan. Mulai dari keterlibatan Inggris, AS, Australia, dan Selandia Baru di dalam proyek Malaysia sampai pada kritikan, sindiran, dan kecaman terhadap lembaga-lembaga kerja sama regional dan internasional seperti ANZUS, NATO, IOC, dan PBB.

ANZUS dan NATO jelas-jelas merupakan kerja sama negara-negara dari blok kapitalis. IOC dan PBB dituduh telah dikuasai dan seringkali dieksploitasi oleh negara-negara imperialis Barat untuk "melegitimasi" keluarnya Indonesia dari kedua lembaga internasional tersebut. Bahkan, *Harian Rakyat* sering mengikuti dan mengecam tindak-tanduk AS di negara-negara lain seperti di Kuba, Korea, dan Vietnam, termasuk Irian Barat dan Malaysia. Sifat-sifat ekspansionis dan eksploitatif di mata *Harian Rakyat* pada hakikatnya merupakan "watak imperialis" AS, Inggris, dan kawan-kawan.

Harian Suluh Indonesia (Sulindo) tidak kalah revolusionernya dengan *Harian Rakyat*. Perhatian surat kabar milik dan menjadi "terompet" PNI ini terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia relatif cukup besar, sedikit di bawah *Harian Rakyat*. Demikian juga pandangan dan sikapnya terhadap berbagai isu menyangkut proyek Malaysia maupun politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, walaupun tidak setajam dan seradikal *Harian Rakyat*. Kalau *Harian Rakyat* menuding AS, Inggris, dan kawan-kawan sebagai arsitek utama proyek Nekolim Malaysia dan karena itu harus "diperangi" pertama kali, *Suluh Indonesia* tidak menyatakan itu secara eksplisit. Bahkan dalam pandangan *Suluh Indonesia*, peran yang dimainkan PM Abdurachman tidak kalah "gawatnya" dengan peran si arsitek nekolim Inggris. Tidak mengherankan kalau *Suluh Indonesia* menyoroti secara seimbang PM Abdurachman dan Inggris.

Isu-isu yang dimunculkan surat kabar kaum nasionalis radikal ini juga relatif

terbatas dibandingkan *Harian Rakyat*, dalam pengertian sejalan dengan apa yang terjadi dan sedang berkembang. Pernyataan sikap dan pandangannya juga tidak seradikal dan setajam *Harian Rakyat*, walaupun tetap kritis dan memakai optik nasionalismenya. *Suluh Indonesia* memang menempatkan Kolim dan Nekolim sebagai musuh utama, namun tidak menyebut secara langsung AS dan kawan-kawan sebagai musuh nomor satu Indonesia. Selain mengacu pada pernyataan pemerintah, *Suluh Indonesia* juga seringkali menyatakan sikap atau pandangannya berdasarkan pernyataan politik ketua PNI.

Harian Suluh Indonesia memang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan politik dan ideologi kaum nasionalis yang bergabung dalam PNI, tetapi mereka terhimpit di antara paling kurang dua kekuatan. Di satu sisi, PNI berikut *Sulindonya* harus tunduk kepada politik pemerintah. Di sisi lain, dominasi pengaruh dan kekuasaan PKI berikut *Harian Rakyat*-nya semakin luas dan kuat. Belum lagi kekuatan *Angkatan Bersenjata* dengan SOB-nya merupakan ancaman tersendiri yang tidak kalah hebatnya.

Dengan demikian, walaupun PNI dengan terompet *Sulindo*-nya merupakan wadah kaum nasionalis radikal dan terhitung masih memiliki kekuatan dalam percaturan politik nasional, namun masih kalah dari PKI berikut *Harian Rakyat*-nya. Tetapi dibandingkan surat kabar lain di luar *Harian Rakyat*, *Sulindo* masih tergolong paling radikal dan revolusioner progresif. Hal ini -sebagaimana diinformasikan oleh Yohanes Barus⁽¹⁾ kepada penulis dalam suatu wawancara- tentu saja sesuai dengan kedudukan dan peranan PNI sebagai partai politik terbesar kedua dalam pengaruh sesudah PKI pada masa Demokrasi Terpimpin, terutama dalam periode 1963-1965.

Harian Merdeka juga merupakan surat kabar kaum nasionalis di bawah pimpinan B.M. Diah. Namun harian ini independen dan selalu mendapat "restu"

1). Wawancara lisan dengan Yohanes Barus (waktu itu wakil Sekjen Partindo) pada 1992 dan 1993 di Jakarta.

dari Presiden Soekarno. Dengan demikian tidak mengherankan kalau *Merdeka* selalu kritis dan berani menyatakan sikap dan pandangannya terhadap sesuatu masalah. Dari wawancara dengan seorang tokoh Partai Katolik, Dr. B.P. Paulus, SH,⁽²⁾ terungkap bahwa BM Diah memang pengagum Bung Karno. Keterangan yang sama juga diperoleh penulis dari Wakil Pemimpin Redaksi Sinar Harapan Soebagyo-Pr. BM Diah bahkan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Inggris pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Dari keterangan di atas, walaupun BM Diah tidak memimpin *Merdeka* pandangan dan sikap harian ini cukup tajam dan kritis dalam menyoroti masalah Malaysia dan politik konfrontasi. Pandangan dan sikapnya yang anti-Nekolim tercermin pada setiap Induk Karangannya. Namun berbeda dengan *Harian Rakyat* maupun *Sulindo*, *Merdeka* lebih banyak membangun pandangannya atas sesuatu isu berdasarkan logika sejarah bangsa Indonesia dengan nasionalisme sebagai optik utama yang digunakan.

Harian Merdeka memang mempunyai tempat tersendiri dalam dinamika kehidupan pers nasional sejak awal penerbitannya tahun 1945. Dominasi *Harian Rakyat* maupun *Sulindo* pada masa Demokrasi Terpimpin sama sekali tidak mengurangi semangat nasionalismenya dan keberaniannya untuk menyerang secara kritis-rasional setiap pandangan atau sikap yang dianggapnya salah atau merugikan kepentingan bangsa dan negara. Harian ini tidak segan-segan terlibat dalam polemik panjang dengan *Harian Rakyat* dan selalu "lolos" dari krisis yang mengancam eksistensinya.

Harian Angkatan Bersenjata yang didirikan pada Maret 1965 termasuk surat kabar yang berani menyatakan pandangan atau sikapnya terhadap berbagai isu nasional yang muncul. Walaupun usianya relatif muda ketika konfrontasi dengan Malaysia semakin hebat, *Angkatan Bersenjata* langsung tampil meyakinkan dengan

2). Wawancara lisan dengan Dr. B.P. Paulus, SH pada 1992 dan 1993 di Jakarta.

pandangan-pandangannya yang tajam dan gayanya yang lugas. Selain mencerminkan karakter militer, sosok penampilan *Angkatan Bersenjata* begitu menunjukkan eksistensi ABRI dalam percaturan Politik Segitiga. Berbeda dengan surat kabar-surat kabar yang lain, *Angkatan Bersenjata* memang krisis isu sehubungan dengan politik konfrontasi. Namun hal itu sama sekali tidak mengurangi perhatiannya terhadap masalah atau politik nasional tersebut. Sebagai pembawa suara Angkatan Bersenjata RI di tengah meningkatnya konfrontasi militer, *Angkatan Bersenjata* selalu memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan militer, baik menyangkut persiapan dan kekuatan militer Indonesia maupun mengenai bentrok senjata di Kalimantan Utara dan sekitar Malaysia di Semenanjung Malaya. Sementara pandangan dan sikapnya selalu mencerminkan visi maupun misi ABRI, di samping tentunya visi dan misi politik pemerintah. Ini terlihat dari usaha-usaha *Angkatan Bersenjata* untuk membangun pandangannya dengan hampir selalu mengutip pernyataan Menko/KASAB Nasution dan Presiden Soekarno. Bahkan *Angkatan Bersenjata* selalu menyertakan kutipan salah seorang dari kedua tokoh nasional itu di bagian bawah Editorialnya.

Tiga surat kabar terakhir semuanya bernafaskan agama, yakni *Duta Masyarakat* (NU-Islam konservatif), *Sinar Harapan* dan *Kompas* yang masing-masing berafiliasi pada Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Dalam beberapa hal, ketiga surat kabar ini memiliki persamaan dalam menyoroti masalah konfrontasi dengan Malaysia. **Pertama**, perhatian ketiganya terhadap masalah nasional tersebut secara kuantitatif jauh berada di bawah *Harian Rakyat*, *Sulindo*, dan *Merdeka*. Namun secara kualitatif pandangan dan sikap mereka cukup luas dan dalam. **Kedua**, bahwa gaya penyajian ketiga harian ini tidak sekeras dan seekstrim harian yang lain. Namun dibanding *Sinar Harapan* dan *Kompas*, *Duta Masyarakat* masih lebih intens dan berani. Hal ini sejalan dengan sosok NU yang memiliki basis yang luas dan pengaruh yang kuat.

5.3. **Konklusi**

Dari semua pembahasan terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan. **Pertama**, pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia lebih memperlihatkan banyak kesamaan daripada perbedaan. Politik Konfrontasi terhadap Malaysia sebagai politik nasional tidak boleh dipandang lain kecuali mendukung sepenuhnya. Konfrontasi harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan seluruh bangsa dalam revolusi yang dinyatakan belum selesai. Ketika pemerintah menolak bahkan kemudian melancarkan politik konfrontasi terhadap Malaysia, pers memperlihatkan dukungannya, terlepas dari soal setuju atau tidak. Itu terpaksa dilakukan oleh dunia pers Indonesia supaya tidak dituduh sebagai musuh dan kontrarevolusi. Dengan demikian tidak disingkirkan dari arus revolusi yang sedang berkejolak di seluruh negeri.

Lebih dari itu, pertentangan ideologis-politis domestik hampir tidak kelihatan di permukaan, sebaliknya tenggelam di bawah arus revolusi mengganyang proyek Nekolim Malaysia. Ironis memang, di satu sisi pertentangan ideologis antara komunis dan nonkomunis sudah meruncing tajam sejak 1963, di sisi lain banyak kalangan yang meragukan efektivitas politik konfrontasi dan menganggapnya banyak menguntungkan PKI. Namun tidak ada yang mempersoalkannya secara terbuka. Sekali lagi, hal ini membuktikan dominasi PKI yang sudah sedemikian jauh mempengaruhi politik nasional yang mendapat payung perlindungan dari Presiden Soekarno.

Menurut Soebagyo, PKI memang memerlukan konfrontasi untuk memperkuat posisinya. Sementara bagi Presiden Soekarno, konfrontasi merupakan kompensasi ketidakmampuannya menangani perekonomian nasional dengan mengalihkan perhatian seluruh bangsa kepada konfrontasi. Lebih jauh Hoeta Soehoet⁽³⁾ menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia era 1962-1965 terbelah

3). Wawancara lisan dengan Drs. Hoeta Soehoet (mantan Pemimpin Umum dan Dewan Redaksi Harian Abadi) thn 1993 di Jakarta.

menjadi dua: komunisme melawan nonkomunis, seperti tercermin pada kasus BPS. Namun dikatakannya, semua media massa harus mendukung konfrontasi, termasuk koran-koran anti-PKI seperti *Duta Masyarakat*, *Angkatan Bersenjata*, *Sinar Harapan*, dan *Kompas*.

Kedua, walaupun semua koran harus mendukung politik konfrontasi, bobotnya tidak sama. *Harian Rakyat* tercatat sebagai surat kabar paling keras dengan intensitas tinggi "menyerang Malaysia", disusul harian kaum nasionalis, *Suluh Indonesia* (PNI), dan *Merdeka* (independen). *Harian Duta Masyarakat* dan *Sinar Harapan* relatif lebih lunak dan demokrat dibandingkan surat kabar-surat kabar kelompok pertama yang begitu radikal dalam gagasan maupun gaya pemberitaan. Di antara ketiga surat kabar yang bernafaskan agama, *Duta Masyarakat* lebih menonjol memperlihatkan keislamannya daripada *Sinar Harapan* dan *Kompas*. Sedangkan *Harian Angkatan Bersenjata* jelas-jelas menyuarakan misi ABRI. Pandangan dan sikapnya terhadap Politik Konfrontasi juga cukup radikal dengan gaya yang sangat lugas. Ini tidak terlepas dari dominasi kekuasaan ABRI yang berada di belakangnya.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa secara filosofis maupun logis pragmatis, pandangan dan sikap pers Indonesia terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia memperlihatkan dua atau tiga dimensi sekaligus. Secara filosofis, pers Indonesia tidak kehilangan cara untuk memperjuangkan idealisme pers bebas, walaupun untuk itu banyak juga yang menjadi korban. Di bawah sistem pers Terpimpin yang otoriter, pers Indonesia tetap berjuang untuk misi partai atau ideologi tertentu, termasuk melawan apa yang mereka anggap musuh. Surat kabar-surat kabar anti-PKI membentuk BPS walaupun akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Secara logis-pragmatis, pers Indonesia terpaksa, paling tidak untuk sebagian, menyatakan dukungannya terhadap Politik Konfrontasi terhadap Malaysia, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi, mereka terhimpit oleh kekuasaan pemerintah yang

otoriter, di sisi lain mereka harus dengan sangat berhati-hati memperlihatkan perlawanan mereka terhadap PKI dan terompetnya, *Harian Rakyat*. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menyatakan dukungan terhadap konfrontasi, walaupun kadangkala harus mengorbankan idealisme, termasuk mengorbankan misi partai berikut ideologi yang diembannya. Tetapi kenyataan kemudian membuktikan bahwa begitu Peristiwa G 30 S/PKI meletus, semua surat kabar anti-PKI berbalik total. Seperti dikatakan oleh Soebagyo, tragedi nasional itu bagai bom waktu: semua koran anti PKI balik menyerang surat kabar-surat kabar PKI dan simpatisannya.

Dari situ saja terbukti jelas bahwa Politik Konfrontasi terhadap Malaysia merupakan bagian dari politik strategis PKI. Perhatian pers non-PKI pasca Gerakan 30 September terhadap konfrontasi menurun drastis. Perhatian mereka kini tertuju pada masalah-masalah dalam negeri, terutama menyerang habis surat kabar-surat kabar PKI yang memang sejak 1 Oktober sudah dilarang terbit oleh Peperti, khususnya TNI-AD yang dengan cepat berhasil menggagalkan kudeta PKI.

Perubahan-perubahan mendasar dalam negeri Indonesia itulah yang kelak mendorong pemerintah untuk menjajaki kemungkinan rujuk kembali dengan Malaysia. Malaysia yang memang mulai pecah dengan keluarnya Singapura, ternyata juga memutuskan untuk rujuk dengan Indonesia.

BIBLIOGRAFI

BUKU DAN MAJALAH

- Adams Cindy. 1966. *An Autobiography as told to Cindy Adams*. New York: Indianapolis.
- Abdulgani Ruslan. 1986. "Pertarungan Politik Ideologi Negara-Negara Adikuasa". *Majalah Ilmu dan Budaya*. No. 5. Jakarta: UNNAS.
- Alfian Dr. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Anwar Rosihan. 1981. *Menulis Dalam Air*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Arpan G. Floyd Prof. Dr. 1970. *Wartawan Pembina Masyarakat*. terj. Drs. S. Rochady. Bandung: Bina Tjipta.
- Arifin Anwar. Prof. Dr. H. 1992. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Jakarta: Media Sejahtera.
- Barelson B. 1952. *Content Analysis in Communication Research*. New York: Free Press.
- Brackman C. Arnold. 1966. *Southeast Asia Second Front. The Power Struggle in the Malay Archipelago*. New York: Fred. A. Praeger.
- Departemen Luar Negeri. 1963. *Kumpulan Bahan-bahan Mengenai Masalah Malaysia*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Departemen Penerangan RI. *Gelora Konfrontasi Mengganyang Malaysia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- , Pidato *Kenegaraan Presiden Soekarno* 17 Agustus 1965. Jakarta: 1965.
- Dhakidae Daniel. 1985. "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Feith Herbert. 1964. "Indonesia". *Governments and Politics of Southeast Asia*. ed. Kahin McTurnan George. New York: Cornell University Press.
- , 1973. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca Cornell University Press.
- , 1963. "Dynamics of Guided Democracy". Dalam Ruth Mcvery. *Indonesia*. New Haven: HRAF Press.
- , 1978. "Demokrasi Tantangan Tanpa Akhir". Dalam *Prisma*. Jakarta: LP3ES:
- , 1981. "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 Suatu Pengantar". Dalam *Partisipasi dan Partai Politik*. Miriam Budiardjo ad. Jakarta: PT Gramedia.
- , 1957. "The Indonesian Election of 1955". *Interim Reports Series*. Edisi II. New York: Cornell University Press.

- Floyd David. 1964. *Mao Against Kruschev. Ashort History of The Sino-Soviet Conflict*. New York: Fred. A. Praeger.
- Hindley Donald. 1970. "Alirans and The Fall of The Old Order". dalam *Indonesia*. IX New Haven: HRAF Press.
- Kamtaprawira Rusadi. 1977. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: P.T. Tribisana.
- Kementerian dalam Negeri Malaysia. 1964. *Indonesian Intension Towards Malaysia*. Kuala Lumpur: Pencetak Kerajaan.
- Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*. 1954. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Kosut Hal. 1967. *Indonesia: The Soekarno Years*. New York: Facts on File.
- Krippendorff Klaus. 1991. *Analisis Isi*. terj. Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusumah Hadiningrat. 1971. *Sejarah Operasi-Operasi Gabungan dalam rangka Dwikora*. Jakarta.
- Leirissa Z.R. 1991. *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti.
- Lev S. Daniel. 1966. *The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics 1957-1959*. Ithaca: Cornell University.
- Lubis Mochtar dan Bradley L. William. 1991. *Dokumen-Dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri AS di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Leifer Michael. 1987. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mackie J.A.C. 1974. *Konfrontasi: The Indonesia Malaysia Dispute 1963-1966*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Mc Quail Denis. 1989. *Teori Komunikasi Massa*. terj. Agus Dharma SH dan Drs. Aminuddin. Jakarta.
- Miller Harry. 1966. *Ashort History of Malaysia*. New York.
- Mitchell CR. 1981. *The Structure of International Conflict*. London: Mc Milan Press Ltd.
- Mukmin Hidayat. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasikun Dr. 1987. *Sistem Sosial Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: CV Rajawali.
- Newcomb M. Theodorus. 1990. *Social Psychology*. New York.
- Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nimmo Dan. 1989. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remadja Karya.
- Oetama Jacob. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Onghokham. "Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas". *Prisma*. 8 (1985). 3-11. 1987.
- Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rocamora Elisio J. *Nasionalisme Mencari Ideologi Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Said Tribuana. 1987. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sarwono S. Wirawan. 1987. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta:
- Siregar Effendi Amir. 1983. *Pers Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Serikat Penerbit Surat kabar Pusat. 1971. *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: SPS-Pusat.
- Shadily Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Shamsuddin Wam dan Wati Arena. *Sejarah Tanah Melayu dan Sekitarnya*.
- Smith C. Edward. 1986. *Pembreidelan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.
- S. Fred. Siebert. dkk. *Empat Teori Pers*. 1986. terj. Drs. Putu Laxman. Jakarta: Intermedia.
- Tjeng Tek Lie Dr. "Peranan dan Pengaruh Negara-Negara Besar dalam Perkembangan Kekuatan di Asia Tenggara". Dalam *Percaturan Politik di Kawasan Asia-Pasifik*. 1983. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Yayasan Pendidikan Soekarno. 1989. *Bung Karno dan ABRI*. Jakarta: CV Haji Masagung.

SURAT KABAR**SUMBER LISAN/WAWANCARA**

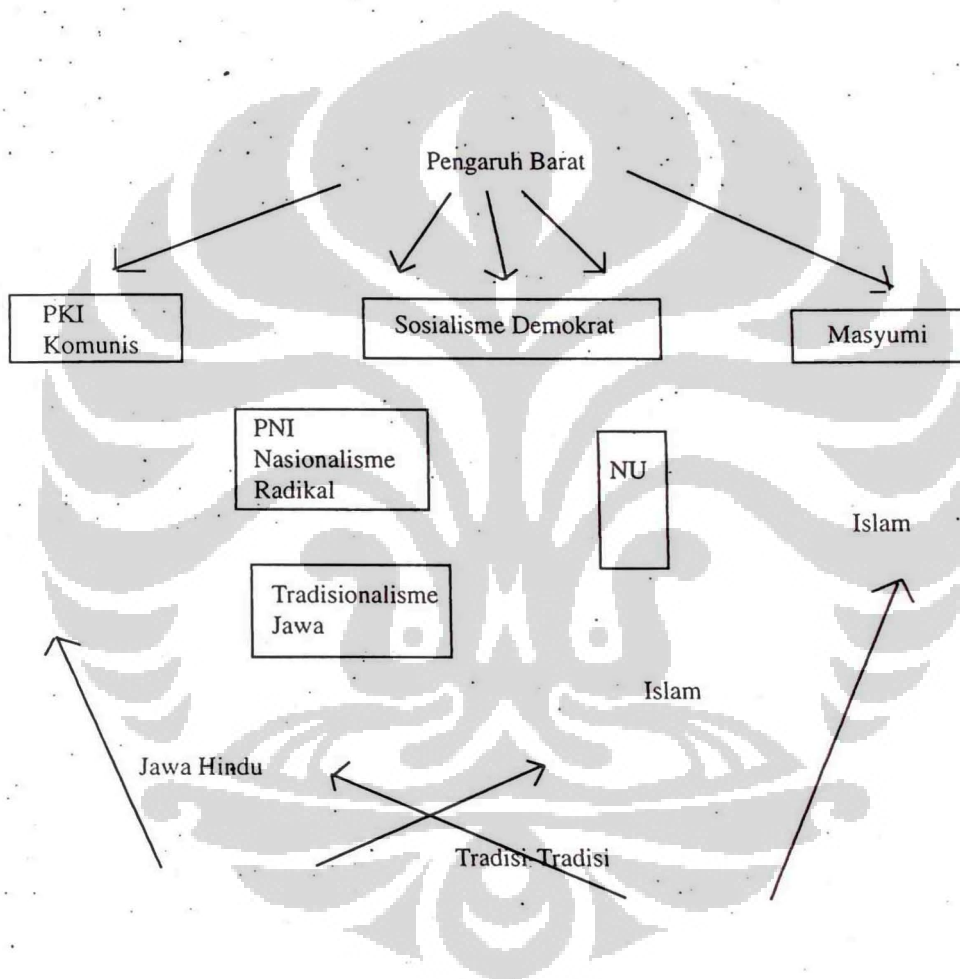
- | | |
|--|--|
| — Harian Rakyat 1962-1965 | — Dr. B.P. Paulus, SH, seorang birokrat dari Partai Katolik di Jakarta, tahun 1992 dan 1993. |
| — Suluh Indonesia 1962-1965 | |
| — Duta Masyarakat 1962-1965 | — Yohanes Barus, Wakil Sekjen Partindo di Jakarta, tahun 1992 dan 1993. |
| — Sinar Harapan 1962-1967 | |
| — Harian Merdeka 1962-1965 | |
| — Harian Kompas 1965-1965 | — Soebagyo Pr, Wakil Pemimpin Redaksi <i>Harian Sinar Harapan</i> , di Jakarta, Juni 1993. |
| — Harian Angkatan Bersenjata 1965-1965 | — Hoeta Soehoet, Pemimpin Umum dan Dewan Redaksi <i>Harian Abadi</i> , di Jakarta, 1993. |

INDEKS

- Abdulrachman, PM, 2, 4, 50, 52, 56, 57, 58, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 102, 123
- Aidit, N.D., 73, 77, 88, 104, 122.
- Amerika Serikat, 1, 2, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 71, 86, 88, 92, 120, 123
- AMPAI, 112
- Angkatan Bersenjata, 19, 45, 70, 117, 118, 122, 128
- Anti-Indonesia, 108
- Australia, 53, 54, 71, 86, 94, 123
- Blok-Kapitalis, 1, 46, 56
- Blok Komunis, 1, 46, 56
- BPS, 32, 33, 43, 44, 114
- Collapse, 60
- Content Analisis, 18
- Deklarasi Bogor, 114
- Deklarasi Manila, 62, 94
- Demokrasi Terpimpin, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 53, 78, 119, 119, 128
- Diah, M.D., 127
- Dikremus, 95
- Duta Masyarakat, 7, 19, 45, 70, 74, 75, 78, 85, 86, 90, 91, 92, 96, 122, 128
- Dwikora, 64, 65, 66, 67, 105, 110
- Editorial, 20, 72, 74, 77, 122
- Federasi Malaysia, 2, 4, 22, 36, 37, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 74, 75, 78, 82, 87, 89, 91, 94, 95, 97, 119, 120, 123
- Front Nasional, 25, 27, 28, 87, 88
- Ganyang Malaysia, 3, 43, 61, 64, 67, 71, 95, 97, 121, 123
- Harian Rakyat, 7, 19, 43, 45, 70, 72, 74, 77, 80, 86, 88, 91, 94, 95, 122, 123
- Hittler, 95
- Induk Karangan, 20, 70, 74, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 122
- Inggris, 2, 4, 32, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 86, 89, 90, 94, 96, 123
- Jepang, 94
- Kalimantan Utara, 2, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 92, 95, 96
- Kifli Abang, Jen Len, 99
- Kolim, 1, 10, 11, 41, 47, 51, 52, 53, 54, 60, 72, 74, 76, 77, 81, 82, 85, 88, 123, 126
- Kompas, 7, 19, 45, 70, 117, 118, 123
- Konfrontasi Ekonomi, 2, 4, 16, 22, 43, 63, 64, 66, 71, 97, 101, 105
- Konfrontasi Militer, 2, 4, 16, 22, 43, 71, 97, 105
- Konfrontasi Politik, 2, 4, 22, 32, 63, 64, 66, 71, 78, 82, 97, 108
- Kontrarevolusioner, musuh, 88, 104, 121
- KOTI, 67, 68, 69, 115
- KOTOE, 64, 67, 101
- Leimena, DR, 125
- Macapagal, Presiden, 56, 92, 93
- Malaysia Day, 100
- MAPHILINDO, 56, 62, 93, 98
- Merdeka, 7, 19, 43, 70, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 96, 122
- Merrill, 5
- Misi, Visi surat kabar, 9, 13, 14, 16, 119, 121
- Musuh Nomor Satu, 104, 124
- Matter of principle, 106
- Nasakom, 12, 27, 29, 34, 65, 120, 121
- Nasionalis, 34
- Nasionalisme-radikal, 1, 9, 10, 11
- Nasution, H.A., 57, 122, 118, 124
- Nefos, 36, 37, 57, 76, 77, 86, 89, 120, 123
- Nekolim, 2, 4, 34, 36, 55, 57, 58, 59, 71, 74, 87, 88, 123
- Oldefos, 36, 86, 89, 120, 123
- Oratoris, 23
- Paulus, P.B.DR., 127
- Pers aviliasi, 6, 7
- Pers Independen, 6
- Pers Indonesia, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 38, 40, 42, 45, 70, 72, 79, 82, 119, 119
- Pers Partai, 6, 9, 12
- Pers Terpimpin, 3, 8, 22, 38, 42, 45, 119
- Politik Konfrontasi, 2, 4, 13
- Politik Surat kabar, 6, 119
- Pri, Subagyo, 127
- Partai Katolik, 127, 130
- Proyek (Nekolim) Inggris, 58, 57, 61, 65, 81, 82, 86, 124
- radikal, 33
- revolusioner-progresif, 2, 3, 9, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 60, 65, 76, 77, 80, 82
- Ruslan Abdulgani, 57, 76
- SAW, Mohammad Nabi, 212
- Sinar Harapan, 7, 19, 70, 79, 87, 88, 128
- Soekarno, Presiden, 11, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 49, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 76, 77, 83, 88, 92, 93, 95
- Soehoet Oeta, 131
- Subandrio, DR Menlu, 58, 61, 73, 79, 83, 90, 104, 124
- Suluh Indonesia, 7, 19, 45, 70, 73, 76, 79, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 122, 123
- Survival, 16, 17, 20, 80, 119
- Tajuk Rencana, 17, 20, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 119, 120, 122
- Teori Domino, 125
- Trompet, corong partai, 12, 119, 119, 124

Lampiran 1

Bagan
LIMA ALIRAN POLITIK INDONESIA
(Menurut Feith)

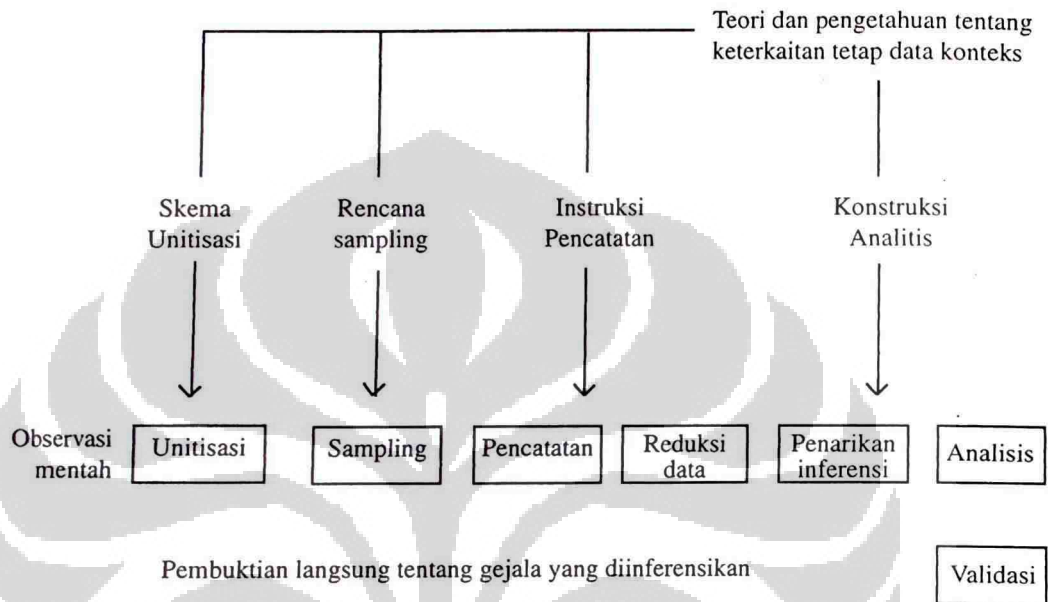


Sumber: dikutip dari Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: 1981).

Lampiran 2a

Gambar 1

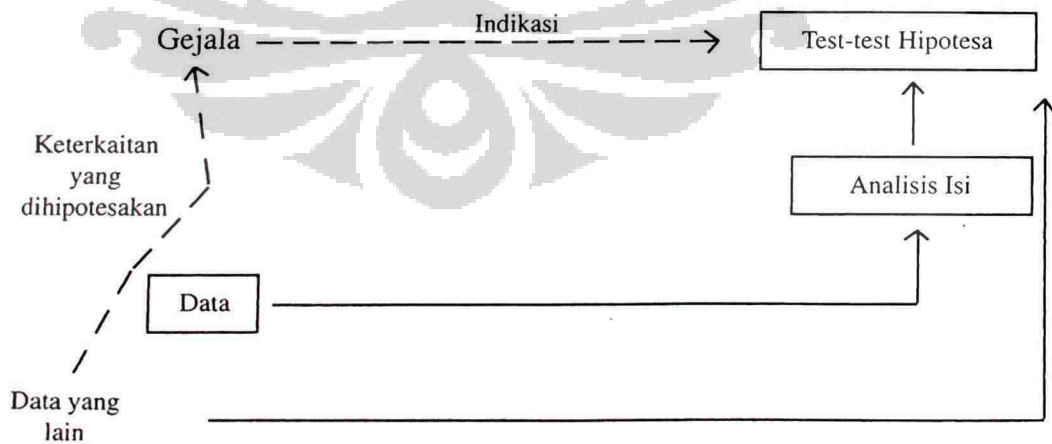
PROSEDUR-PROSEDUR DALAM ANALISIS ISI



(Sumber: Klaus Krippendorf, *Analisis Isi*, hal. 73)

Gambar 2

DESAIN ANALISIS ISI UNTUK TEST HIPOTESA



(Sumber: Klaus Krippendorf, *Analisis Isi*, hal. 74)

Lampiran 2b

DESAIN ANALISIS ISI SIKAP PERS INDONESIA TERHADAP KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA

Indikasi

Gejala

1. antusiasme Harian Rakyat
2. isu Kolim dan Nekolim
3. konfrontasi klaim nasional.
4. keterlibatan Inggris dkk.
5. G 30 S/PKI dan upaya rujuk

test-test hipotesa

- pandangan dan sikap pers terhadap konfrontasi

Analisis Isi

1. Tajuk Rencana
2. Tinjauan luar negeri
3. Hasil wawancara

Keterkaitan yang dihipotesakan

Data

1. pers sebagai trompet partai
2. konflik ideologi & politik domestik
3. konflik terselubung PKI vs AD dan non-PKI
4. dominasi PKI
5. konfrontasi politik strategik PKI

Data yang lain

1. Rencana Pembentukan Federasi Malaysia
2. Pertentangan internal dan pemberontakan Kalimantan Utara
3. Politik Konfrontasi
 - konfrontasi politik
 - konfrontasi ekonomi dan militer

Lampiran 3

Tabel 1

**PERS INDONESIA
DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN**

Nama Surat kabar	Corong/berafiliasi dengan	Aliran politik/ ideologi
Harian Rakyat	PKI	Komunisme
Suluh Indonesia	PNI	Nasionalisme Radikal
Merdeka	Independen	Nasionalisme Moderat
Sinar Harapan	Parkindo	Kristen Protestan
Duta Masyarakat	NU	Islam Konservatif
Harian Angkatan Bersenjata	ABRI	Pancasila
Kompas	Partai Katolik	Kristen Katolik

Lampiran 4

**BEBERAPA DATA TENTANG TUJUH SURATKABAR YANG
DIJADIKAN SAMPEL/OBYEK PENELITIAN**

1. **Harian Rakyat** : pembawa suara PKI
 - 1.1. Pemimpin Umum : Samosir
 - 1.2. Penanggungjawab : Naibaho
 - 1.3. Dewan Redaksi : Njoto, Naibaho
 - 1.4. Penerbit : PT Rakyat
 - 1.5. Izin Terbit Perda : Peperda No. 159 tanggal 1-11-1960
 - 1.6. SIPK : Nomor 1776/A-36/807/1
: Kep. Menpen No. 1001 SK/UPPG/
SIT/65 tanggal 9 Maret 1965.
 - 1.7. Oplah : 44.000 eksemplar
 - 1.8. Harga eceran : Rp 25,- (Jl. Pintu Besar No. 93 Jak.)

2. **Harian Suluh Indonesia (Sulindo)** : pembawa suara PNI
 - 2.1. Pemimin Umum/Redaksi : Hartojo
 - 2.2. Dewan Redaksi : Mh. Isnadi
 - 2.3. Penerbit : PT. Suluh Indonesia
 - 2.4. Terbit Pertama kali : 1 Oktober 1953
 - 2.5. Izin Terbit : Deppen No. 15/SK/OPPG/SIT/1963
tanggal 27-6-1963
 - 2.6. Harga langganan : Rp 600
 - 2.6. Alamat : Jl. Pintu Besi No. 31 Jakarta

3. **Harian Duta Masyarakat** : pembawa suara NU
 - 3.1. Pemimpin Umum/Redaksi : K.H. Prof. Saifuddin Zuhri (nonaktif)
 - 3.2. Penanggungjawab Redaksi : H. Mahmud Djunaedi
 - 3.3. Wkl. Penanggung jawab Redaksi : H.M. Said Buduairy
 - 3.4. Dewan Redaksi : H. Mahbub Djunaedi, H.M. Said
Buduairy, H.A. Chalid Mawardi,
M. Sutarjo
 - 3.5. Motto : Untuk Perjuangan Nasional
Indonesia mencapai Keridhaan Allah.
 - 3.6. Penrbit : PT Duta Sembilan.
 - 3.7. Alamat : Jln. Kramat Raya 65 A Jakarta.
 - 3.8. Izin Terbit : SK Menpen RI No. 103/SIT/UPPG/
1963
 - 3.9. Harga eceran : Rp 25,-

4. **Harian Sinar Harapan** : berafiliasi dengan Parkindo
 - 4.1. Pemimin Umum : H.G. Rorimpandey

- 4.2. Penanggungjawab Redaksi : Mr. J.C.T. Simorangkir
 4.3. Dewan Redaksi : Mr. J.C. T. Simorangkir,
 Rorimpandey, Soebagyo-Pr
 4.4. Izin Terbit : SK Menpen No. 067/61 tgl. 16-3-
 1961.
 4.5. Penerbit : PT Sinar Kasih
 4.6. Harga eceran : Rp 2,10
 4.7. Oplah : 25.000 eksemplar
5. **Harian Merdeka** : independen
 5.1. Diterbitkan pertama kali : 1 Oktober 1945 oleh B.M. Diah
 5.2. Pemimpin Umum Redaksi/
 Penanggungjawab : Joesuf
 5.3. Dewan Redaksi : Anhar, Herawati Diah, Asnawi Idris
 5.4. Penerbit : PT. Merdeka Press
 5.5. Alamat : Jl. Hayam Wuruk 9 Jakarta
 5.6. Izin Terbit : Peperda No. 144
 : SIPK No. 1087/A-6a/34/1 26-4-1962.
 5.7. Harga eceran : Rp 2,10 (langganan Rp 600/bulan).
6. **Harian Kompas** : berafiliasi dengan Partai Katolik
 6.1. Pemimin Umum : P.K. Ojong S.H.
 6.2. Pemimpin Redaksi/
 Penanggungjawab : Jakob Oetama
 6.3. Wakil Pemred/
 Penanggungjawab : P. Swantoro
 6.4. Percetakan : PT Gramedia
 6.5. Alamat : Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta
 6.6. Izin Terbit : SK Menpen RI No. 07/Per-5/SK/1965
 : Dr. PP/SIT/1970 tanggal 12-8-1970
7. **Harian Angkatan Bersenjata** : pembawa suara ABRI (9 Maret 1965)
 7.1. Pengawas : Hankam/KASAB/Men/PANGAB
 7.2. Penanggungjawab : Brigjen Sugandhi
 7.3. Penerbit : Staf Angkatan Bersenjata
 7.4. Izin Terbit : SK Menpen No. 1001/SK/UPPG/
 SIT/1965
 7.5. Harga eceran : Rp 25,-

(Sumber: *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia. Serikat Penerbit Surat kabar Pusat. 1971. Jakarta*).

Lampiran 5

**DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG 5 JULI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KAMI, PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan hikmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI, PRESIDEN

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

SUKARNO

(Sumber: dikutip dari Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 1 (Jakarta: 1980), kompendium tanpa halaman).

Lampiran 6

Ikhtisar Tindakan Anti Pers 1952 s/d 1965	
1952. Mei - Desember	14
1953	14
1955	8
1956	13
1957	125
1958	95
1960	93
1961	52
1962	16
1963	6
1964	10
1965. Januari - September	10
14 tahun Tindakan Anti Pers	561

Sumber: Edward C. Smith, PEMBREIDELAN PERS DI INDONESIA,
(Jakarta, 1986) hal. 241.

Lampiran 7

PERATURAN PEPERTI No. 10/1960

Berdasarkan Peraturan Peperti No. 10/1960, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum izin terbit dikeluarkan. Di antaranya;

- (1) Mendukung dan membela Manipol dan program pemerintah.
- (2) Menjadi alat penyebarluasan Manipol dengan tujuan menghapus imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme dan separatisme.
- (3) Membela politik luar negeri bebas dan aktif serta mendukung pelaksanaannya; tidak mendukung perang dingin antara kedua blok asing serta tidak menjadi alat perang tersebut.
- (4) Memperkuat keyakinan Rakyat Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar, orientasi, program dan kepemimpinan revolusi.
- (5) Menyokong setiap langkah untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan maupun ketenangan situasi politik.
- (6) Meningkatkan kesadaran terhadap kepribadian Indonesia, umpamanya mencegah tulisan-tulisan, gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang bersifat sensasi dan bertentangan dengan perasaan susila.
- (7) Memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap keadaan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dengan selalu berpedoman pada Manipol.

Di samping ketentuan-ketentuan di atas, para penerbit dan pimpinan redaksi surat kabar dan majalah juga diwajibkan untuk menandatangani pernyataan berisi 19 pasal. Ke-19 pasal tersebut adalah:

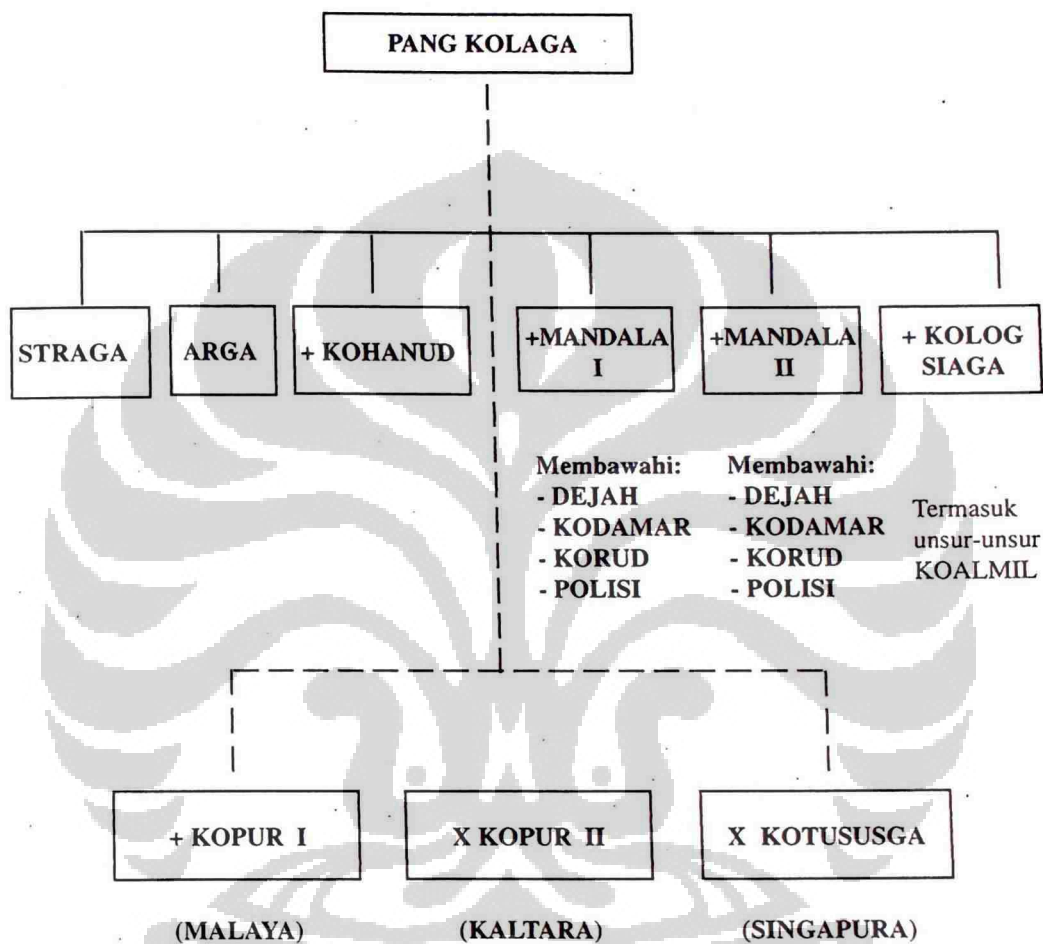
- (1) Kami sanggup mematuhi pedoman-pedoman yang telah/dan/atau akan dikeluarkan/diberikan oleh Penguasa Perang Tertinggi dan lain-lain instansi pemerintah yang berwenang mengenai penerbitan.
- (2) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Manifesto Politik RI secara keseluruhan.
- (3) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela program pemerintah.
- (4) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

- (5) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela UUD 1945.
- (6) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Pancasila.
- (7) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Sosialisme Indonesia.
- (8) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Demokrasi Terpimpin.
- (9) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Ekonomi Terpimpin.
- (10) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela kepribadian nasional Indonesia.
- (11) Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela martabat negara Republik Indonesia.
- (12) Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memberantas imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme/separatisme.
- (13) Penerbitan kami wajib menjadi pembela/pendukung dan alat pelaksana dari politik bebas dan aktif negara RI serta tidak menjadi pembela/pendukung dan alat dari perang dingin antara blok negara asing.
- (14) Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila.
- (15) Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Manifesto Politik RI.
- (16) Penerbitan kami wajib membantu usaha penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum serta ketenangan politik.
- (17) Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang bersifat sensasional dan merugikan akhlak.
- (18) Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung penghinaan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara asing yang bersahabat dengan Republik Indonesia.
- (19) Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung pembelaan terhadap organisasi yang dibubarkan atau dilarang berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1960.

(Sumber: *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia. Serikat Penerbit Surat kabar Pusat. 1971. Jakarta*).

Lampiran 8

BADAN KOMANDO MANDALA SIAGA

**Keterangan:**

x : offensif

+ : defensif

--- : pembinaan

(Sumber: Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka DWIKORA oleh Kusumah Hadiningrat, Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, 1971).

Lampiran 9

KEKUATAN PASUKAN DAN PERLENGKAPAN ABRI DALAM OPERASI DWIKORA

1. Komando Tempur Satu (KOPURTU) untuk daerah Semenanjung Malaya dengan unsur-unsurnya:
 - a. Unsur Tempur:
 - (1) 12 Jon Infantri AD, termasuk 1 Brigade Para
 - (2) 1 Jon KKO
 - b. Unsur Pasukan Khusus dan Teritorial menurut kebutuhan.
 - c. Unsur udara taktis menurut kebutuhan.
2. Komando Tempur Dua (KOPURDA) untuk daerah Kalimantan Utara dengan unsur-unsurnya:
 - a. Unsur Tempur yang terdiri dari: 9 Jon Infantri, 3 Jon BRIMOB, 1 Jon KKO
 - b. Unsur Pasukan Khusus dan Territorial menurut kebutuhan.
 - c. Unsur skwadron helikopter.
 - d. Unsur Udara taktis menurut kebutuhan.
3. Komando Armada Mandala Siaga (KOARLAGA) dengan Angkatan Tugas Tempur (ATT) dan Angkatan Tugas Amfibi (ATA) dengan gugus dan unsur-unsur:
 - a. Angkatan Tugas Tempur:
 - (1) Gugus Tugas Alpha dengan: 1 buah kapal markas dan penjelajah, 3 buah kapal perusak, 4 perusak ringan, 5 buah kapal selam.
 - (2) Gugus Tugas Beta dengan: 2 rocket cutter, 4 MTB, 5 penyapu ranjau, 6 buru selam, 3 oiler, 1 tender, 1 Salvage.
 - (3) Gugus Tugas Gama dengan: 3 buah TU dan 16 KS.
 - b. Angkatan Tugas Amfibi dengan:
 - (1) Gugus Tugas Angkut: 2 APA, 4 buah LST, 4 buah kapal niaga
 - (2) Gugus Tugas 645
 - (3) Sampan bermotor 200 buah.
4. Komando Strategis Siaga (KOSTRAGA) dengan:
 - a. Unsur Strategis: 8 TU-16, 4 P51, 7 B25, 2 RC, 2 MTB
 - b. Unsur Lintas Udara: 3 C130, 11 C47, 4 LL-14
5. Komando Logistik Siaga (KOLOGA) dengan:
 - a. Unsur bidang angkutan: semua unsur KOALMIL dan Armada Niaga bantuan
 - b. Unsur bidang lain: unsur-unsur sesuai dengan kebutuhan

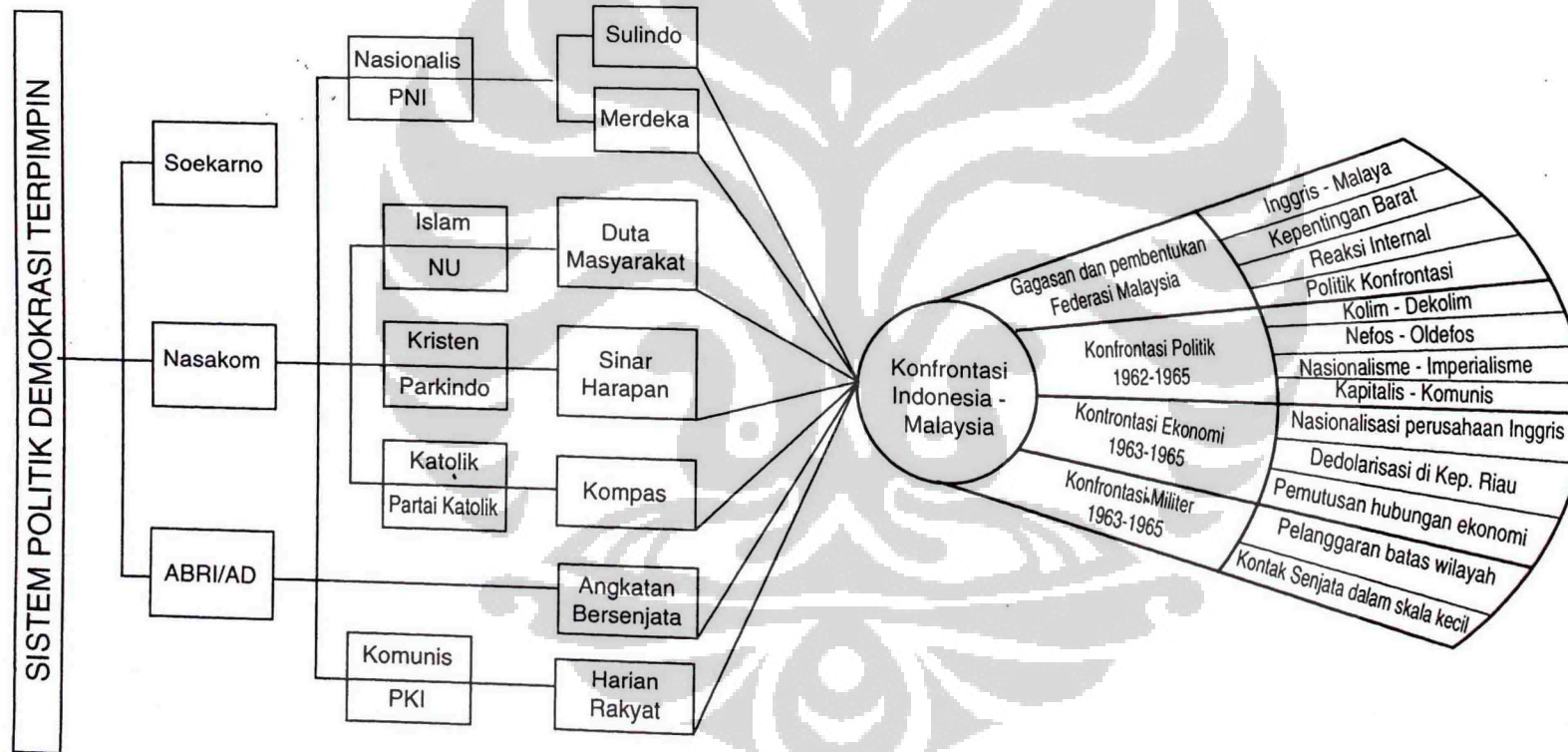
(Sumber: Kusumah Hadiningrat, Sejarah Operasi Gabungan DWIKORA).

Lampiran 10

**KEKUATAN KAPAL PERANG LAWAN
DALAM RANGKA KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA**

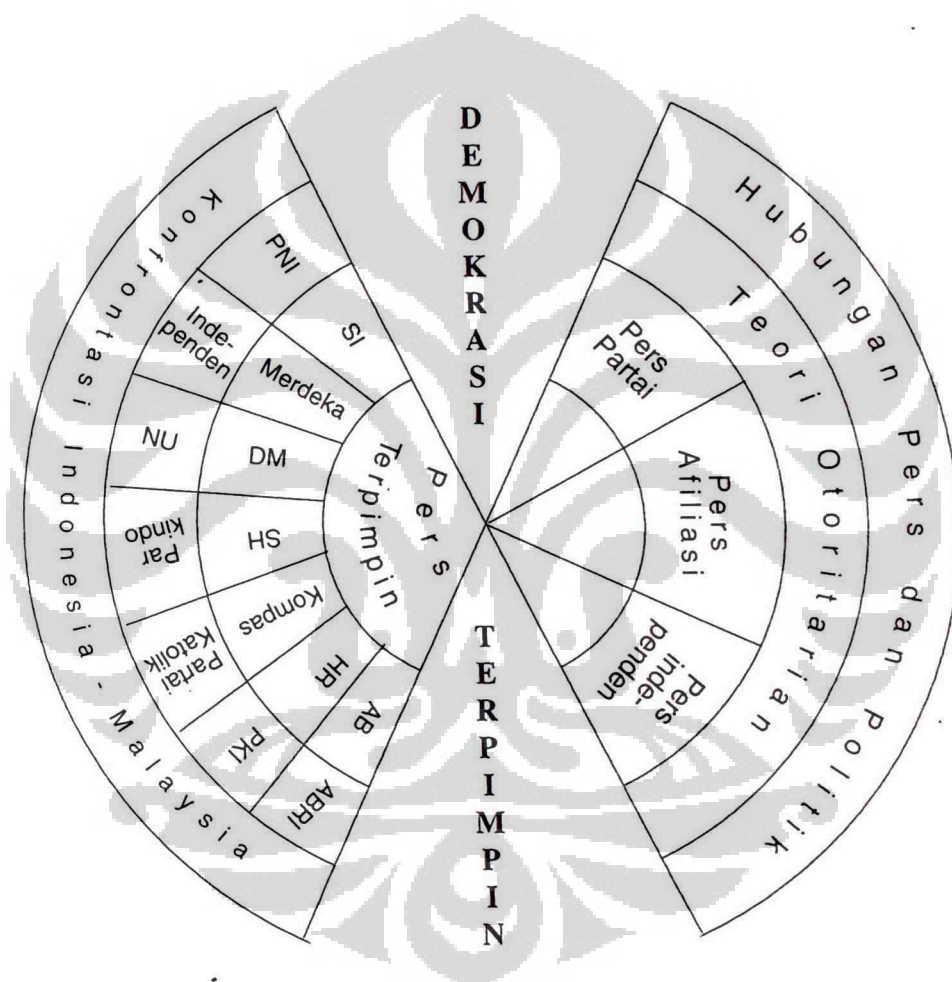
1. Kapal Induk 3 buah yang dilengkapi pesawat tipe: Buccaneer, Sea Nixon, dan Scimitar.
 2. Kapal Komando 2 buah dengan pesawat tipe: Whirlwind dan Wessex.
 3. Penjelajah 2 buah, perusak kendali 2 buah (HMS Hampshire dan HMS Kent).
 4. Perusak (DD) 12 buah, Fregat (DE) 19 buah, Escort maintenance 1 buah.
 5. Tender SS 1 buah, kapal selam 6 buah, Tender PR 3, PR 25, Boom Defence Vessel 2, kapal bantu 23, Survey Vessels 3, Buru Selam.
 6. Pusat Pangkalan AU Inggris dengan Far East Fleet ada di Singapura.
 7. Kekuatan AL di Kalimantan Utara: 2 kapal perang mine sweeper (Australia 3 kapal perang Inggris dengan helikopter, pos terapung di perairan Sebatik yang dilengkapi manusia-manusia katak).
 8. Pertahanan Udara di Malaysia:
 - a. SQ Peluru Kendali Bloodhound ground to air and weapon system.
 - b. Pembom: 1 SQ RAN Neelcan Bomber, 4 pesawat RAF Canberra Bomber, 3 SQ Canberra Bomber dari RAF dan RAAF (39 pesawat), 1 SQ Bomber dari RAF/RAAF (15 pesawat).
 - c. Pemburu : 2 SQ Hawker Hunter (RAF) 24, 2 SQ Gaster Javelin (RAF) 24, 2 SQ Avon Sabre (RAF) 30 pesawat.
 - d. Pesawat pengangkut: 1 SQ hosting C-1 RAF, 1 SQ Valleta (RAF), 1 SQ Twin Pioneer (RAF/RAAF), 1 SQ Beverley, 1 SQ Westland Belvedere (Heli 1 SQ Heli Whirlwind, 5 buah anti Submarine, 7 buah Alouette).
 9. Kekuatan AU di pangkalan Australia:
 - a. Pembom: 2 SQ Canberra bomber (di Amberley, Brisbane).
 - b. Pemburu: 2 SQ Pemburu Sabre (di Wilhamston, New Castle).
 - c. Pengintai: 2 SQ Neptune (di Townville, Quesland, dan Sydney).
 10. Kekuatan Pasukan Darat:
 - a. Commander in Chief Letjen Sir Richard Howetson.
 - b. Pasukan Gurkha: 17 th Gurkha Division di Semenanjung Malaya.
 - c. Royal Marine: 11 Royal Marine Brigade (7 Brigade di Semenanjung Malaya dan 4 Brigade di Kalimantan Utara).
 - d. Pasukan Infantri: 14 Jon di Semenanjung Malaya dan 1 Jon Para : 13 Jon di Kalimantan Utara.
 - e. 2 Jon kaveleri: 1 1/2 Jon di Malaya dan 1/2 Jon di Kalimantan Utara.
 - f. 6 Jon Ar Lap dan 2 Jon PSU yang ditempatkan di:
 - Semenanjung Malaya : 5 Jon artileri ditambah 2 Jon PSU
 - Kalimantan utara : 1 Jon.
 - g. Zeni dipersiapkan di :
 - Semenanjung Malaya : 4 SQ
 - Kalimantan Utara : 2 SQ
- (Sumber: Kusumah Hadiningrat, Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora, 1971).**

PARADIGMA PANDANGAN DAN SIKAP PERS INDONESIA TERHADAP KONFRONTASI INDONESIA — MALAYSIA DALAM REALITA POLITIK DOMESTIK MASA DEMOKRASI TERPIMPIN



Lampiran 12

**DIAFRAGMA DAN SPEKTRUM
PANDANGAN DAN SIKAP PERS INDONESIA
TERHADAP
KONFRONTASI INDONESIA — MALAYSIA**

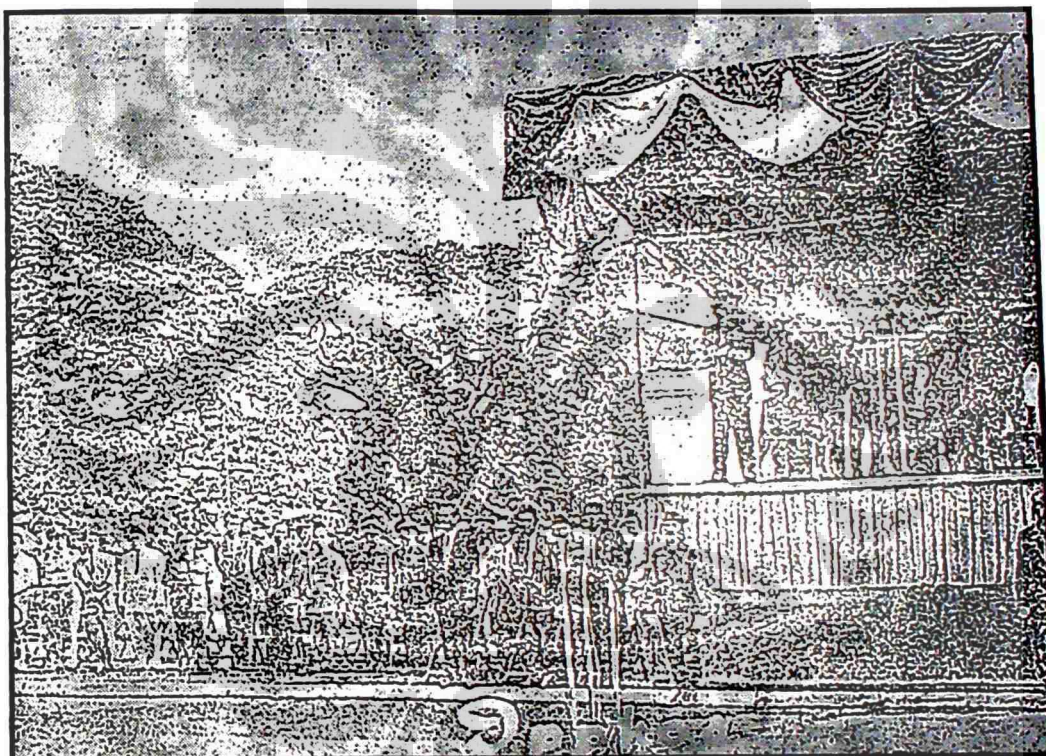


GAMBAR DAN KARIKATUR

Gambar 1

Kita akan Lantjarkan Perang tanpa batas

APABILA TERDJADI PERANG TERBUKA
DENGAN NEKOLIM

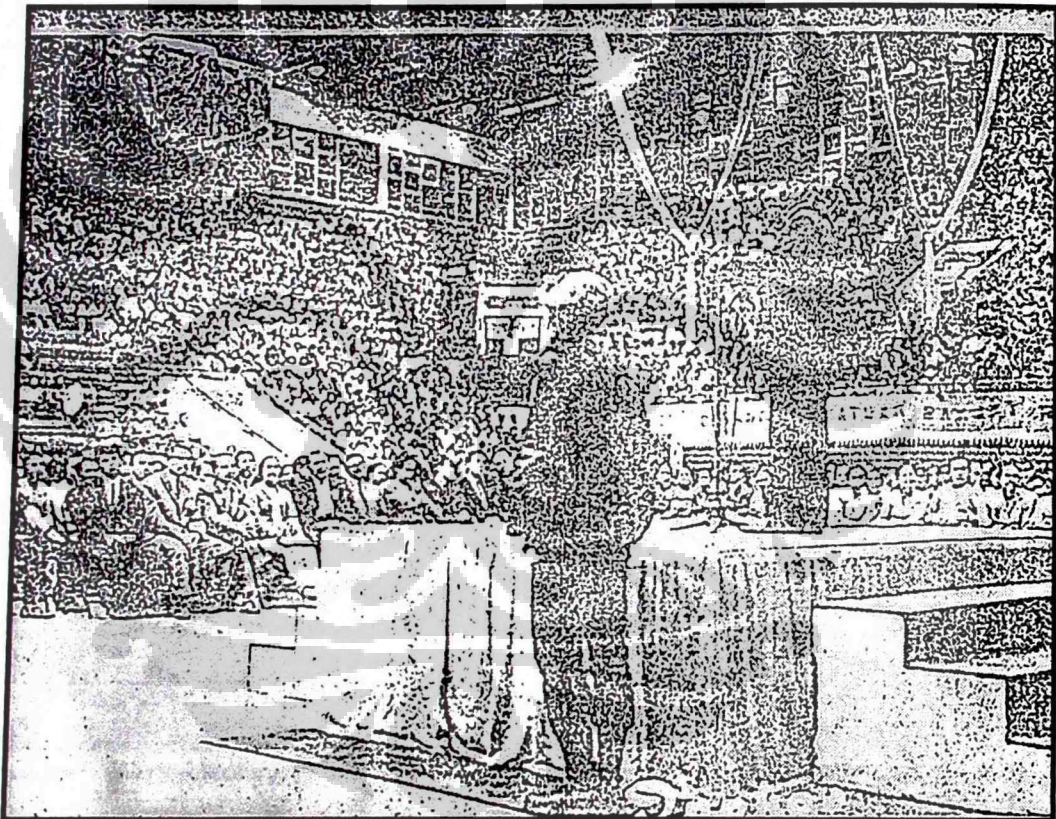


Apel besar Sukarelawan di depan Istana pada tanggal 5 Mei 1964. Pada saat itu dikeluarkan Komando "Ganyang Malaysia".

Gambar 2

Mengganjang "Malaysia"

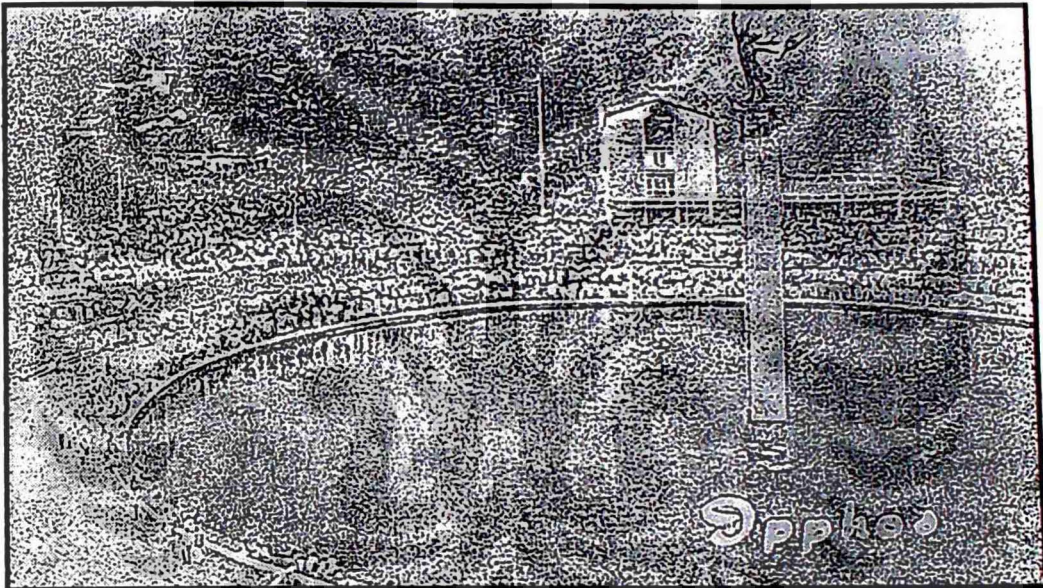
Tugas Manipol



Rapat Umum anti Pangkalan Asing di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1965, yang menelorkan Komando "Indonesia Keluar dari PBB".

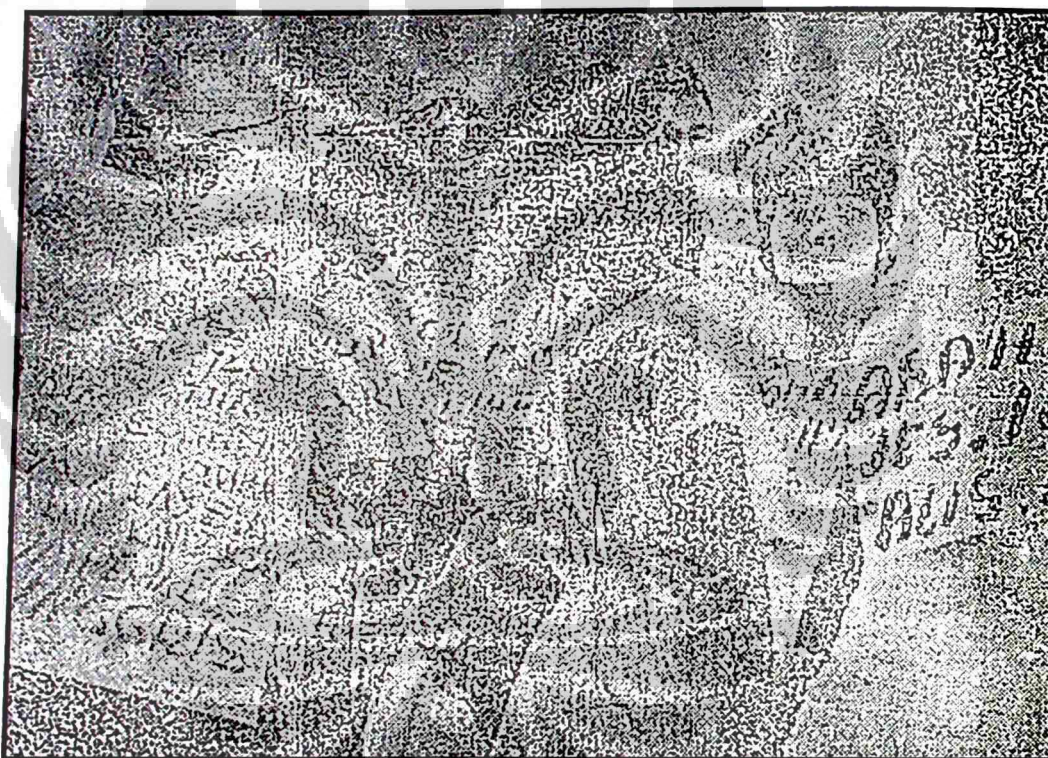
Gambar 3

Imperialis AS dan Inggris
harus dilenjakkan
KONFRONTASI TERHADAP KELEMAHAN² KITA



Demonstrasi anti-Malaysia di Kedutaan Besar Jakarta pada tanggal 18 September 1963. Para demonstran membakar gedung dan mobil kedutaan.

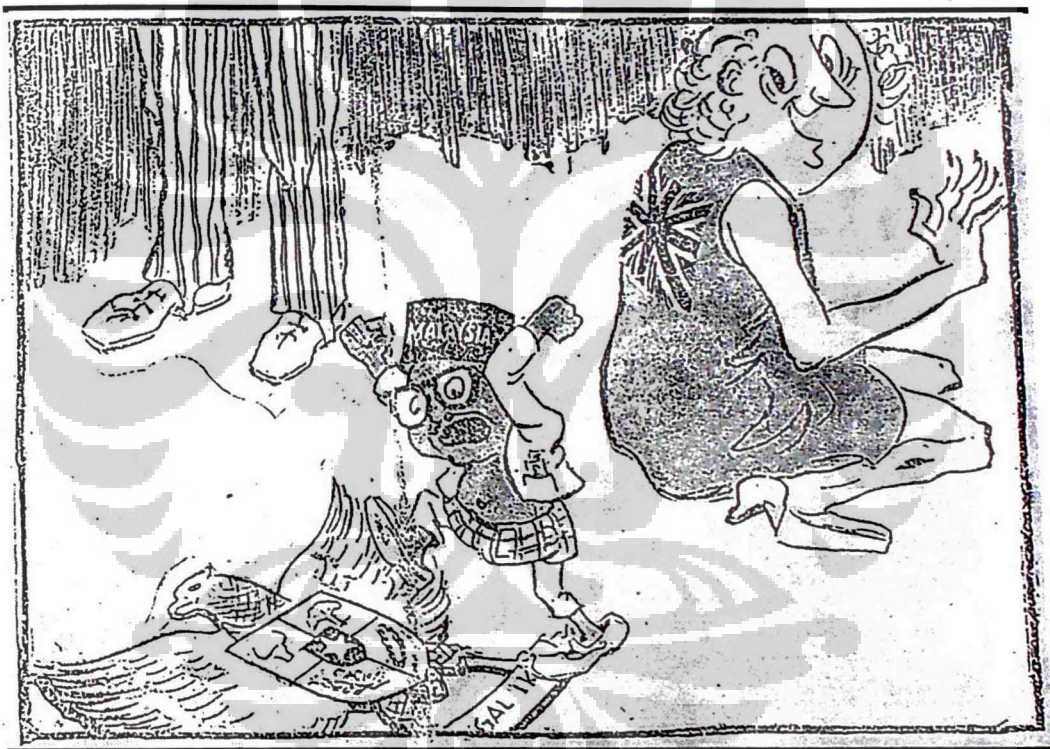
Gambar 4



Puteri² kitapun tak ketinggalan dalam turut serta memperkuat aksi-aksi menentang "Malaysia". Ketika berdemonstrasi mereka mengalungkan sembojan² anti Malaysia jang a.l. berbunyi "Azahari yes, Tengku no!" dsb. disamping itu mereka membawa pula karangan bunga "berkabung" untuk kehantjuran baji "Malaysia".

Karikatur 1

Subandrio: Tindakan Tengku Kedjam!

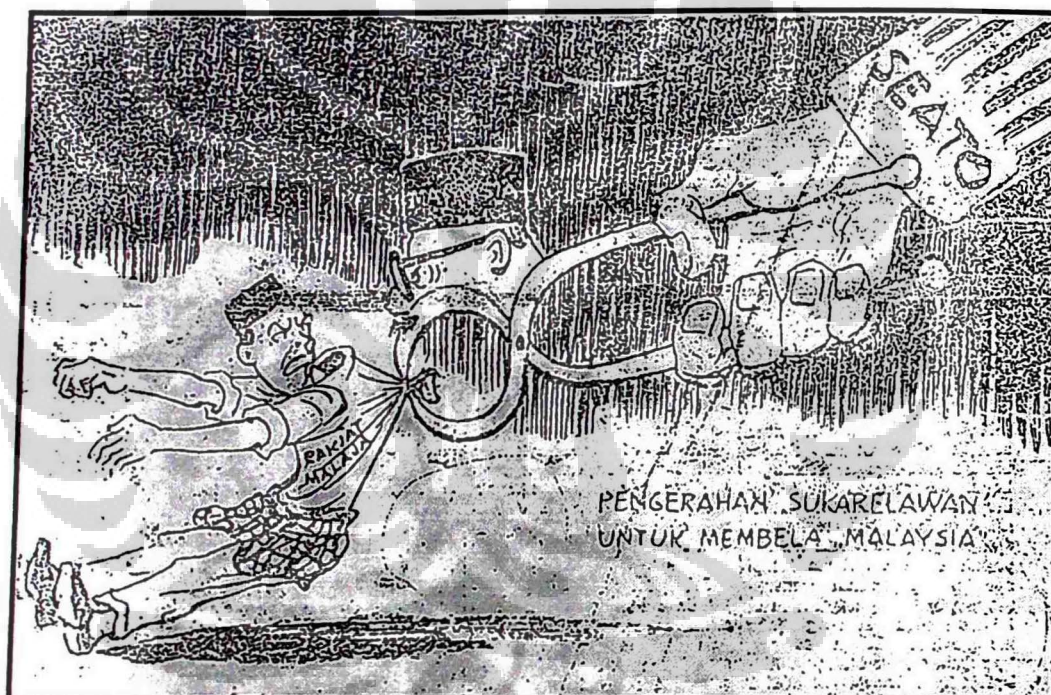


'Malaysia' bertambah gojah

- * DONALD STEPHENS MINTA BERHENTI
- * TENGGU TUNDUK PADA TAN SIEW SIN

Karikatur 2

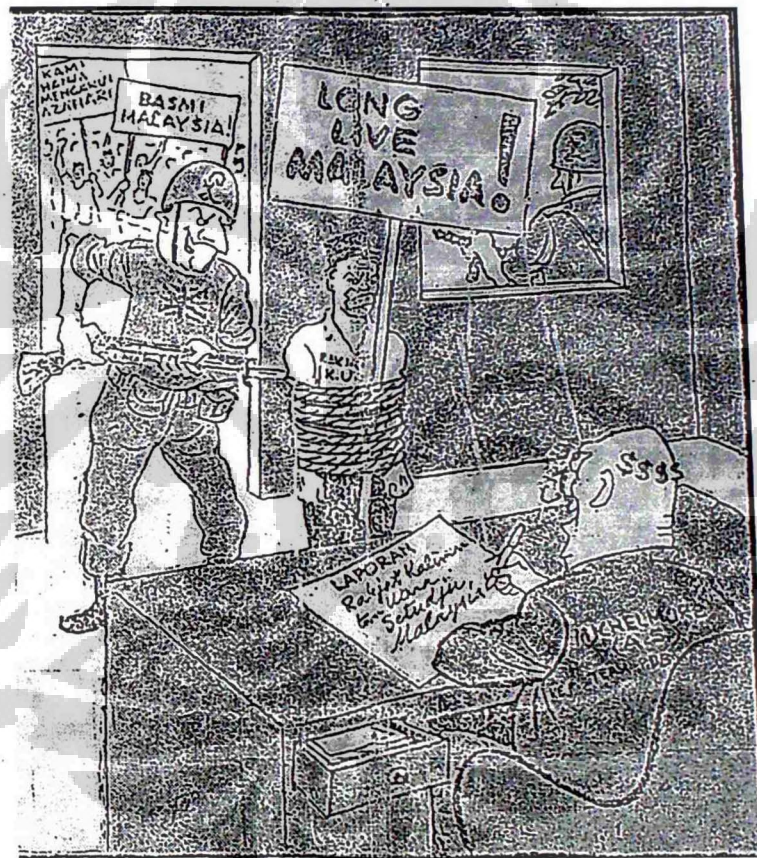
**Selama ada nekolim,
tak ada perdamaian**



**Malaysia untuk melindungi
kepentingan² imperialis Inggris**

Karikatur 3

Siapa jang membutuhkan Malaysia?



Beginilah tjara pentjataan kehendak Rakjat Kalimantan Utara. Inilah jang disebut tuan Michelmores dari Amerika Serikat "majoritet Rakjat Kalimantan Utara menjetujui Malaysia".

"Malaysia" minta sendjata kepada AS

Karikatur 4

Setengah Tahun Boikot Fil AS



"Seniman² revolusioner giat bekerja

Banjak perusahaan Inggeris diambilalih oleh kaum buruh

Kapbir dan imperialis AS dua sedjoli

Jang merongrong revolusi

Karikatur 5

**Djurubitjara Malaya berteriak:
Aiditlah jang pertama
menentang Malaysia**



Tidak mengerti Pantjasila durhaka atau..... sinting?

TENTANG PENULIS

Yosef Tor Tulis, lahir di Flores 17 Maret 1965, adalah putra ketiga pasangan Paulus Tulis dan Khatarina Jelumur. Masa kanak-kanak dihabiskannya di Lamba, Kecamatan Satar Mese, Flores Barat. Tapi, pendidikan sekolah dasar diselesaikannya di SDK Woa, Satar Mese, karena mengikuti orangtuanya sebagai guru sekolah dasar.

Pendidikan sekolah menengah ditempuhnya di Seminari Pius XII Kisol, Kecamatan Borong, Flores Barat. Setelah enam tahun (1979-1985), ia melanjutkan pendidikan imamat di Seminari Tinggi Postulat Fransiskan, Kecamatan Cibal, Flores Barat. Sambil belajar, ia mendapat kesempatan mengajar di SMP dan SMA Pagal.

Menjadi imam rupanya bukan panggilan hidupnya. Hanya setahun belajar di Seminari Tinggi Fransiskan, ia memilih melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa. Setelah enam bulan menganggur di Jakarta, pada Juli 1987, ia diterima di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang merupakan pilihan kedua Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang diikutinya. Meski untuk itu, ia harus melupakan keberhasilannya masuk 20 besar ujian masuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

Jiwa petualangan yang demikian kuat membuat ia mampu bertahan di tengah aneka tantangan hidup Ibu Kota. Sungguh bukan perkara ringan bagi seorang mahasiswa yang harus membiayai sendiri semua kebutuhan hidup termasuk biaya perkuliahan di kota besar seperti Jakarta. Selain disibukkan rutinitas perkuliahan, ia mengajar di SMP dan SMA Santo Alexander, Jakarta Selatan. Selain mengajar, ia aktif membimbing kegiatan ekstrakurikuler para siswa dalam kapasitas sebagai pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah).

Kondisi yang serba sulit tidak membuatnya putus asa. Ia bahkan berani mendatangkan empat adiknya dari Flores untuk ikut bertarung mendapatkan pendidikan di Ibu Kota. Tapi, semua itu membawa hikmah. Tuntutan biaya kebutuhan

hidup dan pendidikan bagi dirinya maupun adik-adiknya, memaksanya mencari pekerjaan tambahan di luar mengajar sebagai penulis lepas di beberapa koran Ibu Kota seperti Suara Pembaruan, Media Indonesia, Suara Karya, dan Jayakarta.

Semua kesibukan keseharian itu membuatnya praktis absen dalam berbagai kegiatan kampus, kecuali sepakbola yang menjadi hobi utamanya. Selain masuk tim inti jurusan Sejarah dan Fakultas Sastra, ia pun masuk line-up utama Tim UI dalam Liga Sepakbola Mahasiswa Jakarta.

Ketekunan dan kerjakerasnya berbuah. Pada Juli 1992, ia lulus ujian lisan komprehensif dan pada 28 Juli 1993, ia dinyatakan lulus dalam ujian skripsinya yang bertemakan: PANDANGAN DAN SIKAP PERS INDONESIA TERHADAP KONFRONTASI INDONESIA - MALAYSIA (1962-1965).

Belum setahun tamat dari UI, ia diterima di Media Gema Olahraga (GO) sebagai wartawan. Sesuai hobinya, ia mendapat kepercayaan meliput cabang olahraga sepakbola. Di tengah kesibukan meliput sepakbola, ia juga aktif sebagai anggota penulis buku olahraga terbitan GO serta beberapa kali diminta menjadi komentator sepakbola di televisi swasta AN-teve dan Indosiar. Di atas semua itu, ilmu sejarah diakuinya menjadi pisau analisis andalannya.
